



INSAN MEDAN

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020



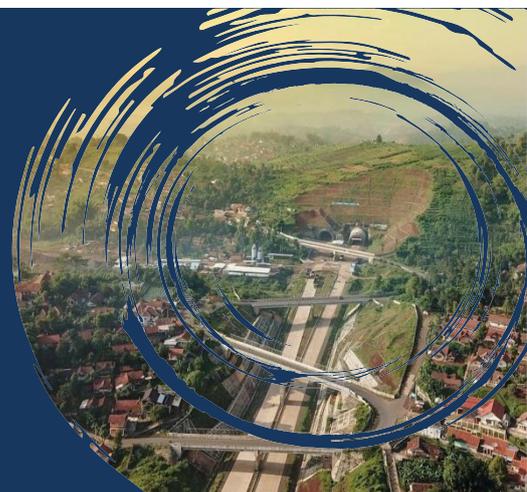
SUMEDANG

Simpati



Alun-alun Sumedang

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Sumedang Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

LKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang disusun pada akhir periode anggaran memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2019 – 2023 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Sumedang, Maret 2021

BUPATI SUMEDANG,



Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, S.T., M.M.



Curug Cipongkor

IKHTISAR EKSEKUTIF



Tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 diukur dari capaian target indikator kinerja utama (IKU) Bupati/Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023, bahwa telah ditetapkan IKU Bupati/Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebanyak 19 indikator. Capaian IKU ini secara garis besar menggambarkan pula capaian kinerja tahun 2020 atas RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023.

Rata-rata realisasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2020 sebesar 91,20% (Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI). Adapun rincian capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Ke-1 : Angka Harapan Hidup

Target kinerja “Angka Harapan Hidup” tahun 2020 sebesar 72,44 tahun dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar 72,43 tahun atau capaian kinerja sebesar 99,99% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

b. Indikator Kinerja Ke-2 : Rata-Rata Lama Sekolah

Target kinerja “Rata-Rata Lama Sekolah” tahun 2020 sebesar 8,48 tahun dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar 8,51 tahun atau capaian kinerja sebesar 100,35% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tercapai melebihi target.

c. Indikator Kinerja Ke-3 : Angka Harapan Lama Sekolah

Target kinerja “Angka Harapan Lama Sekolah” tahun 2020 sebesar 13,44 tahun dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar 12,97 tahun atau capaian kinerja sebesar 96,50% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

d. Indikator Kinerja Ke-4 : Persentase Penduduk Miskin

Target kinerja “Persentase Penduduk Miskin” tahun 2020 sebesar 8,16% dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar 10,26% atau capaian kinerja sebesar 74,27% (kinerja sedang). Target kinerja tidak tercapai.

e. Indikator Kinerja Ke-5 : Indeks Pembangunan Gender

Target kinerja “Indeks Pembangunan Gender” tahun 2020 sebesar 95,34 poin dan realisasinya 95,18 poin atau capaian kinerja sebesar 99,83% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

f. Indikator Kinerja Ke-6 : Indeks Pemberdayaan Gender

Target kinerja “Indeks Pemberdayaan Gender” tahun 2020 sebesar 69.77 poin dan realisasinya 70.94 poin atau capaian kinerja sebesar 101,67%. Capaian kinerja telah melebihi target.

g. Indikator Kinerja Ke-7 : Indeks Kerukunan Umat Beragama

Target kinerja “Indeks Kerukunan Umat Beragama” tahun 2020 sebesar 73 poin dan realisasinya 72,2 poin atau capaian kinerja sebesar 98,93% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

h. Indikator Kinerja Ke-8 : Laju Pertumbuhan Ekonomi

Target kinerja “Laju Pertumbuhan Ekonomi” tahun 2020 sebesar 7,01% dan realisasinya -1,12% atau capaian kinerja sebesar -15,98% (kinerja sangat rendah). Target kinerja tidak tercapai.

i. Indikator Kinerja Ke-9 : Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap

Target kinerja “Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap” tahun 2020 sebesar 70,8% dan realisasinya 76,96% atau capaian kinerja sebesar 108,70% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tercapai.

j. Indikator Kinerja Ke-10 : Rasio Jaringan Irigasi

Target kinerja “Rasio Jaringan Irigasi” tahun 2020 sebesar 64% dan realisasinya 64,46% atau capaian kinerja sebesar 100,72% (kinerja sangat tinggi). Capaian kinerja melebihi target.

k. Indikator Kinerja Ke-11 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Target kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” tahun 2020 sebesar 59,18 poin dan realisasinya sebesar 70,89 poin atau capaian kinerja sebesar 119,79% (kinerja sangat tinggi). Pencapaian kinerja telah melebihi target.

l. Indikator Kinerja Ke-12 : Indeks Risiko Bencana

Target kinerja “Indeks Risiko Bencana” tahun 2020 sebesar 150 poin dan realisasinya adalah 142,2 poin atau capaian kinerja sebesar 105,20% (kinerja sangat tinggi). Pencapaian kinerja melebihi target.

m. Indikator Kinerja Ke-13 : Opini BPK

Target kinerja “Opini BPK” tahun 2020 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan realisasinya adalah WTP atau capaian kinerja sebesar 100% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tercapai.

n. Indikator Kinerja Ke-14 : Nilai SAKIP Kabupaten

Target kinerja “Nilai SAKIP Kabupaten” tahun 2020 adalah “BB” dan realisasinya adalah “B” atau capaian kinerja sebesar 96,07% (kinerja tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

o. Indikator Kinerja Ke-15 : Indeks Reformasi Birokrasi

Target kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” tahun 2020 sebesar 70 poin dan realisasinya 60,01 poin atau capaian kinerja sebesar 85,73% (kinerja tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

p. Indikator Kinerja Ke-16 : Indeks Kepuasan Masyarakat

Target kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat” tahun 2020 sebesar 83 poin dan realisasinya berdasarkan data dari Bagian Organisasi adalah 83,80 poin atau capaian kinerja sebesar 100,98% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tercapai melebihi target.

q. Indikator Kinerja Ke-17 : Pengeluaran Per-Kapita

Target kinerja “Pengeluaran Per-Kapita” tahun 2020 sebesar Rp.10,38 juta dan realisasinya berdasarkan data dari BPS adalah Rp.10,22 juta atau capaian kinerja sebesar 98,46% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

r. Indikator Kinerja Ke-18 : Tingkat Pengangguran Terbuka

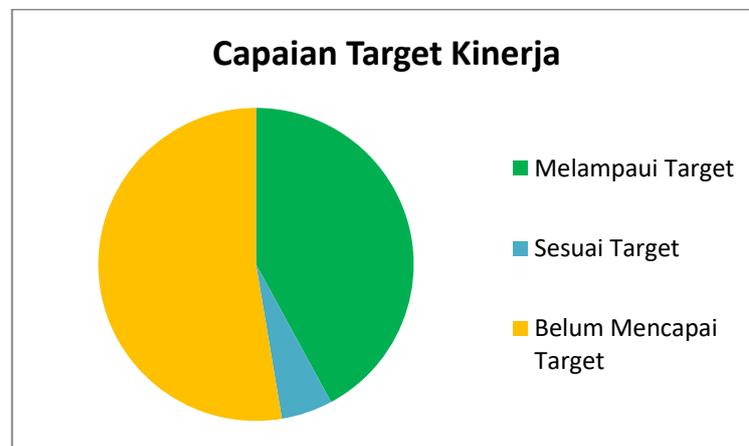
Target kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” tahun 2020 sebesar 6,35% dan realisasinya berdasarkan data dari BPS adalah 9,89% atau capaian kinerja sebesar 44,25% (kinerja sangat rendah). Target kinerja tidak tercapai.

s. Indikator Kinerja Ke-19 : Jumlah UMKM

Target kinerja “Jumlah UMKM” tahun 2020 sebesar 17.467 UMKM dan realisasinya 20.507 UMKM atau capaian kinerja sebesar 117,40% (Kinerja sangat tinggi). Capaian kinerja telah melebihi target.

Dari hasil pengukuran 19 indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Capaian kinerja 8 Indikator atau 42,11% Melampaui Target;
- Capaian kinerja 1 Indikator atau 5,26% Sesuai Target;
- Capaian kinerja 10 Indikator atau 52,61% Belum Mencapai Target.



Kemudian, apabila dilihat dari kriteria peringkat kinerja setiap capaian target indikator kinerja utama, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 15 Indikator atau 78,95% capaian kinerjanya SANGAT TINGGI.
- 1 Indikator atau 5,26% capaian kinerjanya TINGGI.
- 1 Indikator atau 5,26% capaian kinerjanya SEDANG.
- 2 Indikator atau 10,53% capaian kinerjanya SANGAT RENDAH.





DAFTAR ISI



	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Gambaran Umum Kabupaten Sumedang.....	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Perencanaan Strategis (RPJMD).....	12
2.2 Perjanjian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja	28
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2020	103
BAB IV PENUTUP	110
4.1 Kesimpulan	110
4.2 Perbaikan Kedepan	112
LAMPIRAN	



Curug Gorobog

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038, luas wilayah Kabupaten Sumedang adalah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan dengan 270 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Jatigede yaitu 11.392 Ha dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Cisarua yaitu 1.450 Ha. Di bawah ini tabel tentang luas wilayah per kecamatan dengan jumlah desa/kelurahannya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Per-Kecamatan di Kabupaten Sumedang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Wado	7.334	10	-
2	Jatinunggal	6.311	9	-
3	Darmaraja	5.403	12	-
4	Cibugel	4.999	7	-
5	Cisitu	6.398	10	-
6	Situraja	5.666	15	-
7	Conggeang	11.220	12	-
8	Paseh	3.382	10	-
9	Surian	7.645	9	-
10	Buahdua	11.149	14	-
11	Tanjungsari	4.319	12	-
12	Sukasari	3.899	7	-
13	Pamulihan	5.367	11	-
14	Cimanggung	4.298	11	-
15	Jatinangor	2.562	12	-
16	Rancakalong	5.596	10	-
17	Sumedang Selatan	9.659	10	4
18	Sumedang Utara	3.132	10	3
19	Ganeas	2.525	8	-
20	Tanjungkerta	4.393	12	-
21	Tanjungmedar	6.688	9	-

22	Cimalaka	4.755	14	-
23	Cisarua	1.450	7	-
24	Tomo	7.592	9	-
25	Ujungjaya	8.738	9	-
26	Jatigede	11.392	11	-
Jumlah		155.872	270	7

Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang pada tahun 2020 mencapai 1,159.454 jiwa, terdiri dari 584.770 jiwa penduduk laki-laki dan 574.684 jiwa penduduk perempuan, sedangkan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 406.908 KK dan kepadatan penduduk 744 jiwa/km. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2020

NO.	KELOMPOK USIA	JUMLAH
1.	Usia 0 – 4 Tahun	86.417
2.	Usia 5 – 9 Tahun	94.363
3.	Usia 10 -14 Tahun	94.532
4.	Usia 15 – 19 Tahun	96.175
5.	Usia 20 – 24 Tahun	91.368
6.	Usia 25 – 29 Tahun	87.722
7.	Usia 30 – 34 Tahun	75.581
8.	Usia 35 – 39 Tahun	87.192
9.	Usia 40 – 44 Tahun	78.235
10.	Usia 45 – 49 Tahun	77.735
11.	Usia 50 – 54 Tahun	74.467
12.	Usia 55 – 59 Tahun	63.220
13.	Usia 60 – 64 Tahun	50.513
14.	Usia 65 – 69 Tahun	39.519
15.	Usia 70 – 74 Tahun	24.470
16.	Usia 75 Tahun Ke Atas	37.945
Jumlah Total		1.159.454

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2020.

1.3.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Aparatur

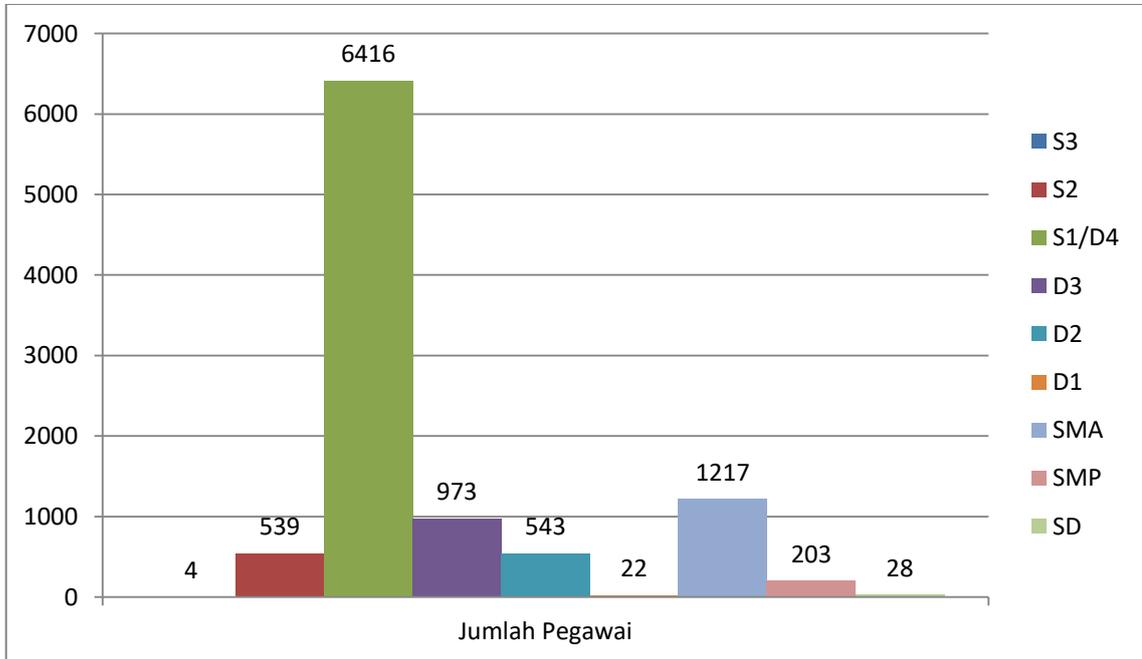
Perangkat daerah Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, yaitu sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 5. Satuan Polisi Pamong Praja
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 12. Dinas Perhubungan
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
 14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 16. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
 17. Dinas Arsip dan Perpustakaan
 18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 19. Dinas Perikanan dan Peternakan
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- f. Kecamatan sebanyak 26 unit

Berkenaan dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

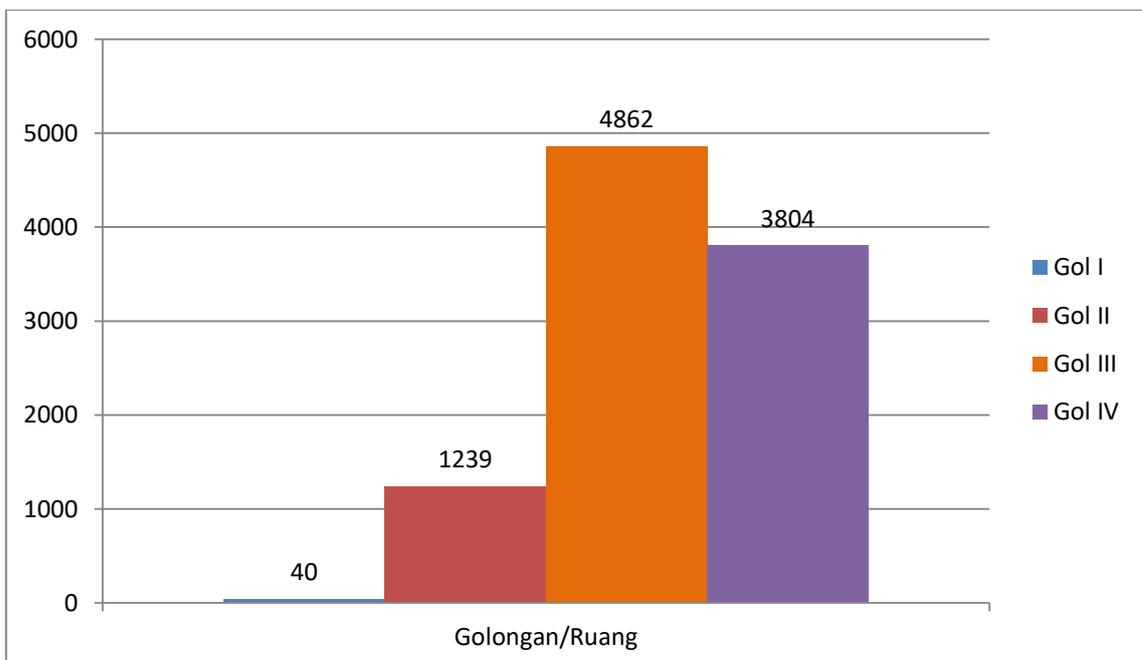
Pada akhir tahun 2020, PNS/CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berjumlah 9.945 orang terdiri dari 4.583 PNS Laki Laki dan 5.362 PNS Perempuan. Jumlah PNS sebanyak 9.725 orang dan CPNS sebanyak 220 orang. Berdasarkan data yang tersedia dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) komposisi PNS berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 1.1
Data PNS Kabupaten Sumedang Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2020



Sumber : BKPSDM

Grafik 1.2
Data PNS Kabupaten Sumedang Berdasarkan Golongan
Tahun 2020



Sumber : BKPSDM

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan yang paling nampak di Kabupaten Sumedang adalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat baik pada angka kemiskinan yang belum menurun secara signifikan maupun masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mana rata-rata pertumbuhan angka IPM Kabupaten Sumedang masih dibawah IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ini terkendala minimnya kualitas pelayanan dasar baik pelayanannya, infrastruktur dasar, infrastruktur pelayanan dan SDM-nya. Sedangkan rendahnya pelayanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini diakibatkan oleh rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar tersebut. Secara umum dapat diidentifikasi permasalahan utama dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Sumedang yaitu masih tingginya angka kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran yang cukup tinggi, kualitas infrastruktur dasar yang masih rendah, masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia jika dibandingkan dengan angka IPM Nasional dan Jawa Barat, masih rendahnya struktur perekonomian wilayah karena masih rendahnya kontribusi sektor produktif terhadap PDRB, serta masih rendahnya efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Sumedang yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah, maka melalui berbagai kriteria yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, besaran luas atau dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap jalannya roda pembangunan daerah, kemungkinan dan kemudahan dalam pengelolaannya, serta prioritas janji politik yang perlu diwujudkan, dirumuskan isu strategis Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan

Pelayanan kesehatan termasuk pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah. Kondisi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumedang masih belum dikatakan merata mengacu pada kurangnya tenaga kesehatan dan kurangnya fasilitas kesehatan. Angka kematian ibu pada saat melahirkan pun mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir ini (2013-2017). Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu juga memfokuskan pada upaya pengendalian masalah gizi masyarakat sebagai upaya pencegahan stunting. Dalam konteks pembangunan Tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan, BIJB (Bandar udara Internasional Jawa Barat) dan Jalur Kereta Api Cepat, akan menjadikan Kabupaten Sumedang sebagai salah satu poros pertumbuhan di Jawa Barat yang berpotensi menarik masyarakat untuk datang mencari kesempatan kerja di Sumedang. Oleh karena itu harus diimbangi dengan pelayanan kesehatan memadai untuk mengakomodasi kebutuhan jumlah penduduk kian bertambah, sehingga potensi wabah penyakit dapat dihindari.

2. Peningkatan Kualitas Pembangunan Pendidikan

Kebijakan yang dibuat pada sektor pendidikan sepenuhnya bergantung pada basis data yang ada. Jika basis data lemah, maka sulit diharapkan sektor pendidikan dapat maju. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu mengoptimalkan pengelolaan manajemen data pendidikan sehingga menghasilkan data dan informasi pendidikan yang baik, benar dan dapat

dipertanggungjawabkan. Dalam menghadapi tantangan ke depan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu memperhatikan akses dan sarana pendidikan yang berkualitas serta mampu menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Selain itu meskipun saat ini kewenangan pelayanan pendidikan jenjang menengah atas (SMA) berada di Provinsi, namun tetap perlu ditingkatkan koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat agar pelayanan jenjang sekolah menengah dan kejuruan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan kerja dengan bidang yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Sumedang. Lebih lanjut, dengan banyaknya perguruan tinggi negeri yang berstandar internasional menjadikan Kabupaten Sumedang memiliki keunggulan kompetitif yang perlu dijadikan pendorong dalam meningkatkan kemajuan pembangunan di segala bidang. Dalam hal ini perlu upaya peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi di Kabupaten Sumedang untuk membantu pemecahan persoalan-persoalan pembangunan di Kabupaten Sumedang dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Publik

Infrastruktur memegang peranan penting dalam menunjang roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Dalam sistem pelayanan masyarakat keberadaan infrastruktur yang memadai dan penataan ruang yang baik sangat diperlukan. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan. Namun demikian, keberadaan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sumedang secara umum belum maksimal sehingga belum meratanya aksesibilitas masyarakat dalam penggunaan infrastruktur yang baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu mengoptimalkan pengelolaan manajemen sektor infrastruktur publik dan penataan ruang sehingga menghasilkan produk infrastruktur yang layak dan dapat diakses oleh masyarakat secara lebih baik.

4. Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengurangan Ketimpangan Ekonomi

Pembangunan daerah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi harus dilakukan melalui prinsip pengembangan ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep *pro poor, pro job, pro growth*, dan *pro environment* dengan memperhatikan *community empowerment*. Sebagai upaya dalam meningkatkan serapan tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan serta menciptakan kemandirian masyarakat, idealnya adalah dengan cara mendorong masyarakat untuk berwiraswasta, memanfaatkan potensi usaha mikro dan menengah yang berkembang di masyarakat, serta memanfaatkan peluang berkembangnya sektor industri dan pariwisata. Namun demikian kondisi sarana prasarana yang mampu mendukung perkembangan usaha perekonomian di berbagai bidang pembangunan masih perlu ditingkatkan seperti keberadaan koperasi, pasar, pengembangan sektor pertanian, perikanan, agribisnis dan sebagainya. Dalam perspektif ke depan, strategi yang perlu diutamakan adalah meningkatkan penggunaan teknologi pertanian serta meningkatkan pangsa pasar dengan cara mengembangkan produk, sehingga perlu upaya mendorong berkembangnya industri

pengolahan hasil pertanian sehingga dapat memberikan *value added* pada komoditas pertanian di wilayah Kabupaten Sumedang.

5. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural dan etika birokrasi. Terdapat 3 elemen utama yang melekat pada reformasi birokrasi yaitu, *pertama* reformasi keuangan daerah yang berfokus pada mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas, hal ini menuntun pada penyempurnaan proses kerja pemerintahan dalam hal penetapan tenggang waktu, indikator serta target yang tepat. *Kedua*, reformasi sumber daya aparatur daerah, yakni berkaitan dengan kualitas implementasi dari sebuah program kerja dan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumberdaya manusia. *Ketiga*, reformasi pelayanan publik yakni kondisi pelayanan yang baik sebagai hasil dari reformasi keuangan dan sumberdaya aparatur. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan kerjasama yang sangat terorganisir dan efektif antar komponen internal Pemerintah Kabupaten Sumedang beserta komponen *stakeholder* eksternal. Selain itu, upaya penguatan mutu aparatur daerah harus terus dilakukan, sehingga dapat terbentuk aparatur yang profesional melayani masyarakat. Melalui tata kelola pemerintahan yang tepat (ketepatan anggaran, profil anggaran yang tepat, konfigurasi struktur birokrasi yang tepat) maka pelayanan yang ideal kepada masyarakat di Kabupaten Sumedang dapat diwujudkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang diinginkan.

6. Peningkatan Antisipasi Bencana

Berdasarkan publikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kabupaten Sumedang termasuk wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana kategori tinggi. Dapat dipetakan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang memiliki potensi bencana alam antara lain potensi gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting beliung dan potensi gempa bumi. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu melakukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana, dengan mengefektifkan berbagai upaya perbaikan sistem sungai dan saluran, tidak memberikan izin IMB pada daerah rawan bencana dan pengembangan sistem informasi untuk peringatan dini, serta kesiapsiagaan masyarakat.

7. Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman

Pelayanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman termasuk urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah. Berbagai upaya dilakukan dalam peningkatan kualitas perumahan dan permukiman meliputi penanganan kawasan permukiman kumuh, peningkatan rasio rumah layak huni, serta peningkatan akses listrik dan sarana air bersih bagi rumah tangga yang belum memiliki listrik dan akses air bersih. Namun kondisi tersebut masih perlu ditingkatkan seiring dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat. Selain itu keberadaan data dan informasi terkait perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Sumedang masih sangat terbatas, sementara itu pembuatan kebijakan pembangunan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman memerlukan basis data yang akurat sebagai payung pertanggungjawaban kinerja dari suatu kebijakan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu mengoptimalkan pengelolaan manajemen data sektor

perumahan rakyat dan kawasan permukiman sehingga menghasilkan data dan informasi yang baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata Daerah

Sektor kebudayaan dan pariwisata harus dipandang sebagai sektor yang berfungsi menjadi katalisator pembangunan (*agent of development*) yang berkontribusi terhadap proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas. Adanya megaproyek (pembangunan Tol Cisumdawu, BIJB, serta jalur kereta cepat) menjadikan posisi Kabupaten Sumedang sangat strategis, sehingga sektor kebudayaan dan pariwisata perlu dikembangkan. Adapun kondisi sektor kebudayaan dan pariwisata saat ini belum mampu secara optimal dalam memberikan nilai tambah ekonomi kepada masyarakat. Dalam perspektif ke depan sektor pariwisata perlu diarahkan untuk pengembangan agrowisata, wisata budaya, wisata alam, dan wisata kuliner yang bertemakan pariwisata halal. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan penataan infrastruktur, penyiapan SDM kreatif, mengundang investor untuk berinvestasi dan promosi terkait pariwisata. Hal ini perlu mendapat dukungan baik secara politis maupun teknokratis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Sumedang 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SUMEDANG SIMPATI) pada Tahun 2023”.

2.1.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana prasarana dan system yang mendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi, misi dan isu strategis yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya ditetapkan tujuan dan sasaran setiap misi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Secara umum keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat dalam matrik hubungan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Pembangunan Kabupaten Sumedang

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SUMEDANG SIMPATI) Pada Tahun 2023				
Misi	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Jumlah kematian ibu 2. Jumlah kematian bayi 3. Persentase balita stunting 4. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan 5. IKM Rumah Sakit
	Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	(1) Rata-rata lama sekolah. (2) Angka harapan lama sekolah.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata	6. APK SD
				7. APK SMP
				8. APM SD
				9. APM SMP
				10. APK PAUD
	Terwujudnya penanggulangan PMKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	(1) Persentase penduduk miskin. (2) Indeks Pembangunan Gender. (3) Indeks Pemberdayaan Gender.	Meningkatnya kualitas penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial	11. APK Kesetaraan
				12. Persentase PMKS
				13. Persentase perempuan kepala keluarga yang meningkat ekonomi keluarganya
			Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	14. Persentase perlindungan perempuan dan anak
				15. Kabupaten Layak Anak
				16. Persentase perempuan kepala keluarga yang meningkat ekonomi keluarganya
Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama	17. Indeks kerukunan umat beragama
			Menguatnya pendidikan karakter berbasis pendekatan	18. Persentase siswa bersertifikat Diniyah

			keagamaan bagi siswa usia pendidikan dasar	
Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang mendukung percepatan pengembangan wilayah ekonomi	(1) Laju pertumbuhan ekonomi. (2) Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten mantap. (3) Rasio jaringan irigas.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	19. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten mantap
				20. Cakupan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
				21. Rasio jaringan irigasi
			Tersedianya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat	22. Cakupan trayek angkutan umum
				23. Peningkatan penumpang angkutan umum
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan agribisnis	Laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian :
				24. Tanaman pangan
				25. Tanaman hortikultura
				26. Perkebunan
				27. Laju pertumbuhan sub sektor peternakan
		28. Laju pertumbuhan sub sektor perikanan		
	Menjamin ketahanan pangan daerah	29. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		
	Meningkatnya pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata	30. Jumlah kunjungan wisatawan		
Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Sumedang	31. Jumlah nilai investasi di Sumedang			
Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan.	(1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan	32. Indeks Kualitas Air (IKA)	
			33. Indeks	

		(2) Indeks Resiko Bencana.	prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Kualitas Udara (IKU)				
				34. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)				
				35. Persentase penanganan sampah				
				36. Persentase pengurangan sampah				
				37. Persentase RTH Terkelola				
				38. Rasio Rumah Layak Huni				
				39. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh				
				40. Persentase rumah tangga berakses air bersih				
				41. Persentase rumah tangga bersanitasi				
				42. Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang				
				Pengurangan indeks risiko bencana	43. Indeks Resiko Bencana			
				Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	(1) Opini BPK. (2) Indeks Reformasi Birokrasi. (3) Nilai SAKIP Kabupaten.	Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	44. Opini BPK
								45. APBD tepat waktu
46. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan sesuai rekomendasi								
47. Persentase temuan penyimpangan terhadap APBD								
Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	48. Indeks Reformasi Birokrasi							
49. Persentase perangkat daerah bidang pemerintahan yang capaian target kinerja tahunannya								

				berkinerja "BAIK"	
				50. Nilai LPPD Kabupaten	
				51. Persentase perangkat daerah yang nilai SAKIP nya berkategori "BAIK"	
				52. Indeks profesionalitas ASN	
				Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara	53. Indeks Sistem Merit ASN
				Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat
	55. Indeks kepuasan masyarakat bidang perizinan				
	Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung IT	56. Nilai SPBE			
	Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang	Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing.	(1) Pengeluaran per kapita. (2) Tingkat pengangguran terbuka. (3) Jumlah UMKM.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan setor perindustrian dan perdagangan yang inklusif	57. Laju pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran
					58. Laju pertumbuhan sub sektor industri pengolahan
59. Cakupan Koperasi Aktif					
Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar				60. Tingkat Pengangguran Terbuka	
				61. Jumlah UMKM	

Sumber : Tabel 5.2 RPJMD

Selanjutnya dari matrik hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran ditentukan "Sasaran Strategis" Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan target-target prioritas bupati serta wakil bupati terpilih pada setiap misi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Sasaran strategis ini akan menjadi dasar dalam penetapan kinerja serta tolok ukur pengukuran kinerja pemerintah daerah untuk setiap tahunnya yang harus dipertanggungjawabkan oleh bupati dan wakil bupati selaku pemangku kebijakan. Sasaran strategis Pemerintah

Daerah Kabupaten Sumedang beserta indikator kinerjanya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2023

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup
		Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	(1) Rata rata Lama Sekolah (2) Angka Harapan Lama Sekolah
		Terwujudnya penanggulangan PMKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	(1) Persentase penduduk miskin (2) Indeks Pembangunan Gender (3) Indeks Pemberdayaan Gender
2	Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama
3	Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	(1) Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap (2) Rasio Jaringan Irigasi
		Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	(1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (2) Indeks Resiko Bencana

4	Menata birokrasi pemerintah yang responsive dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	(1) Opini BPK (2) Indeks reformasi Birokrasi (3) Nilai SAKIP Kabupaten
		Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat
5	Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang	Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Pengeluaran Perkapita
		Menciptakan Wirausahawan dan Tenaga Kerja Kompeten yang Memenuhi Kebutuhan Pasar	(1) Tingkat pengangguran terbuka (2) Jumlah UMKM

Sumber : RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

2.1.4 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Kabupaten Sumedang untuk periode pembangunan 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan dan pendidikan.
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan penanggulangan PMKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi.
5. Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan.
6. Pengembangan wilayah ekonomi pariwisata.
7. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah.
8. Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro dan kecil.
9. Peningkatan pendapatan petani dan buruh tani serta penguatan ketahanan pangan.
10. Peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sumedang.
11. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

2.1.5 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan dan pendidikan.	Meningkatkan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa melalui peningkatan jumlah dan kualitas Pustu serta penyediaan transportasi kesehatan masyarakat.
		Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif.
		Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing.
		Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar dengan upaya pembebasan beban biaya peserta didik.
2.	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan penanggulangan PMKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Meningkatkan ketahanan keluarga serta peran dan perlindungan perempuan dan anak.
		Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan Rumah Besar Penanganan Fakir Miskin/Lansia.
		Meningkatkan pemenuhan air baku dan permukiman yang layak bagi masyarakat miskin.
3.	Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat.	Mewujudkan nilai-nilai agama pada tatanan sosial masyarakat dan pemerintahan dalam perilaku kehidupan.
		Mendorong pengembangan pendidikan karakter.
4.	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi.	Meningkatkan kemantapan jalan sebagai koneksitas dan aksesibilitas aktivitas perekonomian masyarakat.
		Meningkatkan kemantapan sistem perhubungan dan transportasi.
		Meningkatkan fungsi sistem irigasi yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
		Menyediakan tanah untuk kepentingan pembangunan daerah.
5.	Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.
		Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah domestik.
		Meningkatkan kualitas dan penyediaan air

		bersih serta kualitas udara.
		Mengurangi risiko bencana alam dan dampak perubahan iklim.
6.	Pengembangan wilayah ekonomi pariwisata.	Meningkatkan pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal.
		Mengembangkan destinasi pariwisata dan promosi wisata yang tercatat pada kalender tahunan <i>event visit wonderful Indonesia</i> .
7.	Peningkatan kinerja aparatur pemerintah.	Meningkatkan pelayanan administrasi dan perizinan yang prima.
		Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika.
		Menguatkan institusi pemerintahan dan kualitas aparatur yang berorientasi pada reformasi birokrasi.
		Memberikan kepastian karir dan pengembangan Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi dan kinerja.
		Mengembangkan sistem <i>e-government</i> untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
8.	Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro dan kecil.	Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil menengah.
		Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan revitalisasi pasar tradisional.
		Menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat.
9.	Peningkatan pendapatan petani dan buruh tani serta penguatan ketahanan pangan.	Memfasilitasi sarana produksi dan penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta mendukung terwujudnya kawasan agribisnis.
		Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam.
10.	Peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sumedang.	Meningkatkan jumlah penanaman modal yang mendukung pengembangan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.
11.	Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.	Memperluas kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja.
		Membangun Sumedang <i>Preneurship</i> berbasis profesionalitas dan kreativitas melalui Gerakan Wirausaha Muda.
		Mengoptimalkan pengembangan sektor ekonomi kreatif.

Sumber : RPJMD Kab. Sumedang 2018-2023

2.1.6 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2020, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program		
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.		
		2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.		
		3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.		
		4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.		
		5. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, dan Surveilans Epidemiologi.		
		6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.		
		7. Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.		
		8. Program Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan.		
		9. Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD.		
		10. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.		
		11. Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD.		
		12. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.		
		13. Program Pembinaan, Pemasasyarakatan, dan Pengembangan Olahraga.		
Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	- Rata-rata lama sekolah. - Angka harapan lama sekolah.	14. Program Pendidikan Anak Usia Dini.		
		15. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.		
		16. Program Kesetaraan.		
		17. Program Pendidikan Dasar		
Terwujudnya penanggulangan PMKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase penduduk miskin	18. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		
		19. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.		
		20. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.		
	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	
			22. Program Perlindungan Sosial.	
			23. Program Jaminan Sosial.	
		24. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak.		
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	25. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.
				26. Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga.
				27. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.
28. Program Pendidikan Politik Masyarakat.				
Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	29. Program Kelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan		
		30. Program Kewaspadaan Nasional.		
		31. Program Kerukunan Umat Beragama.		
		32. Program Pemeliharaan Ketentraman dan		

		Ketertiban Masyarakat.		
		33. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum.		
		34. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.		
		35. Program Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Diniyah Kabupaten.		
Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	36. Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan.		
		37. Program Pelayanan Bidang Perhubungan, Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Lalu-Lintas Angkutan Jalan.		
		38. Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah.		
		39. Program Peningkatan Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal.		
		40. Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan PTSP.		
		41. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.		
		42. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.		
		43. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan.		
		44. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.		
		45. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.		
		46. Program Peningkatan Produksi Perikanan.		
		47. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan.		
		48. Program Kesehatan Lingkungan Ikan dan Konservasi.		
		49. Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Hewan.		
		50. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner.		
		51. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.		
		52. Program Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.		
		53. Program Peningkatan Sarana Hubungan Industrial.		
		54. Program Pengembangan Sentra –Sentra Industri Potensial.		
		55. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.		
		56. Program Pengembangan Kepariwisataaan.		
		57. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.		
		58. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.		
		59. Program Pengendalian Banjir		
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten mantap	60. Program Penanganan Jalan dan Jembatan.
			Rasio jaringan irigasi	61. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan.
		Terwujudnya wilayah ekonomi yang	Indeks kualitas lingkungan hidup	62. Program Penataan Ruang.
				63. Program Pembinaan Jasa Konstruksi.
				64. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

berkelanjutan		65. Program Pengembangan dan Penataan Wilayah.	
		66. Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
		67. Program Penyediaan Sarana dan Pengelolaan Limbah Domestik.	
		68. Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan.	
		69. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.	
		70. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.	
		71. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.	
		72. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	
		73. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.	
		74. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.	
	Indeks Risiko Bencana	75. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.	
		76. Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	77. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
			78. Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
79. Program Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Sekretariat Daerah.			
80. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan.			
Nilai SAKIP Kabupaten		81. Program Pengendalian Pembangunan Daerah.	
		82. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.	
		83. Program Pengamanan Berita, Persandian, dan Radiogram.	
		84. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	
		85. Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah.	
		86. Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Ekonomi dan SDA.	
		87. Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Pemerintahan dan Sosial.	
		88. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.	
		89. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.	
		90. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.	
		91. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa.	
		92. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.	
		93. Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah.	
Indeks Reformasi Birokrasi		94. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.	
		95. Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	

		96. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
		97. Program Penegakan Integritas.
		98. Program Administrasi Pemerintahan dan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah.
		99. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
		100. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur.
		101. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen Aparatur.
		102. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	103. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan.
		104. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan.
		105. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
		106. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
		107. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
		108. Program Transmigrasi Lokal
		109. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
		110. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
		111. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
		112. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.
Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Pengeluaran per kapita	113. Program Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi.
		114. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Koperasi.
		115. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat.
		116. Program Pemberdayaan, Penataan, dan Perlindungan Pasar Rakyat.
		117. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
		118. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
		119. Program Ketahanan Keluarga.
		120. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan dasar	Tingkat pengangguran terbuka	121. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
		122. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
	Jumlah UMKM	123. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
		124. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
		125. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Sumber : RPJMD Kab. Sumedang 2018-2023

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas

kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,44
Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,48
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,44
Terwujudnya penanggulangan MPKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,16
	Indeks Pembangunan Gender	Poin	95,34
	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	69,77
Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	73
Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,01
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	70,8
	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	64
Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,18
	Indeks Risiko Bencana	Poin	150
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	Opini	WTP
	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	BB
	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	70
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	83
Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Pengeluaran Per-Kapita	Rp. (Juta)	10,38
Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,35
	Jumlah UMKM	UMKM	17.467

Sumber : Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2020

Adapun perbandingan antara target kinerja dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan *baseline* dan target akhir RPJMD, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Dengan Data Awal 2018 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal (2018)	Target 2020	Target Akhir RPJMD
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,07	72,44	73,00
2.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,10	8,48	9,07
3.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,00	13,44	14,11
4.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,76	8,16	5,76
5.	Indeks Pembangunan Gender	Poin	94,4	95,34	96,75
6.	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	68,7	69,77	71,37
7.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	72,2	73	74,5
8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,48	7,01	7,88
9.	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	62,8	70,8	82,8
10.	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	60	64	70
11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,68	59,18	60,11
12.	Indeks Risiko Bencana	Poin	162	150	135
13.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
14.	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	B	BB	A
15.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	56,05	70	85
16.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80,74	83	90
17.	Pengeluaran Per-Kapita	Rp. (Juta)	9,67	10,38	11,35
18.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,04	6,35	5,68
19.	Jumlah UMKM	UMKM	15,467	17.467	20.467

Sumber : RPJMD Kab. Sumedang 2018-2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Kabupaten Sumedang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai

peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Rata-rata persentase realisasi kinerja Kabupaten Sumedang tahun 2020 sebesar 91,20% (Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI). Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja	Sumber Data
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,44	72,43	99,99%	Sangat Tinggi	BPS
Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,48	8,51	100,35 %	Sangat Tinggi	BPS
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,44	12,97	96,50%	Sangat Tinggi	BPS
Terwujudnya penanggulangan MPKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,16	10,26	74,27%	Sedang	BPS
	Indeks Pembangunan Gender	Poin	95,34	95,18	99,83%	Sangat Tinggi	BPS
	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	69,77	70,94	101,67 %	Sangat Tinggi	BPS
Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	73	72,2	98,93%	Sangat Tinggi	Kesbang pol
Terwujudnya	Laju	Persen	7,01	-1,12	-15,98%	Sangat	BPS

percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi						Rendah	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	70,8	76,96	108,70 %		Sangat Tinggi	DPUPR
	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	64	64,46	100,72 %		Sangat Tinggi	DPUPR
Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,18	70,89	119,79 %		Sangat Tinggi	DLHK
	Indeks Risiko Bencana	Poin	150	142,2	105,20 %		Sangat Tinggi	BPBD
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%		Sangat Tinggi	BPKAD
	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	BB	B	96,07%		Sangat Tinggi	Bagian Organisasi
	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	70	60,01	85,73%		Tinggi	Bagian Organisasi
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	83	83,80	100,98 %		Sangat Tinggi	Bagian Organisasi
Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Pengeluaran Per-Kapita	Rp. (Juta)	10,38	10,22	98,46%		Sangat Tinggi	BPS
Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,35	9,89	44,25%		Sangat Rendah	BPS
	Jumlah UMKM	UMKM	17.467	20.507	117,40 %		Sangat Tinggi	DKPP
Rata-rata					91,20%		Sangat Tinggi	

3.1.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Adapun analisis capaian kinerja dari setiap indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

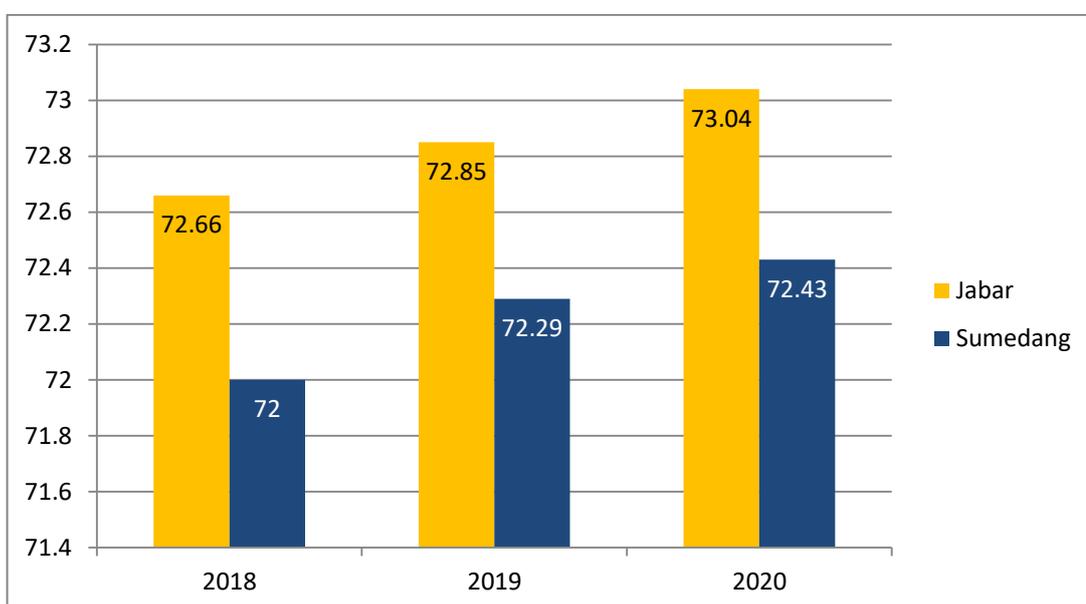
a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi

kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Target kinerja “Angka Harapan Hidup” tahun 2020 sebesar 72,44 tahun dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar **72,43 tahun** atau capaian kinerja sebesar **98,90% (kinerja sangat tinggi)**. Target kinerja tidak tercapai. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sumedang memperlihatkan tren meningkat dari tahun 2018 sampai 2020, walaupun selalu berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Dibandingkan dengan tahun 2019, AHH tahun 2020 meningkat sebesar 0,14 tahun atau 0,19%.

Grafik 3.1
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sumedang
Dengan Provinsi Jawa Barat



Sumber : Bapppeda, 2021.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu pada tahun 2020 jumlah kematian ibu sebanyak 21 ibu, hal ini meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan jumlah kematian bayi tahun 2019 sebanyak 13 ibu. Jumlah kematian bayi pada tahun 2020 sebanyak 137 bayi, jumlah kematian bayi juga terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 134 bayi. Peningkatan jumlah kematian ibu dan bayi tentu akan berpengaruh terhadap angka harapan hidup. Banyak faktor yang menjadi penyebab meningkatnya jumlah kematian ibu dan bayi di kabupaten Sumedang tahun 2020 dibanding tahun 2019, diantaranya jumlah ibu yang melahirkan juga terjadi peningkatan dari 18.781 pada tahun 2019 menjadi 19.060 Pada tahun 2020. Sedangkan untuk jumlah bayi juga ada peningkatan dari 18.813 bayi pada tahun 2019 menjadi 19.060 bayi pada tahun 2020. Selain karena peningkatan jumlah ibu melahirkan dan jumlah bayi, peningkatan kematian ibu dan bayi pada tahun 2020 juga disebabkan karena adanya penurunan jumlah pemeriksaan ibu hamil, jumlah pemeriksaan bayi karena pada awal pandemi covid-19 terjadi pembatasan kontak antara pasien dengan tenaga kesehatan.

Faktor penyebab lain terjadinya peningkatan jumlah kematian ibu dan bayi juga disebabkan karena sempat terjadi kendala pada proses rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas dan klinik) ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (Rumah Sakit), karena adanya pembatasan jenis dan jumlah pelayanan untuk mencegah peningkatan jumlah kasus covid-19.

Terjadinya pandemi covid-19 juga berpengaruh terhadap tingkat sosio-ekonomi masyarakat dimana banyak terjadinya penurunan pendapatan dan pemutusan hubungan kerja. Hal itu juga berpengaruh terhadap kondisi psikososial yang pada akhirnya berpengaruh pada angka harapan hidup.

Solusi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup, diantaranya yaitu :

- 1) Meningkatkan promosi perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat dan menciptakan lingkungan sehat.
Perilaku memiliki pengaruh yang besar terhadap derajat kesehatan. Promosi kesehatan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat masih perlu terus menerus ditingkatkan. Peningkatan kualitas PHBS di masyarakat akan memberikan kontribusi terhadap derajat kesehatan masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan AHH.
- 2) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Saat ini memasuki era digitalisasi. Terjadinya pandemi covid-19 memberikan kesadaran kepada kita semua akan pentingnya pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Digitalisasi pelayanan kesehatan menjadi keharusan. Terjadinya pandemi covid-19 yang menuntut kita untuk mengurangi interaksi langsung, dapat difasilitasi melalui TIK. Pelayanan kesehatan di saat pandemi covid-19 tetap bisa dilaksanakan melalui digitalisasi pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)
- 3) Meningkatkan koordinasi lintas sektor.
Pembangunan kesehatan tidak hanya melibatkan OPD yang menangani masalah kesehatan saja. Banyak pihak lain yang terlibat jika menginginkan tujuan tercapai secara optimal, misalnya melibatkan Dinas Pekerjaan Umum untuk infrastruktur, melibatkan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan untuk angkutan umum, dan pihak lainnya. Dalam merumuskan indikator RPJMD, harus bersifat menyeluruh dan memperhatikan keterkaitan satu sama lain.

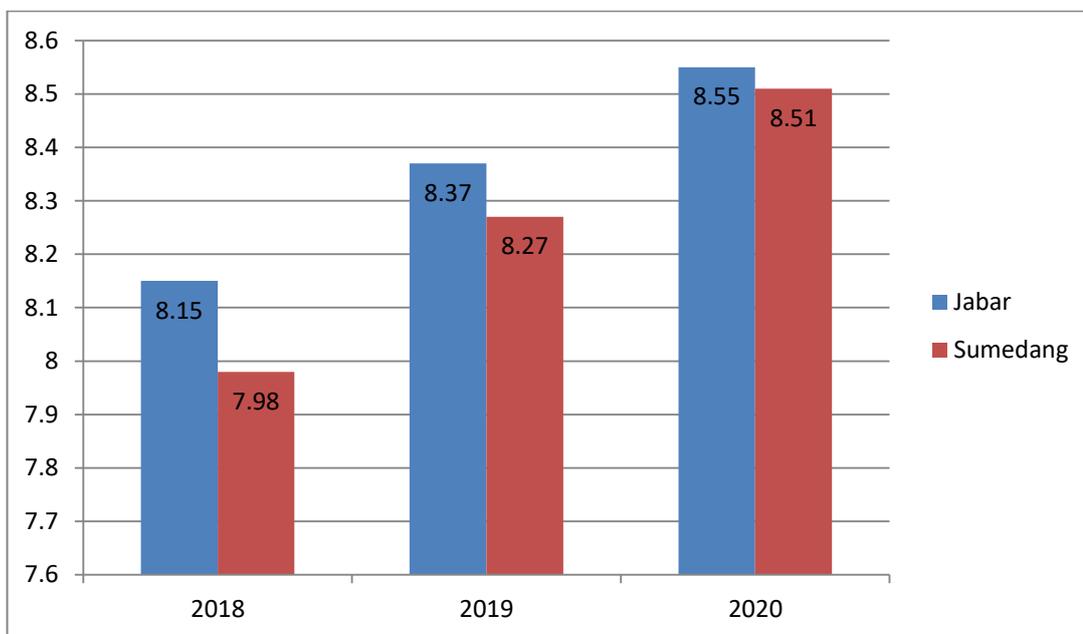
b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Target kinerja "Rata-Rata Lama Sekolah" tahun 2020 sebesar 8,48 tahun dan realisasinya berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sumedang sebesar **8,51 tahun** atau capaian kinerja sebesar **100,35% (kinerja sangat tinggi)**. Target kinerja tercapai melebihi target.

Realisasi rata-rata lama sekolah meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 sebesar 8,27 tahun sehingga pada tahun 2020 terdapat peningkatan 0,24 tahun atau sekitar 2,9%. Capaian RLS Kabupaten Sumedang menunjukkan tren meningkat dari tahun 2018 sampai 2020 dan semakin mendekati rata-rata capaian Provinsi Jawa Barat.

Grafik 3.2
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sumedang
Dengan Provinsi Jawa Barat



Sumber : Bapppeda, 2021

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah adalah dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, serta meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.

Pada Tahun 2020, Persentase Siswa Paud Untuk Melanjutkan Kejenjang SD/MI dengan sebesar 100%. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tercapai 96,42%. Rata-rata Angka Partisipasi Kasar Paket A, B, dan C mencapai 78,61%. Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs capaiannya sebesar 92,38% dan SMP ke SMA/SMK/MA capaiannya sebesar 128%. Angka Angka Putus Sekolah (APS) SD dan SMP masing-masing mencapai 200%. Persentase sekolah pendidikan dasar dengan kondisi bangunan baik capaiannya sebesar 128%. Kemudian, Cakupan Pelayanan Pendidikan capaian kinerjanya sebesar 99,00%

c. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

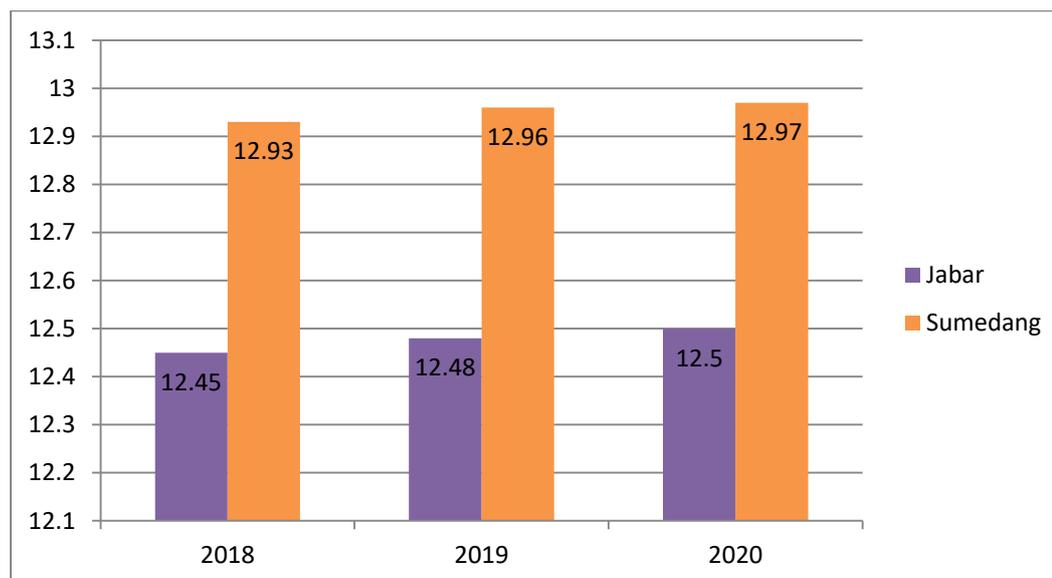
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Target kinerja "Angka Harapan Lama Sekolah" tahun 2020 sebesar 13,44 tahun dan realisasinya berdasarkan data dari BPS Kabupaten

Sumedang sebesar **12,97 tahun** atau capaian kinerja sebesar **96,50% (kinerja sangat tinggi)**. Target kinerja tidak tercapai.

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Sumedang meningkat dari tahun sebelumnya, walaupun tidak signifikan. Angka HLS tahun 2019 sebesar 12,96 tahun dan pada tahun 2020 sebesar 12,97 tahun. Dari tahun 2018 sampai 2020, HLS Kabupaten Sumedang selalu lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Grafik 3.3
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat



Sumber : Bappppeda, 2021

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena faktor kemiskinan yang masih tinggi dan faktor jarak antara rumah dengan sekolah. Tingkat kemiskinan tahun 2020 meningkat sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dan jauhnya jarak antara sekolah dan rumah menandakan fasilitas pendidikan belum merata di seluruh wilayah. Solusinya adalah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemertaan sarana prasarana pendidikan terutama pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA.

Pada Tahun 2020, Persentase Siswa Paud Untuk Melanjutkan Kejenjang SD/MI dengan sebesar 100%. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tercapai 96,42%. Rata-rata Angka Partisipasi Kasar Paket A, B, dan C mencapai 78,61%. Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs capaiannya sebesar 92,38% dan SMP ke SMA/SMK/MA capaiannya sebesar 128%. Angka Angka Putus Sekolah (APS) SD dan SMP masing-masing mencapai 200%. Persentase sekolah pendidikan dasar dengan kondisi bangunan baik capaiannya sebesar 128%. Kemudian, Cakupan Pelayanan Pendidikan capaian kinerjanya sebesar 99,00%

d. Persentase Penduduk Miskin

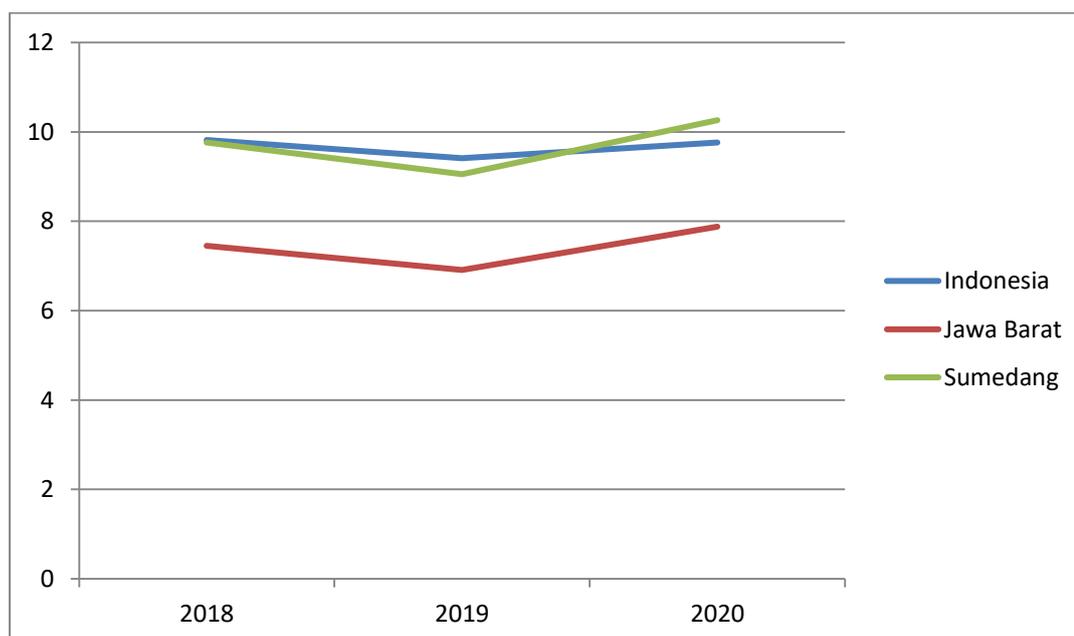
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal

kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor, dan kebutuhan pokok lainnya). Karena data pendapatan tidak tersedia maka dipakai pendekatan data konsumsi/pengeluaran. Termasuk pengeluaran adalah perkiraan barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain.

Target kinerja “Persentase Penduduk Miskin” tahun 2020 sebesar 8,16% dan realisasinya berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sumedang sebesar **10,26%** atau capaian kinerja sebesar **74,27% (kinerja sedang)**. Target kinerja tidak tercapai.

Kemiskinan di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan yang progresif dari 2018 ke 2019 sebesar 0,7%. Namun, akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2020 kemiskinan secara nasional dan regional kembali meningkat. Peningkatan yang dialami Kabupaten Sumedang memang melebihi rata-rata peningkatan di Provinsi Jawa Barat, namun dilihat dari pertumbuhan tingkat kemiskinan masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Tingkat pertumbuhan kemiskinan Jawa Barat tahun 2019-2020 sebesar 14,04% sedangkan Kabupaten Sumedang sebesar 13,37%.

Grafik 3.4
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang
Dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia



Sumber : Bapppeda, 2021

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang berakibat melemahnya perekonomian sehingga menambah jumlah penduduk miskin di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumedang. Peningkatnya penduduk miskin saat pandemi dikarenakan adanya penurunan pendapatan, penurunan kegiatan ekonomi, dan meningkatnya angka pengangguran. Penurunan pendapatan dikarenakan adanya kebijakan pengurangan jam kerja, dan penurunan daya beli konsumen. Penurunan kegiatan ekonomi atau usaha bangkrut disebabkan oleh penurunan permintaan pasar, kesulitan bahan baku, dan

meningkatnya ongkos produksi. Kemudian, adanya peningkatan angka pengangguran disebabkan oleh hilangnya pekerjaan buruh migran, tenaga kerja baru tidak terserap pasar kerja, dan terjadinya PHK.

Kebijakan dalam penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang terdiri dari empat program utama, yaitu :

- 1) Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga (Sekolah gratis/BOS, Paket B dan C, JKN/Jamkesda/PBI, Jampersal, Rehab Rutilahu, PKH dan BNPT, Pamsimas, Rantang Simpati, Pelayanan Adminduk, PSC 119, Rumah Besar Simpati, Puskesmas, SSQR, Jumat Berkah, Serbu Desa, Tawadu (Tab Siswa Dhuafa), Bansos Covid-19).
- 2) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Padat Karya, KRPL, KUBE, UEP, UPPKS, Pemberdayaan Buruh Tani, Pemberdayaan Kelompok Ternak dan Ikan).
- 3) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (Kredit KUSUMA, Pengembangan desa produktif/OVOP, Koperasi Syariah, Bantuan Saprass UMKM, Pelatihan Tenaga Kerja, Warung Pintar, Fasilitasi PIRT, Pembentukan Gerai Produk UMKM, Pujamari).
- 4) Program Peningkatan Kegiatan Ekonomi (Magang Jepang, Transmigrasi, Peningkatan Infrastruktur Strategis, Pembangunan kawasan Wisata, KEK Jatigede, Kalender Event Wisata, Pemanfaatan dana CSR dan PKBL, Digital Marketing (e-Commerce), Penguatan BUMDes, Peningkatan investasi melalui penyerapan tenaga kerja lokal).

e. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

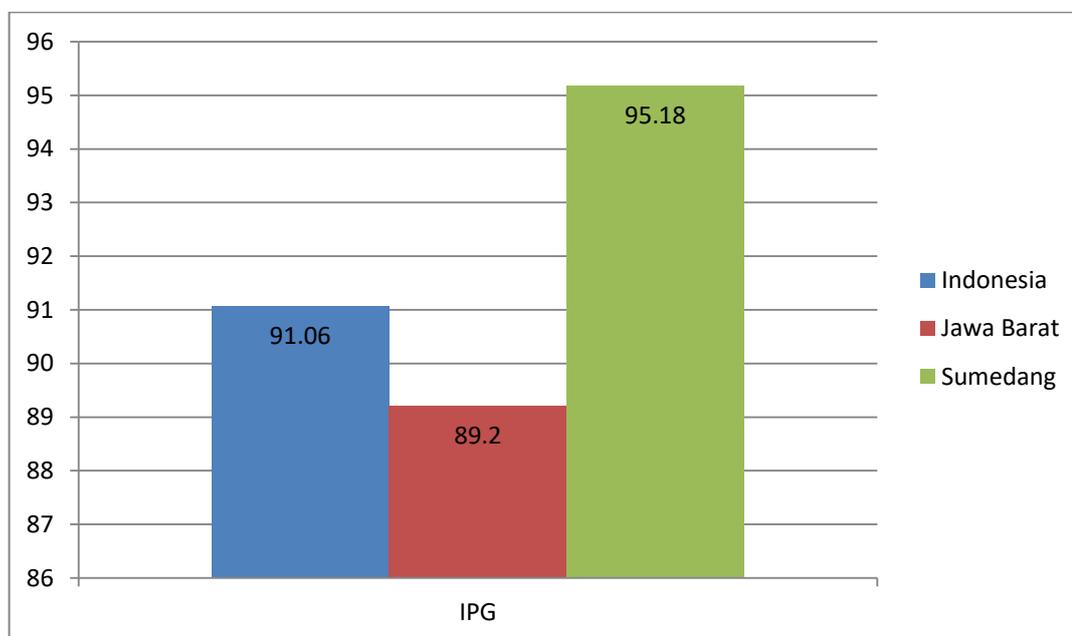
Setiap tahun selalu ada selisih antara angka IPM dan IPG yang menandakan bahwa masih adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, dimana angka $IPG < IPM$. Kesetaraan gender terjadi apabila angka IPG sama dengan IPM. Apabila angka IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender. Kesenjangan gender dapat dilihat dari selisih antara IPM dan IPG. Semakin kecil selisih antara IPM dan IPG maka dapat diartikan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan juga semakin kecil.

Target kinerja “Indeks Pembangunan Gender” tahun 2020 sebesar 95,34 poin dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar **95,18 poin** atau capaian kinerja sebesar **99,83% (kinerja sangat tinggi)**. Target kinerja tidak tercapai.

Meskipun demikian, Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sumedang menjadi yang tertinggi di Jawa Barat sehingga mencerminkan pembangunan antara pria dan wanita di Sumedang sudah lebih merata dan mampu lebih baik dari wilayah kota. Perempuan di Kabupaten Sumedang

sudah cukup dominan dalam harapan lama sekolah sehingga diharapkan kaum perempuan di masa mendatang dapat melahirkan generasi yang tangguh dan berkualitas.

Grafik 3.5
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020



Sumber : Bappppeda, 2021

IPG mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan perbaikan kesetaraan gender dalam indikator pembentuk IPM. Hal ini ditunjang oleh program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 yaitu Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak yang terdiri dari Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak yang dituangkan dalam pelatihan GAP/GBS bagi pendata APE seluruh Dinas/Badan/Kantor, 26 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 22 desa, serta kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak dengan menghasilkan tiga dokumen tentang gender dan anak.

f. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

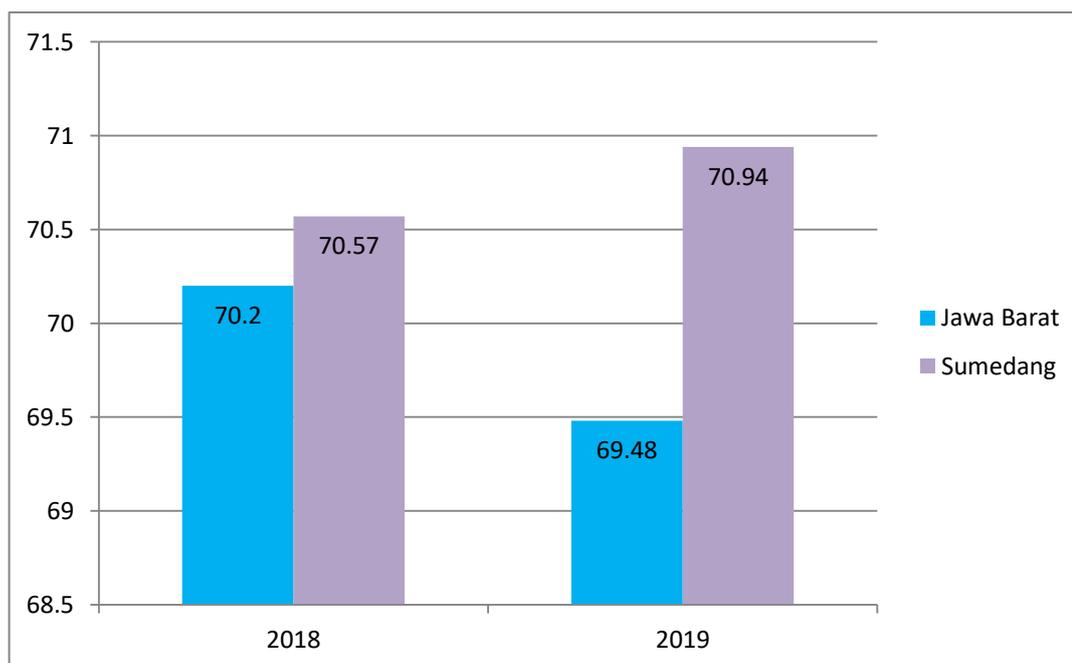
Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG merupakan indeks komposit yang menunjukkan seberapa besar peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menekankan pada partisipasi perempuan yang mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. IDG menggambarkan peranan perempuan dalam bidang ekonomi dan diukur berdasarkan kesetaraan dalam partisipasi politik.

Target kinerja “Indeks Pemberdayaan Gender” tahun 2020 sebesar 69.77 poin dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar **70.57 poin** atau capaian kinerja sebesar **101,15% (kinerja sangat tinggi)**. Capaian kinerja telah melebihi target. Realisasi IDG tahun 2020 masih

menggunakan capaian tahun 2019, karena sampai dengan laporan ini dibuat, BPS belum merilis IDG tahun 2020. Apabila dilihat berdasarkan data tahun 2018 dan 2019, IDG Kabupaten Sumedang selalu mengalami peningkatan dan berada di atas rata-rata Jawa Barat. Dengan asumsi tren tahun 2018 dan 2019 maka IDG tahun 2020 diprediksi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 dan berada di atas rata-rata Jawa Barat.

Kabupaten Sumedang berada pada kuadran TERBAIK dalam pembangunan dan pemberdayaan gender berdama 6 kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, yaitu Kota Cirebon, Kota Bandung, Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Pangandaran. Dimana capaian IPG dan IDG berada di atas rata-rata Jawa Barat. IDG Kabupaten Sumedang meskipun sudah berada di atas rata-rata Jawa Barat, namun masih dapat dipacu dengan peningkatan kompetensi perempuan menjadi tenaga profesional dan memberikan sumbangan lebih besar pada pendapatan rumah tangga. Misalnya melalui peningkatan literasi dan interaksi digital.

Grafik 3.6
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sumedang
Dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2019



Sumber : Bappppeda, 2020.

Dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan gender, pengarusutamaan gender pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 dituangkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Bersumber dari APBD Kabupaten Sumedang
 - a. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dituangkan dalam kegiatan pembinaan organisasi perempuan (GOW) sebesar RP. 111.275.000,-

- b. Program ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga dituangkan dalam kegiatan :
 - 1) Pembinaan P2WKSS (Rp. 85.985.200,-) untuk 1 desa.
 - 2) Peningkatan peran perempuan dalam membangun keluarga sejahtera (Rp. 102.307.500) dengan jumlah perempuan yang dibina sebanyak 90 orang.
 - 3) Pemberdayaan perempuan dalam keluarga (Rp. 105.734.650) dengan jumlah perempuan yang dibina sebanyak 300 orang, alokasi dana untuk IIAD (Ikatan Istri Anggota Dewan)
 - 4) Pemberdayaan perempuan dalam organisasi (Rp. 132.181.700) dengan jumlah perempuan yang dibina sebanyak 200 orang, alokasi dana untuk DWP (Dharma Wanita Persatuan).
2. Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dari DP3AKB Provinsi Jawa Barat program peningkatan ekonomi perempuan dituangkan dalam kegiatan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) dengan jumlah kelompok sebanyak 20 kelompok, jumlah anggota 417 orang, bansos Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.127.500.000,- dengan dana bergulir sampai saat ini sebesar Rp. 302.631.000,-

g. Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks KUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) dibentuk dari tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktifbergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi ketiga indikator tadi antara lain adalah; Pendidikan keluarga, implementasi kearifan lokal, pendapatan, heteronitas agama dan peran kementerian agama.

Target kinerja “Indeks Kerukunan Umat Beragama” tahun 2020 sebesar 73 poin dan realisasinya adalah berdasarkan proyeksi nilai tahun sebelumnya yaitu sebesar **72,2 poin** atau capaian kinerja sebesar **98,93% (kinerja sangat tinggi)**. Karena pada tahun 2020 tidak dilaksanakan survei dikarenakan anggaran untuk survei terhapus dikarenakan adanya refocusing anggaran. Pada tahun 2019 indeks KUB Kabupaten Sumedang sebesar 72,2 poin, hal ini lebih besar dari indeks KUB Provinsi Jawa Barat yaitu 68,5 poin, namun lebih rendah dari rata-rata indeks KUB nasional sebesar 73,83 poin.

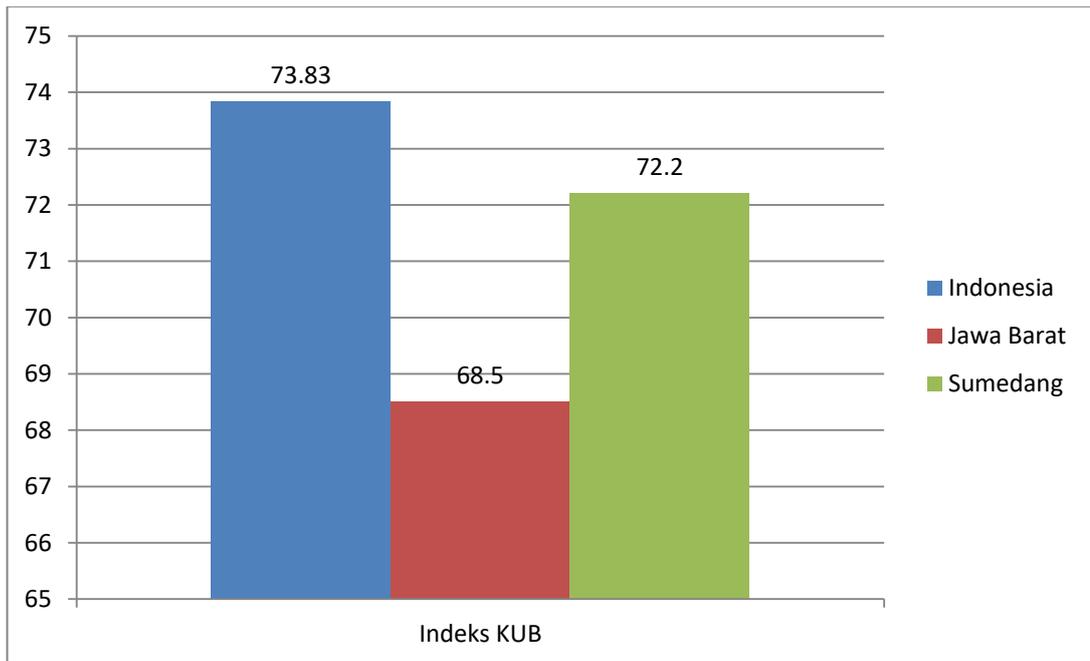
Kegiatan atau upaya yang telah dilaksanakan oleh FKUB dalam rangka meningkatkan kerukunan antar umat beragama yaitu :

- 1) Diskusi bersama tokoh agama tentang persiapan pembangunan kantor/sekretariat FKUB Kabupaten Sumedang.
- 2) Woskshop FKUB dengan tema “Peran Tokoh Agama dan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan COVID-19”.
- 3) Pendataan jumlah penduduk pemeluk agama dan pendataan tempat ibadah.
- 4) Potensi konflik antar atau antara umat beragama dapat diatasi secara kekeluargaan yang didahului dengan menjaga sebelum konflik secara

bersama-sama seluruh elemen masyarakat baik tokoh agama, MUI, Ormas Agama, Kesbangpol, Kemenag, dan unsur forkopimda.

- 5) Pelaksanaan kegiatan hari besar keagamaan dilaksanakan sengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan FKUB yang difasilitasi oleh unsur Polres.

Grafik 3.7
Perbandingan Indeks KUB Kabupaten Sumedang
Dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019



Sumber : Bapppeda, 2020.

h. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

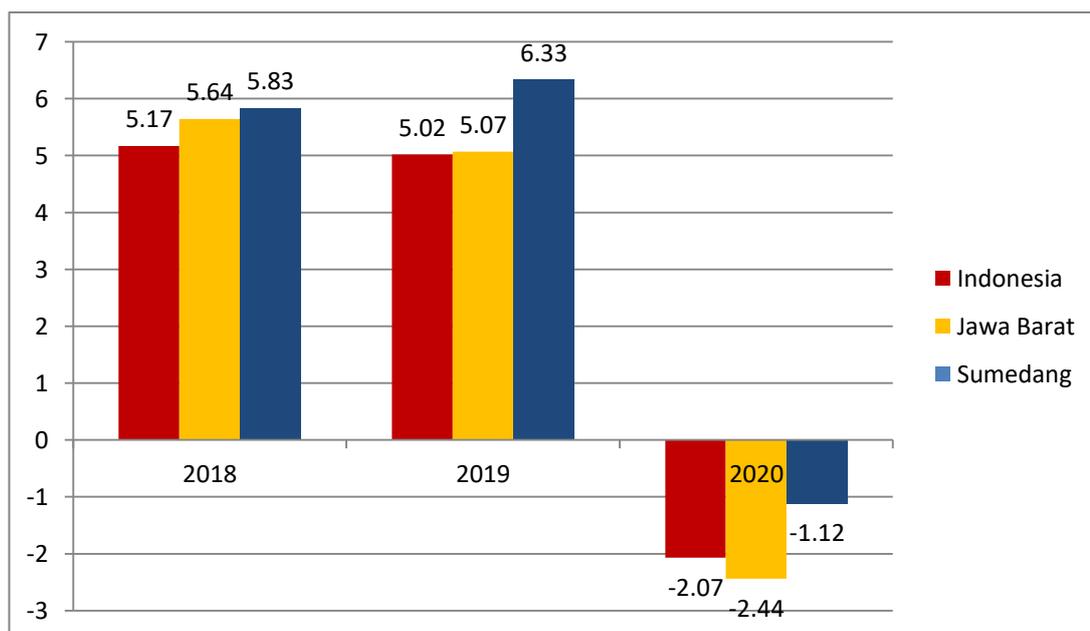
Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase. Ukuran ini tidak menyesuaikan inflasi, namun dinyatakan dalam istilah nominal. Dalam praktiknya, ini adalah pengukuran tingkat perubahan yang dialami Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu kabupaten/kota dari satu tahun ke tahun lainnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan pendapatan suatu kabupaten/kota atau ekonomi yang lebih besar, selama periode waktu tertentu. Umumnya, ini diperiksa setiap triwulan, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diamati dalam rentang waktu yang lebih besar, seperti tahun ke tahun (YoY), atau dekade ke dekade.

Tingkat pertumbuhan ekonomi memberikan wawasan tentang arah umum dan besarnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sementara pertumbuhan ekonomi paling sering diasumsikan mengacu pada gerakan positif, perubahan ekonomi bisa positif atau negatif. Jika suatu ekonomi mengalami dua kuartal berturut-turut dengan penurunan tingkat pertumbuhan, dapat dikatakan bahwa ekonomi yang terkait jatuh ke dalam resesi. Jika ekonomi mulai menyusut, tingkat persentase dapat dinyatakan sebagai negatif untuk menunjukkan pendapatan yang hilang selama periode

waktu yang diperiksa. Laju pertumbuhan ekonomi riil adalah laju perubahan/pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto suatu kabupaten/kota dari satu tahun ke tahun lainnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu.

Target kinerja “Laju Pertumbuhan Ekonomi” tahun 2020 sebesar 7,01% dan realisasinya **-1,12%** atau capaian kinerja sebesar **-15,98% (kinerja sangat rendah)**. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah bahwa pandemi COVID-19 secara nyata telah mengganggu aktivitas perekonomian seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Sumedang di dalamnya. Selama pandemi, dunia usaha mengalami gangguan yang signifikan baik dalam proses produksi, distribusi dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian yang berdampak pada menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Walaupun demikian Pertumbuhan ekonomi Sumedang mampu berakselerasi lebih cepat dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Grafik 3.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang
Dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia



Sumber : Bapppeda, 2021

Adapun desain pemulihan ekonomi kabupaten tahun 2020 adalah melalui :

- Peningkatan akses infrastruktur ke tempat wisata.
- Pemberdayaan PMKS melalui usaha ekonomi produktif (KUBE).
- Peningkatan sarana prasarana koperasi.
- Penyediaan sarana prasarana protokol kesehatan di UPTD Pasar.
- Penataan dan fasilitasi sarana prasarana UMKM.
- Pembinaan dan fasilitasi peningkatan produksi industri non agro dan kimia.
- Penyediaan sarana prasarana perikanan, peternakan, dan pertanian.

i. Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 tahun 2011, jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap adalah perbandingan antara panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik atau sedang terhadap total panjang seluruh jalan kabupaten.

Target kinerja "Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap" tahun 2020 sebesar 70,8% dan realisasinya **76,96%** atau capaian kinerja sebesar **108,70% (kinerja sangat tinggi)**. Adapun kondisi jalan kabupaten pada tahun 2020 dan 2019, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Kondisi Jalan Kabupaten

No.	Kondisi Jalan Kabupaten	Realisasi Kerja			
		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Km	%	Km	%
1	Kondisi Baik	366,921	47,38	422,232	54,53
2	Kondisi Sedang	180,942	23,37	173,760	22,44
3	Kondisi Rusak Ringan	108,089	13,96	29,326	3,79
4	Kondisi Rusak Berat	111,263	14,37	149,050	19,25
	Jumlah Panjang Jalan Kabupaten	774,368	100	774,368	100

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, 2020.

Capaian kinerja tahun 2020 telah melebihi target, hal ini didukung oleh adanya :

- Peningkatan nilai kegiatan pemeliharaan rutin.
- Kegiatan Unit Reaksi Cepat Tambal Lubang (URCTL).
- Peningkatan anggaran perbaikan jalan baik dari Dana Insentif Daerah (DID) maupun bantuan provinsi terutama di perubahan anggaran tahun 2020.
- Kualitas data base jalan dan jembatan semakin baik. Survei dilakukan oleh tenaga ahli (pihak ketiga).
- Kegiatan Sistem Informasi Pengelolaan Data Jalan Daerah (SIPDJD) yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR setiap awal tahun.

j. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio Jaringan Irigasi merupakan perbandingan antara panjang saluran irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian.

Target kinerja "Rasio Jaringan Irigasi" tahun 2020 sebesar 64% dan realisasinya **64,46%** atau capaian kinerja sebesar **100,72% (kinerja sangat tinggi)**. Capaian kinerja melebihi target, hal ini didukung oleh adanya peningkatan kuantitas kegiatan penanganan daerah irigasi sesuai kewenangan kabupaten yang disertai dengan peningkatan anggaran baik yang bersumber dari APBD, Bantuan Provinsi, dan DAK.

Data luas budidaya pertanian di Kabupaten Sumedang dan data luas area yang terairi dalam kondisi baik bersumber dari Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Nomor 600/Kep.012/PUPR/2021. Berdasarkan data tersebut luasan total area budidaya pertanian sebesar 30.069 Ha yang tersebar dari 26 Kecamatan sedangkan data luas area yang terairi dalam kondisi baik sebesar 19.383,24 ha. Daerah irigasi yang terairi pada Tahun 2019 adalah sebesar 18.648,79 ha namun mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 19.383,24 ha. Dari tahun 2019 hingga 2020 mengalami selisih peningkatan sebesar 734,45 ha.

Adapun permasalahan yang terjadi antara lain :

- Terbatasnya sumber daya manusia pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- Saluran dan bangunan irigasi pada jaringan irigasi teknis mengalami kerusakan berat.
- Terjadi alih fungsi lahan sehingga berkurangnya areal irigasi dan mengakibatkan meningkatkan koefisien aliran.
- Musim kemarau yang menyebabkan kekeringan.
- Database yang kurang memadai.

Adapun solusinya yaitu :

- Rehabilitasi jaringan irigasi guna mengabaikan fungsi layanan jaringan irigasi.
- Meningkatkan kondisi fisik jaringan irigasi.
- Peningkatan layanan irigasi dengan meningkatkan kapasitas kemampuan SDM atau petugas Operasi dan Pemeliharaan.
- Diperlukan pemuktahiran database.
- Perlu adanya keselarasan antara Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020.
- Perlu adanya inventarisasi jaringan irigasi dan aset irigasi secara berkala didaerah kabupaten Sumedang.

k. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Target kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” tahun 2020 sebesar 59,18 poin dan realisasinya berdasarkan data hasil pengujian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang yang bekerja sama dengan Laboratorium Lingkungan Hidup yang berakreditasi terhadap tingkat pencemaran air sungai dan udara ambient serta data tutupan lahan hasil pencitraan Kenetrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didapatkan angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang sebesar **70,89 poin** atau capaian kinerja sebesar **119,79% (kinerja sangat tinggi)**. Pencapaian kinerja telah melebihi target.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang sebesar 70,89 poin termasuk kriteria “BAIK”. Poin tersebut merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) sebesar 64,29 poin, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 85,24 poin, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) IKTL sebesar 58,31 poin. Perhitungan dengan rumus baru sebagaimana Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LH Nomor : S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020

tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH untuk tahun 2020-2024, dengan rumus sebagai berikut :

$$IKLH = (0,367 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTU)$$

Dengan kriteria Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Kriteria IKLH

No	Nilai/Skor	Kriteria
1	90-100	Sangat Baik
2	70 – 89,9	Baik
3	50 – 69,9	Sedang
4	25 – 49,9	Buruk
5	0 – 24,9	Sangat Buruk

Sumber : DLHK, 2020.

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan IKLH diantaranya adalah program Citarum Harum dan pemeliharaan tanaman hasil Rehabilitasi lahan Kritis di luar kawasan hutan pada tahun 2010 dimana sudah mulai teridentifikasi di citra sebagai tutupan lahan yang memadai. Adanya pandemi covid-19 sangat membantu memperbaiki lingkungan karena adanya pengurangan aktivitas industri, transportasi dan even-even tertentu yang acapkali berpotensi mencemari sungai, udara dan lahan yang bervegetasi baik.

I. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana merupakan nilai kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana.

Target kinerja “Indeks Risiko Bencana” tahun 2020 sebesar 150 poin dan realisasinya berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Sumedang adalah **142,2 poin** atau capaian kinerja sebesar **105,20% (kinerja sangat tinggi)**. Pencapaian kinerja melebihi target. Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun terus menunjukkan tren menurun, dan ini merupakan hal yang baik, berarti risiko bencana semakin kecil. Pada tahun 2018 IRB sebesar 162 poin, tahun 2019 menurun menjadi 157 poin, dan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 142 poin (kelas risiko sedang). Sejak tahun 2018 telah terjadi penurunan indeks risiko bencana sebesar 20 poin.

Pencapaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam yang terdiri atas kegiatan Pengelolaan Informasi Penanggulangan Bencana, Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana.

Upaya lain yang dilakukan untuk pengurangan indeks risiko bencana yaitu dengan dibuatnya kebijakan untuk penanggulangan bencana diantaranya yaitu Perda No. 3 Tahun 20117 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 360/Kep.439-BPBD/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Tentang pengukuhan Pengurus

Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Kabupaten Sumedang massaa bhakti 2020-2023. Upaya selanjutnya adalah dengan penanaman seribu pohon di Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Cisitu dan Kecamatan Cimalaka serta penyebaran informasi kebencanaan berupa penyebaran booklet dan Peta Rawan Bencana di 26 Kecamatan dan adanya pemasangan Rambu-Rambu Daerah Rawan bencana di 51 Titik.

Kemudian didukung dengan adanya sistem informasi kebencanaan yang terdiri dari Sistem Peringatan Dini Pergerakan Tanah Early Warning System (EWS) di Kecamatan Sumedang Selatan dan Sistem Peringatan Gempa Bumi (inaTEWS). Selain dengan penyebaran informasi ke masyarakat melalui media cetak dan elektronik mengenai kesiapsiagaan kebencanaan.

m. **Opini BPK**

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/*unqualified opinion*, Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/*qualified opinion*, Tidak Wajar/*adversed opinion*, dan Tidak Menyatakan Pendapat/*disclaimer of opinion*. Opini terbaik adalah WTP.

Target kinerja “Opini BPK” tahun 2020 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan realisasinya berdasarkan data dari BPK adalah **WTP** atau capaian kinerja sebesar **100% (kinerja sangat tinggi)**. Target kinerja tercapai. Hal ini didukung oleh pelaksanaan program-program yaitu : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah; Program Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Sekretariat Daerah; dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan.

Terdapat 4 indikator yang menjadi faktor penentu untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pertama, penentuan opini WTP harus didasarkan pada kesesuaian dengan indikator tersebut. Kedua, kecukupan pengungkapan informasi di laporan keuangan harus jelas dan detail. Ketiga, BPK akan keefektifan sistem pengendalian internal dari instansi terkait. Terakhir, pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Predikat WTP telah diraih selama 6 tahun berturut-turut semenjak tahun 2015 (atas laporan keuangan tahun 2014). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Ini adalah opini yang dinyatakan dalam bentuk baku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

n. **Nilai SAKIP Kabupaten**

Nilai SAKIP Kabupaten adalah nilai dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan akumulasi nilai dari 5

komponen yaitu : Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja; dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Nilai ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Target kinerja “Nilai SAKIP Kabupaten” tahun 2020 adalah “BB” atau 70,01 (nilai terendah peringkat BB adalah 70,01 poin) sedangkan realisasinya adalah menggunakan proyeksi nilai tahun sebelumnya dikarenakan nilai SAKIP tahun 2020 (atas implementasi 2019) belum dirilis oleh Kemen PANRB, jadi realisasinya adalah “**B**” (**67,26 poin**) atau capaian kinerja sebesar **96,07% (kinerja sangat tinggi)**. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu pelaksanaan evaluasi internal berupa monitoring dan evaluasi (monev) rencana aksi belum optimal (belum dilaksanakan secara rutin/periodik setiap bulan) solusinya adalah pelaksanaan monev rencana aksi secara periodik dengan format yang sudah dibakukan dan ditunjang dengan adanya aplikasi atau e-SAKIP yang dikenal dengan MAUTI (Mari Unjuk Kinerja Untuk Sumedang Simpati), mengoptimalkan fungsi Gugus Tugas SAKIP, serta implementasi SAKIP Desa. Adapun hasil evaluasi SAKIP tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	
			2018	2019
1.	Perencanaan Kinerja	30%	22,40%	27,26%
2.	Pengukuran Kinerja	25%	15,03%	16,49%
3.	Pelaporan Kinerja	15%	9,30%	10,80%
4.	Evaluasi Kinerja	10%	6,28%	4,03%
5.	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20%	7,97%	8,68%
Jumlah		100%	60,98%	67,26%

Sumber : Bagian Organisasi Setda, 2020.

Tabel 3.6
Peringkat Nilai SAKIP

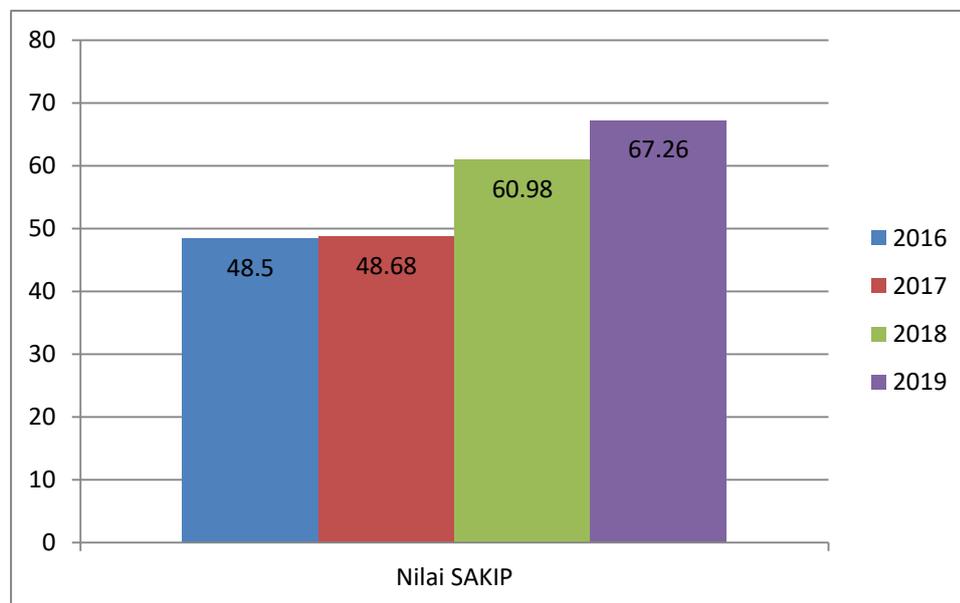
Peringkat	Nilai	Interpretasi
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50 – 60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Sumber : Permen PANRB No. 12 Tahun 2015

Nilai SAKIP Kabupaten Sumedang dari tahun 2016 sampai dengan 2019 menunjukkan tren terus meningkat. Peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupten Sumedang, dari sebesar 48,50 poin

(Predikat C) dan menempatkan Kabupaten Sumedang pada peringkat ke 27 dari 27 Kabupaten/Kota se Jawa Barat, menjadi sebesar 67,26 poin (Predikat B) dan menempatkannya pada peringkat ke 7 di Provinsi Jawa Barat.

Grafik 3.9
Perkembangan Nilai SAKIP



Sumber : Bagian Organisasi, 2020.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah berupaya memenuhi persyaratan *minimum requirement* untuk memperoleh predikat A, antara lain sebagai berikut :

- 1) SAKIP telah berbasis digital dan telah terintegrasi melalui penerapan aplikasi MAUTI (Mari Unjuk Kinerja untuk Sumedang Simpati), serta telah dilakukan *cascading* sampai ke Indikator Kinerja Individu (IKI) dan sedang dikembangkan terkoneksi dengan manajemen kinerja ASN.
- 2) Aplikasi MAUTI (SAKIP Digital) telah diterapkan di seluruh perangkat daerah (SKPD Kabupaten dan Kecamatan), dan dapat dijadikan rujukan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah tahun berikutnya.
- 3) Telah dilahirkan inovasi SAKIP Desa yang secara sistemik kami desain untuk turut mengakselerasi kinerja implementasi SAKIP Kabupaten Sumedang. Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sumedang, terutama terkait dengan penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting dan peningkatan kualitas pelayanan publik, telah di *cascading* sampai dengan tingkat desa. Disamping itu pula saat ini telah diterbitkan kebijakan pembangunan Zona Integritas Desa sebagai bentuk komitmen bagi terwujudnya Pemerintah Desa yang bebas dari KKN.

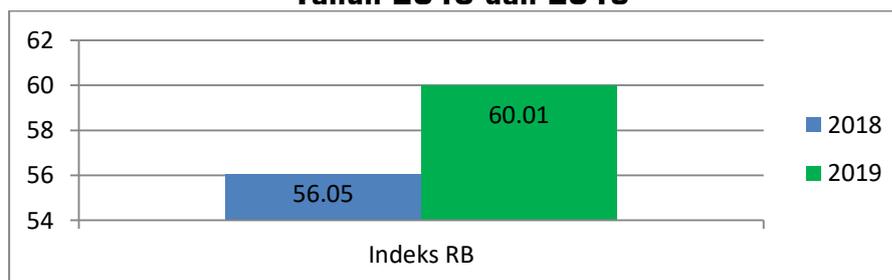
o. Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)

Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan akumulasi nilai dari nilai Komponen Pengungkit (8 area perubahan), Komponen Antara, dan Komponen Reform. Nilai ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Target kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” tahun 2020 sebesar 70 poin dan realisasinya adalah menggunakan proyeksi nilai tahun sebelumnya dikarenakan indeks RB tahun 2020 (atas implementasi 2019) belum dirilis oleh Kemen PANRB, jadi realisasinya **60,01 poin** atau capaian kinerja sebesar **85,73% (kinerja tinggi)**. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu bahwa Pemkab Sumedang terlambat dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan Reformasi Birokrasi keluar pada tahun 2010 dengan adanya Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dimana Reformasi Birokrasi dirancang dalam 3 periode, Periode Kesatu tahun 2010-2014, Periode Kedua 2015-2019, dan Periode Ketiga tahun 2020-2024. Kabupaten Sumedang sendiri baru memulai implementasinya pada tahun 2018 ditandai dengan dikeluarkannya Perbup No. 47 Tahun 2018 *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019, jadi baru melaksanakan di akhir periode kedua. Sehingga pemahaman dan komitmen akan Reformasi Birokrasi di kalangan Pemkab Sumedang masih kurang dan perlu akselerasi, perlu lompatan untuk mengejar dua target, yaitu target di periode pertama dan kedua sekaligus.

Solusinya adalah peningkatan komitmen para kepala perangkat daerah, meningkatkan pemahaman dengan mengintensifkan sosialisasi, serta penguatan melalui optimalisasi fungsi Tim Pembangunan Reformasi Birokrasi baik di tingkat kabupaten maupun perangkat daerah. Selain itu guna mengakselerasi implementasi Reformasi Birokrasi maka di setiap perangkat daerah dilaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada tahun 2020 sebanyak 4 perangkat daerah diajukan ke KemenpanRB untuk mendapatkan predikat WBK yaitu RSUD, BKPSDM, Disdukcapil, dan BAPPPEDA. Perangkat Daerah yang sudah menyandang WBK adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Grafik 3.10
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 dan 2019



Sumber : *Bagian Organisasi, 2020.*

Rincian hasil evaluasi RB Sumedang Tahun 2018 (atas pelaksanaan tahun 2017) dan Tahun 2019 (atas pelaksanaan tahun 2018) sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2019
I	KOMPONEN PENGUNGKIT			
1.	Manajemen Perubahan	5,00	1,93	2,04
2.	Penataan Peraturan Per-UU-an	5,00	1,04	1,10
3.	Penataan & Penguatan Organisasi	6,00	1,32	1,38
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	2,21	2,50
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	10,80	10,81
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,45	2,81
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	5,05	5,37
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,24	3,36
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	28,05	29,37
II	KOMPONEN HASIL			
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	6,80	9,24
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,32	3,70
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	5,68	6,27
4.	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,20	8,43
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	28,00	30,64
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	56,05	60,01

Sumber : Bagian Organisasi, 2020.

Namun demikian, Indeks Reformasi Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun menunjukkan tren terus meningkat. Indeks RB Tahun 2018 atas pelaksanaan tahun 2017 sebesar 56,05 poin dan pada tahun 2019 atas pelaksanaan tahun 2018 nilainya sebesar 60,01 poin, jadi terdapat peningkatan sebesar 3,96 poin atau 7,06%.

Selanjutnya dapat Kami laporkan bahwa, dalam 2 (dua) tahun terakhir ini perkembangan capaian reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sangat pesat, antara lain sebagai berikut :

- 1) **Area Majamenen Perubahan.** Kami telah mendorong setiap ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menjadi agen perubahan (*agent of change*) di lingkungan kerja maupun lingkungan sosial masing-masing. Salah satu ASN, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang menerima penghargaan Piala Adhigana Anugerah ASN Tahun 2020 untuk kategori PPT Teladan. Yang bersangkutan kini menjadi *role model* untuk ASN lainnya.
- 2) **Area Kelembagaan.** Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah berkomitmen serta bersedia untuk menjadi *piloting* penyederhanaan

birokrasi di daerah. Saat ini kami sedang mendesain penyederhanaan birokrasi yang berorientasi pada perizinan, investasi dan pelayanan publik, serta yang berorientasi pada dukungan terhadap optimalisasi pelayanan publik. Ada 7 (tujuh) Perangkat Daerah yang akan kami pangkas, yakni DPMPTSP, Sekretariat Daerah, Bappppeda, Bappenda, BKPSDM, BPKAD, serta Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah.

- 3) **Area Tatalaksana.** Akselerasi capaian area tatalaksana antara lain terlihat dari signifikannya peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sumedang, dari sebelumnya sebesar 2,46 poin meningkat menjadi 3,81 poin (Peringkat 1 untuk kategori Kabupaten/Kota).
- 4) **Area SDM Aparatur.** Peningkatan capaian pada area SDM aparatur dibuktikan dengan pemberian Anugerah Meritokrasi dari KASN kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang atas kenaikan Indeks Sistem Merit, dari sebelumnya sebesar 200 poin meningkat menjadi 301,5 poin. Indeks Sistem Merit Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kini menjadi yang terbaik pertama tingkat nasional untuk kategori kabupaten. Disamping itu, Indeks Profesionalitas ASN mengalami kenaikan yang signifikan dari sebelumnya sebesar 59,45 poin meningkat menjadi 65,03 poin.
- 5) **Area Akuntabilitas.** Dibuktikan dengan peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dari sebesar 48,50 poin (Predikat C) dan menempatkan Kabupaten Sumedang pada peringkat ke 27 dari 27 Kabupaten/Kota se Jawa Barat, menjadi sebesar 67,26 poin (Predikat B) dan menempatkannya pada peringkat ke 7 di Provinsi Jawa Barat.
- 6) **Area Pengawasan.** Dibuktikan dengan pencapaian Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP pada Level 3 (Salah satu yang terbaik di tingkat nasional). Hal ini membuktikan keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk melakukan upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta meningkatkan kualitas APIP dalam memberikan pendampingan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
- 7) **Area Peraturan Perundang Undangan.** Dibuktikan dengan diraihnya Anugerah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang masuk ke dalam salah satu Kabupaten/Kota dengan pengelolaan JDIH terbaik di tingkat nasional.
- 8) **Area Pelayanan Publik.** Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah pionir dalam pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jawa Barat. Seiring pelaksanaan transformasi digital, saat ini telah dikembangkan Mal Maya Pelayanan Publik (*Digital Public Service Mall*) melalui aplikasi Tahu Sumedang. Disamping itu, perangkat daerah yang secara teknis mengelola MPP yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PANRB.

p. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan angka yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Nilai ini didapatkan dari

hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Unsur yang disurvei meliputi 9 unsur yaitu : Persyaratan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; serta Sarana dan Prasarana.

Target kinerja "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun 2020 sebesar 83 poin dan realisasinya berdasarkan data dari Bagian Organisasi adalah **83,80 poin** atau capaian kinerja sebesar **100,98%** (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tercapai melebihi target. Nilai capaian IKM didapatkan dari rata-rata nilai IKM 55 perangkat daerah dan 7 kelurahan. Berdasarkan perhitungan hasil survei, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.8
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

No.	Unsur SKM	NRR	NRR Tertimbang (NRR x 0,111)
U1	Persyaratan	3,22	0,365
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,30	0,363
U3	Waktu Penyelesaian	3,28	0,360
U4	Biaya/Tarif	3,55	0,390
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,31	0,363
U6	Kompetensi Pelaksana	3,34	0,367
U7	Perilaku Pelaksana	3,36	0,370
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,45	0,379
U9	Sarana dan Prasarana	3,42	0,376
Jumlah			3,337
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			83,80
Mutu Pelayanan			B
Kinerja Unit Pelayanan			BAIK

Sumber : Laporan SKM Kabupaten Sumedang Tahun 2020 (Bagian Organisasi).

Dari tabel di atas diketahui bahwa unsur survey kepuasan masyarakat tertinggi adalah kepastian unsur Biaya/Tarif sebesar 3,55 sedangkan yang terendah yaitu unsur Persyaratan sebesar 3,22. Adapun untuk Nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 83,80, sehingga mutu pelayanan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang termasuk kategori B dengan kinerja unit pelayanan BAIK.

Hal yang mendukung pencapaian target adalah telah ada peningkatan dalam hal pemenuhan standar pelayanan publik pada beberapa unit penyelenggara pelayanan publik. Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- 1) Pada beberapa unit kerja, pengelola/pelaksana survei kepuasan masyarakat terkadang ditangani oleh petugas baru yang belum begitu memahami tentang aturan/pedoman SKM. sehingga perlu dilaksanakan pembinaan dalam hal pengolahan data hasil survei. Solusinya yaitu

untuk lebih memudahkan dan mengefektifkan pelaksanaan SKM tahun 2021 akan dilaksanakan survei dengan menggunakan aplikasi.

- 2) Unsur Persyaratan dan unsur Waktu Penyelesaian berkategori KURANG BAIK (interval nilai 2,60-3,064). Nilai unsur Persyaratan sebesar 3,22 dan unsur Waktu Penyelesaian sebesar 3,28.

Adapun solusinya yaitu :

- 1) Perlu dilaksanakan pembinaan terhadap pengelola SKM di setiap OPD dalam hal pengolahan data hasil survei serta untuk lebih memudahkan dan mengefektifkan pelaksanaan SKM tahun 2021 akan dilaksanakan survei dengan menggunakan aplikasi.
- 2) Untuk unsur Persyaratan, harus dilaksanakan evaluasi jadwal pelayanan dan pelaksanaannya serta memasang informasi jika terjadi perubahan jadwal pelayanan. Sedangkan untuk unsur Persyaratan, solusinya adalah dengan memasang informasi persyaratan sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 3) Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemkab Sumedang telah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) dimana mal ini merupakan salah satu MPP yang pertama kali dibangun di Jawa Barat.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2020 dalam rangka meningkatkan IKM adalah dengan melaksanakan program-program yang relevan dengan capaian kinerja sebagai berikut : Persentase izin yang terbit tepat waktu capaian kinerja sebesar 109,36%; Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil mencapai 111%; Persentase Layanan Kependudukan yang sesuai dengan Standar Manajemen Mutu mencapai sebesar 100%. Cakupan pelayanan KB sebesar 109,28%; Cakupan pelayanan transmigrasi mencapai 93,44%; Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan mencapai 82,27%. Cakupan layanan internet/wifi sampai tingkat desa mencapai 100%. Adanya kemudahan bagi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); Serta, dengan dibangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP).

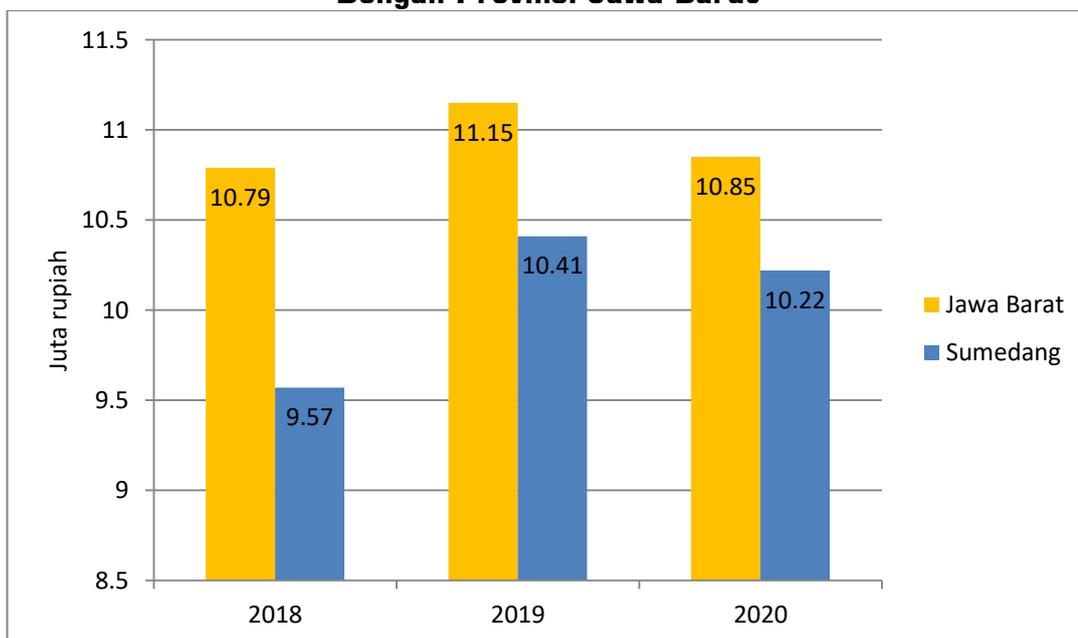
q. Pengeluaran Per-Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Target kinerja "Pengeluaran Per-Kapita" tahun 2020 sebesar Rp.10,38 juta dan realisasinya berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sumedang adalah **Rp.10,22 juta** atau capaian kinerja sebesar **98,46% (kinerja sangat tinggi)**. Target kinerja tidak tercapai. Pengeluaran per kapita mengalami penurunan sejalan dengan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan sehingga menyebabkan daya beli masyarakat berkurang.

Pengeluaran per-kapita dari tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan 8,78%, namun pada tahun 2020 menurun dari capaian tahun 2019 sekitar 1,83%. Perlu strategi dan upaya yang lebih keras lagi untuk meningkatkan pengeluaran per-kapita, karena capaian setiap tahunnya selalu berada di bawah capaian Provinsi Jawa Barat.

Grafik 3.11
Perbandingan Pengeluaran Per-Kapita Kabupaten Sumedang
Dengan Provinsi Jawa Barat



Sumber : Bapppeda, 2021.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu disebabkan banyak masyarakat terdampak pandemi covid-19 seperti pengurangan jam kerja, dirumahkan, hingga PHK sehingga menyebabkan daya beli menurun dan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Solusi/rekomendasinya yaitu pengembangan potensi ekonomi lokal yang berbasis pertanian diintegrasikan dengan industri pengolahan dan agrowisata karena sektor-sektor yang memiliki angka pengganda untuk distribusi pendapatan dan penciptaan lapangan pekerjaan masih didominasi oleh sektor pertanian, maka pengembangan sektor pertanian menjadi strategis terutama dikaitkan dengan misi RPJPD untuk mewujudkan sumedang sebagai kabupaten agribisnis yang didukung industri dan pariwisata. Berdasarkan data BPS, terjadi peralihan yang besar dari lapangan kerja non pertanian ke sektor pertanian di tahun 2020.

Pada tahun 2020 upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan pengeluaran perkapita adalah dengan pelaksanaan program-program yang relevan dengan capaian kinerja sebagai berikut : Cakupan koperasi aktif capaiannya sebesar 49,96%; Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi pedesaan yang aktif mencapai 100%; Laju pertumbuhan sub sector perdagangan besar dan eceran capaiannya sebesar 94,61%; Laju pertumbuhan sub sektor industri pengolahan capaiannya sebesar 215,14%; Kemudian, Cakupan ketahanan keluarga capaian kerjanya sebesar 67,39%.

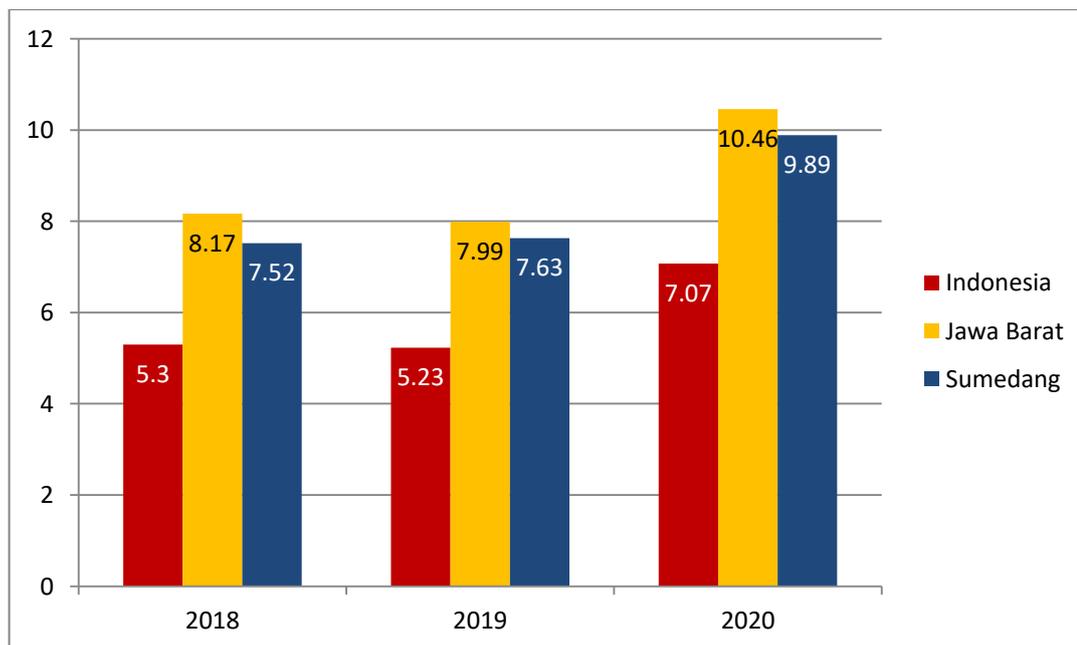
r. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran Terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena

merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Target kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” tahun 2020 sebesar 6,35% dan realisasinya berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sumedang adalah **9,89%** atau capaian kinerja sebesar **44,25% (kinerja sangat rendah)**. Target kinerja tidak tercapai. Meskipun demikian, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sumedang dari tahun 2018-2020 selalu dibawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Namun, berada di atas rata-rata nasional.

Grafik 3.12
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia



Sumber : Bappppeda, 2021.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu meningkatnya angka kemiskinan yang disebabkan pandemi Covid-19 berkorelasi positif dengan meningkatnya pengangguran terbuka. Meningkatnya angka pengangguran disebabkan oleh hilangnya pekerjaan buruh migran, tenaga kerja baru tidak terserap oleh pasar kerja dan terjadinya PHK. UMK Sumedang tahun 2020 Rp. 3.139.275, berada di atas rata-rata UMK Jawa Barat dan berbeda jauh dengan kabupaten tetangga seperti Majalengka, Garut, dan kabupaten tetangga lainnya, kecuali Kab. Bandung, hal tersebut merupakan salah satu faktor melemahkan daya saing bagi masuknya investor ke Sumedang. Namun, Tingkat Pengangguran Terbuka Sumedang masih tetap berada di bawah Provinsi Jawa Barat.

Upaya yang telah dilaksanakan dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan Penguatan Calon Tenaga Kerja Berbasis Kewirausahaan (pelatihan kewirausahaan), uji kompetensi calon pencari kerja, dan terlaksananya magang sebanyak 52 orang tenaga kerja.

Selain itu, adanya program peningkatan kesempatan kerja dengan output program ini yaitu : 1) pelayanan kepada pencari kerja sebanyak 8255 orang pencari kerja yang ditempatkan dan pencari kerja yang terdaftar sebanyak 1969 orang serta terlaksananya penempatan TK AKL, AKAD dan AKAN sebanyak 55 orang; 2) terlaksananya pembinaan terhadap perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA); 3) terlaksananya kegiatan penetapan tenaga kerja mandiri sebanyak 40 orang; serta 4) Bimbingan inkubasi Bisnis Berbasis Potensi Persiapan Pra Purna Kerja (IMTA) sebanyak 20 orang.

Solusi untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka adalah peningkatan pendidikan keterampilan/vokasi, peningkatan investasi, membuka lapangan pekerjaan padat karya, menumbuhkan wirausahawan baru, serta pembangunan destinasi wisata yang dapat membuka peluang usaha bagi warga masyarakat sekitar.

s. Jumlah UMKM

UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan, yakni sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

Usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam undang-undang. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

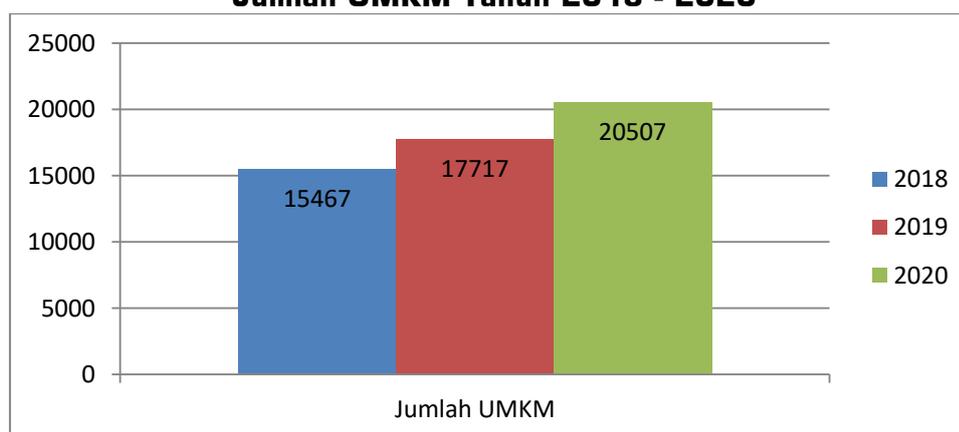
Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Target kinerja “Jumlah UMKM” tahun 2020 sebesar 17.467 UMKM dan realisasinya berdasarkan data dari Dinas Koperasi UKMPP Kabupaten Sumedang adalah **20.507 UMKM** atau capaian kinerja sebesar **117,40% (kinerja sangat tinggi)**. Capaian kinerja telah melebihi target. Jumlah UMKM dari tahun ke tahun menunjukkan tren meningkat. Tahun 2018 jumlah UMKM sebanyak 15.467 UMKM kemudian tahun 2019 meningkat menjadi 17.717 UMKM dan tahun 2020 kembali meningkat menjadi 20.507 UMKM. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019), maka pada tahun 2020 terdapat penambahan jumlah UMKM sebanyak 2.790 UMKM atau sekitar 15,75%.

Grafik 3.13
Jumlah UMKM Tahun 2018 - 2020



Sumber : DKPP, 2021.

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan jumlah UMKM yaitu melalui pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah (Pelatihan kemas produk UMKM dan Pemberdayaan UMKM); Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM (Pengembangan Kredit Usaha Mikro dan Kecil/Kredit KUSUMA, Penguatan Pemasaran dan Akselerasi Pasar Produk UMKM, Pengembangan Jaringan dan Kemitraan UMKM, Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Sarana Prasarana UMKM); serta Program Pengembangan Ekonomi Kreatif (melalui kegiatan Promosi Ekonomi Kreatif Unggulan, dan Penyelenggaraan Festival Sub-Sektor Ekonomi Kreatif).

Kendala yang dihadapi dalam peningkatan jumlah UMKM yaitu akibat dari pandemi COVID-19 berdampak pada terganggunya aktivitas perekonomian yang menyebabkan banyak UMKM yang gulung tikar karena

omset menurun drastis akibat adanya pembatasan aktivitas ekonomi tersebut.

Solusi untuk peningkatan jumlah UMKM diantaranya dengan program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, serta didukung dengan adanya program Kredit KUSUMA, Pengembangan desa produktif/OVOP (One Product One Village), Koperasi Syariah Masjid Besar, Bantuan sarana prasarana UMKM, Pelatihan Tenaga Kerja, Warung Pintar, Fasilitasi PIRT (Produk Industri Rumah Tangga), Pembentukan Gerai Produk UMKM, dan Pujamari (Pusat Jajanan Malam Hari).

Tabel 3.9
Jumlah UMKM Tahun 2019 dan 2020

No.	Kategori	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Usaha Mikro	11.117	13.907
2.	Usaha Kecil	4.539	4.539
3.	Usaha Menengah	2.061	2.061
Jumlah		17.717	20.507

Sumber : DKPP, 2020.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Rata-rata persentase realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 91,20%. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2019) sebesar 99,04%. Terjadi penurunan rata-rata persentase realisasi kinerja sebesar 7,84%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,26	72,29	100,04%	72,44	72,43	99,99%	Capaian Kinerja Menurun
Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,29	8,27	99,76%	8,48	8,51	100,35%	Capaian Kinerja Meningkat
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,22	12,96	98,03%	13,44	12,97	96,50%	Capaian Kinerja Menurun
Terwujudnya	Persentase	Persen	8,96	9,05	99%	8,16	10,26	74,27%	Capaian Kinerja

penanggula ngan MPKS serta pemberday aan perempuan dan perlindunga n anak	Penduduk Miskin								Menurun
	Indeks Pembang unan Gender	Poin	94,87	95,01	100,15%	95,34	95,18	99,83%	Capaian Kinerja Menurun
	Indeks Pemberda yaan Gender	Poin	69,23	70,57	101,94%	69,77	70,94	101,67%	Capaian Kinerja Menurun
Terwujudny a kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukuna n Umat Beragam a	Poin	72,5	72,2	99,59%	73	72,2	98,93%	Capaian Kinerja Menurun
Terwujudny a percepatan pengemban gan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata	Laju Pertumbu han Ekonomi	Persen	6,74	6,32	93,77%	7,01	-1,12	-15,98%	Capaian Kinerja Menurun
Meningkatn ya kualitas dan kuantitas infrastrukt ur jalan dan sumber daya air	Persenta se Tingkat Kondisi Jalan Kabupate n Mantap	Persen	66,8	70,75	105%	70,8	76,98	108,70%	Capaian Kinerja Meningkat
	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	62	62,02	100,03%	64	64,46	100,72%	Capaian Kinerja Meningkat
Terwujudny a wilayah ekonomi yang berkelanjut an	Indeks Kualitas Lingkunga n Hidup	Poin	58,92	59,01	100,15%	59,18	70,89	119,79%	Capaian Kinerja Meningkat
	Indeks Risiko Bencana	Poin	155	157	98,71%	150	142,2	105,20%	Capaian Kinerja Meningkat
Terwujudny a akuntabilita s kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	Capaian Kinerja Stabil
	Nilai SAKIP Kabupate n	Kategor i	B	B	100%	BB	B	96,07%	Capaian Kinerja Menurun
	Indeks Reformas i Birokrasi	Poin	65	60,01	92,32%	70	60,01	85,73%	Capaian Kinerja Menurun
Terwujudny	Indeks	Poin	81	82,27	101,57%	83	83,80	100,98%	Capaian

a pelayanan publik yang berkualitas	Kepuasan Masyarakat								Kinerja Meningkat
Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Pengeluaran Per-Kapita	Rp. (Juta)	10,06	10,41	103,44%	10,38	10,22	98,46%	Capaian Kinerja Menurun
Menciptakan wirausahaan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,55	7,63	83,51%	6,35	9,89	44,25%	Capaian Kinerja Menurun
	Jumlah UMKM	UMKM	16.467	17.241	104,70%	17.467	20.507	117,40%	Capaian Kinerja Meningkat
Rata-Rata Capaian Kinerja			99,04%			91,20%			Capaian Kinerja Menurun

Menurunnya rata-rata capaian kinerja tahun 2020 dikarenakan terjadinya penurunan capaian kinerja pada 11 (sebelas) indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Angka Harapan Hidup
- 2) Angka Harapan Lama Sekolah
- 3) Persentase Penduduk Miskin
- 4) Indeks Pembangunan Gender
- 5) Indeks Pemberdayaan Gender
- 6) Indeks Kerukunan Umat Beragama
- 7) Laju Pertumbuhan Ekonomi
- 8) Nilai SAKIP
- 9) Indeks Reformasi Birokrasi
- 10) Pengeluaran Per-Kapita
- 11) Tingkat Pengangguran Terbuka

Namun demikian, dari 8 (delapan) indikator yang capaian kinerjanya menurun tersebut, terdapat 6 (enam) indikator yang realisasinya kinerjanya justru meningkat yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Nilai SAKIP, dan Indeks Reformasi Birokrasi.

Sedangkan 8 (delapan) indikator kinerja yang capaiannya meningkat atau stabil 100% yaitu :

- 1) Rata-Rata Lama Sekolah
- 2) Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap
- 3) Rasio Jaringan Irigasi
- 4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- 5) Indeks Risiko Bencana
- 6) Opini BPK (stabil capaian kinerjanya 100%)
- 7) Indeks Kepuasan Masyarakat
- 8) Jumlah UMKM

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sampai dengan tahun ini (tahun kedua RPJMD) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2020	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2020
Angka Harapan Hidup	73,00	72,43	99,22%
Rata-Rata Lama Sekolah	9,07	8,51	93,83%
Angka Harapan Lama Sekolah	14,11	12,97	91,92%
Persentase Penduduk Miskin	5,76	10,26	21,88%
Indeks Pembangunan Gender	96,75	95,18	98,40%
Indeks Pemberdayaan Gender	71,37	70,94	99,40%
Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,5	72,2	96,91%
Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,88	-1,12	-14,21%
Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	82,8	76,96	92,95%
Rasio Jaringan Irigasi	70	64,46	92,09%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,11	70,89	117,93%
Indeks Risiko Bencana	135	142,2	94,67%
Opini BPK	WTP	WTP	100%
Nilai SAKIP Kabupaten	A	B	84,07%
Indeks Reformasi Birokrasi	85	60,01	70,60%
Indeks Kepuasan Masyarakat	90	83,80	93,11%
Pengeluaran Per-Kapita	11,35	10,22	90,04%
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,68	9,89	25,88%
Jumlah UMKM	20.467	20.507	100,20%
Rata-rata capaian target kinerja akhir tahun RPJMD pada tahun 2020			81,52%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian target akhir RPJMD 2019-2023 pada tahun 2020 atau tahun kedua RPJMD sebesar 81,52%. Sehingga target jangka menengah yang belum tercapai sebesar 18,48% dan menjadi target pada 3 tahun ke depan yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023.

Apabila dirata-ratakan maka pada tahun kedua capaian kinerja minimal seharusnya 40% dengan asumsi tiap tahun target kinerja jangka menengah adalah 20%, sehingga tahun kelima target kinerja tercapai 100%.

Capaian indikator kinerja “Persentase Penduduk Miskin”, “Laju Pertumbuhan Ekonomi” dan “Tingkat Pengangguran Terbuka” harus menjadi perhatian lebih, karena sampai dengan tahun kedua RPJMD capaiannya masih di bawah rata-rata capaian ideal tahun kedua yaitu 40%.

Indikator kinerja dengan target jangka menengahnya sudah 100% pada tahun kedua yaitu Opini BPK. Bahkan, terdapat indikator kinerja yang capaiannya sudah melebihi target jangka menengah pada tahun kedua yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Jumlah UMKM.

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	99,99%	88,23%	11,76	Tidak Efisien
Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah	100,35%	97,46%	2,89	Efisien
	Angka Harapan Lama Sekolah	96,50%	97,46%	-0,96	Tidak Efisien
Terwujudnya penanggulangan MPKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin	74,27%	48,32%	25,95	Tidak Efisien
	Indeks Pembangunan Gender	99,83%	99,23%	0,6	Tidak Efisien
	Indeks Pemberdayaa n Gender	101,67%	94,95%	6,72	Efisien
Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	98,93%	95,01%	3,92	Tidak Efisien
Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis,	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-15,98%	91,69%	-106,69	Tidak Efisien

industri, dan pariwisata					
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	108,70%	80,51%	28,19	Efisien
	Rasio Jaringan Irigasi	100,72%	91,39%	9,33	Efisien
Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	119,79%	93,23%	26,56	Efisien
	Indeks Risiko Bencana	105,20%	98,63%	6,57	Efisien
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	100%	88,03%	11,97	Efisien
	Nilai SAKIP Kabupaten	96,07%	96,92%	-0,85	Tidak Efisien
	Indeks Reformasi Birokrasi	85,73%	93,64%	-7,91	Tidak Efisien
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,98%	94,36%	6,62	Efisien
Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Pengeluaran Per-Kapita	98,46%	96,26%	2,20	Tidak Efisien
Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar	Tingkat Pengangguran Terbuka	44,25%	98,90%	-54,65	Tidak Efisien
	Jumlah UMKM	117,40%	98,82%	18,58	Efisien
Rata-Rata		91,20%	91,92%	-0,72	Tidak Efisien

Rata-rata capaian kinerja Kabupaten Sumedang Tahun 2020 sebesar 91,20%. Karena capaian kinerja kurang dari 100% maka tidak dapat dihitung tingkat efisiensinya. Namun apabila dilihat efisiensi setiap pencapaian sasaran, maka berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2020 telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya berupa efisiensi/penghematan anggaran pada pencapaian 9 indikator kinerja rata-rata sebesar 13,05%.

Secara rinci jumlah pagu dan realisasi anggaran program yang mendukung pencapaian kinerja adalah sebagai mana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Per Program Yang Mendukung Pencapaian Kinerja
Sasaran Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.	13,537,521,146.00	13,099,472,830.00	96.76
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat.	47,122,832,937.90	39,967,587,634.00	84.82
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.	305,271,000.00	287,104,400.00	94.05
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat.	3,179,670,000.00	3,066,028,956.00	96.43
		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, dan Surveilans Epidemiologi.	4,678,764,550.00	4,211,587,895.00	90.01
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.	2,584,499,000.00	1,807,907,068.00	69.95
		Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.	2,628,524,550.00	2,387,220,530.00	90.82
		Program Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan.	49,592,838,799.66	42,440,621,262.00	85.58
		Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD.	63,953,562,960.00	52,820,973,095.00	82.59
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.	9,492,101,000.00	9,276,061,111.00	97.72
		Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD.	172,152,873,738.00	156,303,196,413.00	90.79
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja.	95,185,225.00	95,035,225.00	99.84
		Program Pembinaan, Pemasarakatan, dan Pengembangan Olahraga.	764,990,000.00	751,405,350.00	98.22
Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	- Rata-rata lama sekolah.	Program Pendidikan Anak Usia Dini.	2,364,920,000.00	2,346,796,798.00	99.23
	- Angka harapan lama sekolah.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	802,500,000.00	734,980,000.00	91.59

		Program Kesetaraan.	1,873,562,250.0 0	1,668,079,750.0 0	89.03
		Program Pendidikan Dasar	230,796,401,207 .00	221,925,708,876 .00	96.16
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	143,022,767,200 .00	142,544,160,117 .00	99.67
Terwujudnya penanggulangan PMKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase penduduk miskin	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	3,852,048,000.0 0	187,052,000.00	4.86
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.	1,039,686,300.0 0	985,722,368.00	94.81
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	456,226,750.00	454,726,750.00	99.67
		Program Perlindungan Sosial.	195,750,000.00	191,085,624.00	97.62
		Program Jaminan Sosial.	1,750,079,650.0 0	1,705,566,650.0 0	97.46
	Indeks Pembangunan Gender	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak.	129,592,100.00	128,592,100.00	99.23
	Indeks Pemberdayaan Gender	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.	227,272,900.00	227,272,900.00	100.0 0
		Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga.	391,309,050.00	361,959,050.00	92.50
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.	111,275,000.00	103,775,000.00	93.26
	Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	126,825,200.00	121,392,400.00
Program Kelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan			111,613,250.00	110,935,250.00	99.39
Program Kewaspadaan Nasional.			3,079,042,000.0 0	3,039,437,000.0 0	98.71
Program Kerukunan Umat Beragama.			182,060,000.00	175,530,000.00	96.41
Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.			891,042,575.00	891,042,575.00	100.0 0

		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertarikan dan Ketertiban Umum.	786,906,100.00	784,900,100.00	99.75
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	1,314,937,100.00	1,306,088,550.00	99.33
		Program Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Diniyah Kabupaten.	4,906,850,000.00	4,401,100,000.00	89.69
Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan.	4,997,776,550.00	4,840,018,849.00	96.84
		Program Pelayanan Bidang Perhubungan, Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Lalu-Lintas Angkutan Jalan.	2,292,041,000.00	2,258,381,600.00	98.53
		Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah.	642,185,265.00	189,282,550.00	29.47
		Program Peningkatan Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal.	565,296,055.50	547,704,600.00	96.89
		Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan PTSP.	172,274,364.30	167,672,450.00	97.33
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.	4,144,751,043.00	4,016,407,505.00	96.90
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.	10,110,194,341.50	10,027,586,600.00	99.18
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan.	673,108,400.00	670,898,750.00	99.67
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.	74,162,300.00	14,004,300.00	18.88
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.	496,431,125.00	484,580,625.00	97.61
		Program Peningkatan Produksi Perikanan.	2,167,249,520.00	1,898,011,300.00	87.58
		Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan.	146,190,400.00	145,840,400.00	99.76
		Program Kesehatan Lingkungan Ikan dan Konservasi.	236,786,672.00	229,219,152.00	96.80

		Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Hewan.	133,830,000.00	120,150,000.00	89.78
		Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	47,390,000.00	41,042,500.00	86.61
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.	9,187,719,994.00	7,850,394,580.00	85.44
		Program Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.	641,588,250.00	636,373,250.00	99.19
		Program Peningkatan Sarana Hubungan Industrial.	505,324,365.00	494,120,300.00	97.78
		Program Pengembangan Sentra –Sentra Industri Potensial.	297,090,000.00	296,690,000.00	99.87
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.	678,000,000.00	672,495,017.00	99.19
		Program Pengembangan Kepariwisataaan.	19,093,432,600.00	16,936,716,991.00	88.70
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.	225,000,000.00	224,120,000.00	99.61
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.	879,065,675.00	788,280,270.00	89.67
		Program Pengendalian Banjir	50,000,000.00	48,812,900.00	97.63
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten mantap	Program Penanganan Jalan dan Jembatan.	85,209,170,952.00	68,605,832,400.00	80.51
	Rasio jaringan irigasi	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan.	32,268,716,500.00	29,490,646,800.00	91.39
Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Program Penataan Ruang.	2,929,550,000.00	2,834,697,467.00	96.76
		Program Pembinaan Jasa Konstruksi.	374,300,000.00	373,410,000.00	99.76
		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.	686,176,854.00	603,940,704.00	88.02
		Program Pengembangan dan Penataan Wilayah.	38,942,756,985.00	33,767,096,528.00	86.71

		Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	6,456,043,286.70	6,238,066,100.00	96.62
		Program Penyediaan Sarana dan Pengelolaan Limbah Domestik.	300,000,000.00	299,028,200.00	99.68
		Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan.	34,985,450,000.00	34,534,019,335.00	98.71
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.	756,628,650.00	656,520,600.00	86.77
		Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.	414,288,000.00	411,896,682.00	99.42
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.	5,376,875,600.00	5,340,275,793.00	99.32
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	330,168,000.00	324,835,500.00	98.38
		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.	601,040,100.00	530,271,440.00	88.23
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.	74,233,000.00	73,590,500.00	99.13
	Indeks Risiko Bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.	2,111,579,150.00	2,071,299,065.00	98.09
		Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1,728,916,700.00	1,716,712,700.00	99.29
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	5,829,681,644.00	4,921,637,316.00	84.42
		Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah.	8,330,948,642.00	7,459,239,658.00	89.54
		Program Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Sekretariat Daerah.	760,015,950.00	653,739,450.00	86.02
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan.	1,356,469,000.00	1,294,649,000.00	95.44

Nilai SAKIP Kabupaten	Program Pengendalian Pembangunan Daerah.	2,287,269,550.00	2,255,637,750.00	98.62	
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.	198,290,050.00	198,290,050.00	100.00	
	Program Pengamanan Berita, Persandian, dan Radiogram.	364,879,550.00	363,148,580.00	99.53	
	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1,725,512,000.00	1,689,181,800.00	97.89	
	Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah.	965,867,000.00	904,829,395.00	93.68	
	Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Ekonomi dan SDA.	1,212,900,000.00	1,166,071,150.00	96.14	
	Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Pemerintahan dan Sosial.	987,335,000.00	979,150,000.00	99.17	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.	338,812,400.00	334,562,400.00	98.75	
	Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.	965,066,575.00	929,590,075.00	96.32	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.	18,274,569,500.00	17,882,728,650.00	97.86	
	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa.	811,807,663.00	790,754,600.00	97.41	
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.	5,982,119,652.00	5,566,681,021.00	93.06	
	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah.	178,621,100.00	176,695,000.00	98.92	
	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.	17,903,555,800.00	16,786,916,803.00	93.76
		Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	3,160,771,000.00	3,138,501,000.00	99.30
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.		295,375,000.00	293,045,000.00	99.21	

		Program Penegakan Integritas.	90,950,000.00	90,950,000.00	100.00
		Program Administrasi Pemerintahan dan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah.	551,875,200.00	542,619,109.00	98.32
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.	520,224,700.00	502,185,255.00	96.53
		Program Pengembangan Kompetensi Aparatur.	2,043,360,698.00	1,946,487,515.00	95.26
		Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen Aparatur.	1,746,627,075.00	1,302,034,000.00	74.55
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.	738,365,000.00	728,969,000.00	98.73
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan.	808,281,650.00	801,153,850.00	99.12
		Program Pelayanan Administrasi Kependudukan.	385,125,000.00	379,010,750.00	98.41
		Program Penataan Administrasi Kependudukan.	6,354,972,600.00	5,545,283,160.00	87.26
		Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.	9,331,012,105.00	9,313,625,200.00	99.81
		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00
		Program Transmigrasi Lokal	290,842,750.00	79,447,200.00	27.32
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	27,793,927,500.00	26,893,366,605.00	96.76
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	530,301,500.00	519,567,250.00	97.98
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.	14,734,312,075.00	13,337,893,171.00	90.52
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.	1,040,854,688.00	938,154,250.00	90.13
Terwujudnya perekonomian	Pengeluaran per kapita	Program Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi.	572,356,250.00	504,766,250.00	88.19

an Sumedang yang kreatif dan berdaya saing		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Koperasi.	1,232,700,000.00	1,108,411,750.00	89.92
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat.	5,199,486,500.00	5,082,344,700.00	97.75
		Program Pemberdayaan, Penataan, dan Perlindungan Pasar Rakyat.	979,956,500.00	972,003,121.00	99.19
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.	406,390,000.00	406,390,000.00	100.00
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.	687,609,125.00	687,359,125.00	99.96
		Program Ketahanan Keluarga.	405,841,160.00	402,846,910.00	99.26
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	855,734,520.00	789,585,500.00	92.27
	Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan dasar	Tingkat pengangguran terbuka	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.	2,084,053,000.00	2,068,617,136.00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja.			627,573,262.00	613,189,850.00	97.71
Jumlah UMKM		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.	570,245,000.00	558,894,939.00	98.01
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.	3,813,770,000.00	3,764,758,131.00	98.71
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif.	1,047,405,500.00	1,043,691,200.00	99.65
Total			1,197,978,103,670.56	1,101,189,703,555.00	91.92

Sumber : BPKAD / LRA Tahun 2020

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Program yang menembak langsung pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

a. Penunjang Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup, yaitu :

1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.

Indikator kinerja untuk Program obat dan perbekalan kesehatan adalah persentase ketersediaan farmasi, reagent dan alat kesehatan pada 35 UPTD Puskesmas yang ada di Kabupaten Sumedang. Adapun capaian target kinerja Program obat dan perbekalan kesehatan pada tahun

- 2020 adalah 100%, artinya pada tahun 2020 dari 35 UPTD Puskesmas seluruhnya (100%) terpenuhi kebutuhan farmasi, reagent dan alat kesehatan yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan.
- 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - a. Indikator kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2020 yaitu 87 dengan target sebesar 87 dan realisasinya 87 atau capaian kinerja sebesar 100 %. Target kinerja tercapai.
 - b. Indikator kinerja Program Indeks Keluarga Sehat (IKS) tahun 2020 yaitu 0,117 dengan target sebesar 0,3 dan realisasinya 0,117 atau capaian kinerja sebesar 39%. Target kinerja tidak tercapai karena merupakan gabungan dari 12 indikator yang diantaranya adalah kepesertaan JKN.
 - 3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Indikator kinerja untuk Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat adalah persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tatanan Rumah Tangga. Adapun target capaian target kinerja Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tatanan Rumah Tangga pada tahun 2020 adalah 75%, sedangkan capaiannya adalah baru 51,14% artinya pada tahun 2020 dari 75% persen rumah tangga yang ada di Kabupaten Sumedang yang diharapkan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, baru 51,14% yang melaksanakannya, atau ada selisih 23,86%. Faktor utama yang menjadi penyebab tidak tercapainya PHBS pada tatanan rumah tangga adalah faktor kebiasaan (perilaku) merokok pada anggota keluarga yang masih tinggi.
 - 4) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

Indikator kinerja untuk Program Pengembangan Lingkungan Sehat adalah persentase jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan lingkungan sehat. Adapun capaian target kinerja Program Pengembangan Lingkungan Sehat pada tahun 2020 adalah 100%, artinya pada tahun 2020 dari 277 Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Sumedang seluruhnya (100%) mendapatkan pembinaan tentang lingkungan sehat.
 - 5) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, dan Surveilans Epidemiologi.
 - a. Indikator kinerja Program Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (%) tahun 2020 yaitu <0,04 dengan target sebesar <0,04 dan realisasinya <0,04 atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
 - b. Indikator kinerja Program Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (%) tahun 2020 yaitu <0,04 dengan target sebesar <0,04 dan realisasinya <0,04 atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
 - 6) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

Indikator kinerja untuk Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan adalah persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang ada di lingkup Dinas Kesehatan yang terakreditasi. Adapun capaian target kinerja Program obat dan perbekalan kesehatan pada tahun 2020 adalah 100%, artinya pada tahun 2020 dari 36 UPTD yang ada dilingkup Dinas Kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan (35 UPTD Puskesmas dan satu UPTD Labkesda) seluruhnya (100%) sudah terakreditasi.
 - 7) Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.

- a. Indikator kinerja Program Persentase Balita Stunting tahun 2020 yaitu 12,05 dengan target sebesar 26 dan realisasinya 12,05 atau capaian kinerja sebesar 152%. Target kinerja tercapai.
 - b. Indikator kinerja Program Jumlah Kematian Bayi tahun 2020 yaitu 137 dengan target sebesar 120 dan realisasinya 137 atau capaian kinerja sebesar 86%. Target kinerja disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan realokasi anggaran dan terkendalanya system rujukan, serta pemerataan dan kualitas SDM Kesehatan yang belum optimal.
 - c. Indikator kinerja Program Jumlah Kematian Bayi tahun 2020 yaitu 137 dengan target sebesar 120 dan realisasinya 137 atau capaian kinerja sebesar 86%. Target kinerja disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan realokasi anggaran dan terkendalanya system rujukan, serta pemerataan dan kualitas SDM Kesehatan yang belum optimal.
- 8) Program Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan.
Indikator kinerja Program adalah Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi tahun 2020 yaitu <0,04 dengan target sebesar <0,04 dan realisasinya <0,04 atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
 - 9) Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD.
Indikator program sasaran capaian indikator mutu pelayanan pada setiap bidang. Target indikator mutu pelayanan pada tahun 2020 sebesar 91 % telah terealisasi sebesar 90 %, sehingga capaian target hanya tercapai 98.90 % dari target yang telah ditetapkan, dengan realisasi anggaran sebesar 90.79 % besaran capaian 90 % tersebut dikarenakan adabeberapa capaian indikator mutu pelayanan yang masih belum mencapai target diantaranya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana data pada tabel dibawah ini.
 - 10) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.
Indikator kinerja capaian Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan sesuai kewenangan kelas B tahun 2020 yaitu dengan target sebesar 98% dan realisasinya 96.12% atau capaian kinerja sebesar 96,12%. Target kinerja tidak tercapai/tercapai/melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu pemenuhan peralatan alat-alat Kesehatan belum terpenuhi sesuai standar pemenuhan tenaga Kesehatan antara lain Dokter spesialis dan Dokter Sub Spesialis belum terpenuhi. Solusi / rekomendasi adalah pemenuhan peralatan alat – alat Kesehatan sesuai standar pelayanan yang ada pada Permenkes No.56 Tahun 2014 Tentang Klarifikasi dan Perjanjian Rumah Sakit, Pemenuhan tenaga Kesehatan antara lain: Dokter spesialis dan Dokter Sub Spesialis.
 - 11) Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD.
Indikator program sasaran capaian indikator mutu pelayanan pada setiap bidang. Target indikator mutu pelayanan pada tahun 2020 sebesar 91 % telah terealisasi sebesar 90 %, sehingga capaian target hanya tercapai 98.90 % dari target yang telah ditetapkan, dengan realisasi anggaran sebesar 90.79 % besaran capaian 90 % tersebut dikarenakan adabeberapa capaian indikator mutu pelayanan yang masih

belum mencapai target diantaranya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana data pada tabel dibawah ini.

- 12) Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
Indikator Kinerja Program Kesehatan Reproduksi Remaja tahun 2020 yaitu Rata-rata Usia Kawin Pertama wanita dengan target sebesar 19.7 Tahun dan realisasinya 21.29 tahun atau capaian kinerja sebesar 108.07% dapat diartikan pencapaian tinggi.
- 13) Program Pembinaan, Pemasyarakatan, dan Pengembangan Olahraga.
Indikator kinerja Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga tahun 2020 yaitu Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dengan target sebesar 20 Atlet dan realisasinya `21 Atlet atau capaian kinerja sebesar 105%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu terbatasnya penyelenggaraan event olah raga.solusi/rekomendasinya adalah memperbanyak event/kompetisi olahraga, agar bermunculan bibit-bibit atlet baru yang lahir dari event/kompetisi tersebut, fasilitas sarana prasarana olahraga.

b. Penunjang Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah, yaitu :

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.
Indikator kinerja Program tahun 2020 yaitu Persentase Siswa Paud Untuk Melanjutkan Kejenjang SD/MI dengan target sebesar 100 dan realisasinya 101,87 atau capaian kinerja sebesar 101,87%. Target kinerja melebihi target.
- 2) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Indikator kinerja Program tahun 2020 yaitu Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dengan target sebesar 98,00 dan realisasinya. 94,50 atau capaian kinerja sebesar 96,42%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu guru yang berijazah DIV/S1 paling banyak di Paud sehingga indikayot ini tidak mencapai target solusi/rekomendasinya adalah adanya perhatian dari pemerintah tentang guru yang belum berijazah DIV/S1.
- 3) Program Kesetaraan.
 1. Indikator kinerja Program tahun 2020 yaitu Sekolah Angka Partisipasi Kasar Paket A dengan target sebesar 0,04 dan realisasinya 0,06 atau capaian kinerja sebesar 143,71%. Target kinerja melebihi target.
 2. Indikator kinerja Program tahun 2020 yaitu Angka Partisipasi Kasar Paket B dengan target sebesar 0,50 dan realisasinya 0,45 atau capaian kinerja sebesar 90,73%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu belum dilaksanakannya kerjasama dengan kecamatan dan desa tentang jumlah angka putus sekolah atau tidak sekolah solusi/rekomendasinya adalah melakukan evaluasi dan kerjasama dengan Kecamatan dan Desa
 3. Indikator kinerja Program tahun 2020 yaitu Angka Partisipasi Kasar Paket C dengan target sebesar 2,93 dan realisasinya 0,05 atau capaian kinerja sebesar 1,38%. Target kinerja tidak tercapai target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu belum dilaksanakannya kerjasama dengan kecamatan dan desa tentang jumlah angka putus sekolah atau tidak sekolah solusi/rekomendasinya

adalah melakukan evaluasi dan kerjasama dengan Kecamatan dan Desa

4) Program Pendidikan Dasar

1. Indikator kinerja Program tahun 2020 yaitu Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs dengan target sebesar 119,25 dan realisasinya 110,16 atau capaian kinerja sebesar 92,38%. Target kinerja tidak tercapai target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu terlalu besar penentuan target awal solusi/rekomendasinya adalah perubahan target.
2. Indikator kinerja Program tahun 2020 yaitu Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA dengan target sebesar 89,21 dan realisasinya 114,19 atau capaian kinerja sebesar 128%. Target kinerja melebihi target.
3. Indikator kinerja Program tahun 2020 yaitu Angka Putus Sekolah (APS) SD dengan target sebesar 0,07 dan realisasinya 0% atau capaian kinerja sebesar 0%. Target kinerja tercapai target.
4. Indikator kinerja Program tahun 2020 yaitu Angka Putus Sekolah (APS) SMP dengan target sebesar 0,79 dan realisasinya 0% atau capaian kinerja sebesar 0%. Target kinerja tercapai
5. Indikator kinerja Program tahun 2020 yaitu Sekolah pendidikan Dasar Kondisi Bangunan baik dengan target sebesar 29,50 dan realisasinya 37,92 atau capaian kinerja sebesar 128%. Target kinerja melebihi target.

5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Indikator kinerja Program tahun 2020 yaitu Cakupan Pelayanan Pendidikan dengan target sebesar 87,17 dan realisasinya 86,30 atau capaian kinerja sebesar 99,00%. Target kinerja tidak tercapai.

c. Penunjang Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin, yaitu :

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Indikator kinerja Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya tahun 2020 yaitu Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Sejenisnya dengan target sebesar 4,01% dan realisasinya 3,46% atau capaian kinerja sebesar 86,28%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 - Adanya pengurangan sasaran calon Penerima Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) non DTKS sebanyak 52 KUBE Non DTKS pada Kegiatan Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
 - Pengurangan Biaya kegiatan karena adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid-19. Solusi/rekomendasinya adalah :
 - a) Melakukan revisi biaya dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan rutin;
 - b) Melakukan kegiatan secara *cross cutting* lintas bidang dan lintas OPD;

- c) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan kementerian Sosial/Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat untuk menambah calon sasaran penerima bantuan sosial.
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
Indikator kinerja Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tahun 2020 yaitu:
- a. Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar dengan target sebesar 26,17% dan realisasinya 57,02% atau capaian kinerja sebesar 217,88%. Target kinerja tidak melebihi target.
 - b. Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya
Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya dengan target sebesar 20,74% dan realisasinya 3,62% atau capaian kinerja sebesar 17,45%. Target kinerja tidak tercapai/tercapai/melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu pada tahun 2020 tidak dilaksanakan penjangkauan dikarenakan pandemic Covid-19 dan untuk pelayanan orang dengan HIV/AIDS bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Solusi/rekomendasinya adalah melakukan koordinasi kepada komunitas yang membidangi HIV/AIDS.
 - c. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya dengan target sebesar 24,05% dan realisasinya 79,96% atau capaian kinerja sebesar 332,47%. Target kinerja tidak tercapai/tercapai/melebihi target.
 - d. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya dengan target sebesar 20,54% dan realisasinya 9,20% atau capaian kinerja sebesar 44,79%.
 - e. Persentase PMKS yang diRehabilitasi dengan target sebesar 20% dan realisasinya 8,24% atau capaian kinerja sebesar 41,18%. Target kinerja tercapai.
- 3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
Indikator kinerja Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial tahun 2020 yaitu Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan sosial yang aktif dengan target sebesar 58,33% dan realisasinya 58,33% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu terdapat salah satu PSKS yang memiliki kendala adalah sebagai berikut:
- a. Kegiatan Karang Taruna yang masih bersifat mendaur ulang kegiatan yang sudah ada sebelumnya dan hanya menjadi sekedar pengisi waktu luang;
 - b. Kurangnya SDM Profesional;
 - c. Kurangnya dukungan dari Pemerintah Desa terhadap potensi Karang Taruna sehingga sedikit diberi peluang pada peningkatan pembangunan
- Solusi/rekomendasinya adalah:
- a. Pembinaan kepada Lembaga Karang Taruna mulai dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
 - b. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Karang Taruna secara berjenjang;
 - c. Update data mulai dari SK, Susunan Kepengurusan dan Anggota;
 - d. Memberikan reward buat anggota Karang Taruna yang aktif;

e. Kaji Banding kedaerah lain yang kegiatan kepengurusan Karang Taruna telah berjalan dengan baik dan berinovasi.

4) Program Perlindungan Sosial.

Indikator kinerja Program Perlindungan Sosial tahun 2020 yaitu Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu:

- a. Minimnya anggaran Buffer Stock untuk dana Kebencanaan;
- b. Kampung Siaga Bencana tidak berjalan dengan baik;
- c. Kurangnya keahlian khusus Anggota Tagana.

solusi/rekomendasinya adalah:

- a. Penambahan pagu anggaran Buffer Stock;
- b. Dilakukan penguatan/pembinaan untuk Kampung Siaga Bencana se Kab. Sumedang;
- c. Bintek atau pelatihan keahlian khusus untuk Tagana.

5) Program Jaminan Sosial.

Indikator kinerja Program Jaminan Sosial tahun 2020 yaitu Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial dengan target sebesar 53,24% dan realisasinya 43.15% atau capaian kinerja sebesar 81.05%. Target kinerja tidak tercapai/tercapai/melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu tidak validnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). Solusi/rekomendasinya adalah dilakukan update dan pemadanan data.

d. Penunjang Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender, yaitu Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

Indikator kinerja Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak pada tahun 2020 yaitu:

- a. Persentase OPD Responsif Gender dengan target sebesar 33,87% dan realisasinya 33,87% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Rencana aksi yang akan dilakukan adalah pelatihan responsive gender/GAP-GBS telah dilakukan kepada 28 Dinas/Badan/Kantor, 26 Kecamatan, 7 Kelurahan, 22 Desa (Tahun 2020), 80 Desa di Tahun 2021.
- b. Jumlah Kebijakan Pengarusutamaan Gender yang dihasilkan dengan target sebesar 4 Perda/Perbup dan realisasinya 2 Perda/Perbup atau capaian kinerja sebesar 50%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu tidak ada anggaran untuk kajian ilmiah, studi banding, rapat2 di DPRD yang membutuhkan dana kurang lebih 250 juta.

Solusi/rekomendasinya adalah penambahan pagu anggaran untuk kegiatan Kebijakan Pengarusutamaan Gender.

e. Penunjang Capaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender, yaitu :

1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Indikator kinerja Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2020 yaitu:

- a. Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu:
 - Masih kurang optimalnya kapasitas SDM pemberi layanan;
 - Tenaga psikolog hanya 2 orang dalam penanganan kasus;
 - Masih kurang optimalnya jejaring petugas pemberi layanan (belum sampai tingkat desa).
Solusi/rekomendasinya adalah Pelatihan pendampingan awal psikososial sehingga petugas pemberi layanan bisa melakukan pendampingan awal pada klien tidak terpaku pada peksos dan psikolog.
 - b. Persentase Kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak dengan target sebesar 30,77% dan realisasinya 44,23% atau capaian kinerja sebesar 143,74%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu belum optimalnya sosialisasi sampai ke tingkat desa dan masih kurang optimalnya koordinasi antar OPD terkait (DinsosPPPA, Kecamatan, Disdik)
Solusi/rekomendasinya adalah mengoptimalkan koordinasi, dan sosialisasi dengan membentuk tim koordinasi.
- 2) Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga.
Indikator kinerja Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yaitu Persentase Perempuan yang Mendapatkan Pemberdayaan dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga dengan target sebesar 15,07% dan realisasinya 14,40% atau capaian kinerja sebesar 95,55%. Target kinerja tidak tercapai/tercapai/melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Keterbatasan anggaran dalam meningkatkan ekonomi keluarga melalui PEKKA. Solusi/rekomendasinya adalah Penambahan Pagu Anggaran tentang PEKKA (bantuan permodalan usaha dan pemasarannya).
 - 3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.
Indikator kinerja Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan yaitu Persentase Organisasi Wanita yang aktif dengan target sebesar 33,33% dan realisasinya 28,57% atau capaian kinerja sebesar 85,72%. Target kinerja tidak tercapai/tercapai/melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu keterbatasan kemampuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan
solusi/rekomendasinya adalah Meningkatkan kemampuan professional melalui diklat dan sosialisasi.

f. Penunjang Capaian Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama, yaitu :

- 1) Program Pendidikan Politik Masyarakat.
Realisasi Indikator Kinerja Program Pendidikan Politik sebesar 79% dari target sebesar 80,65%, dengan capaian kinerja sebesar 97,95%. Hal ini dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkades belum optimal. Karena kondisi situasi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan masyarakat takut untuk melaksanakan atau memberikan hak suara ke Tempat Pemungutan Suara. Solusinya yaitu meningkatkan koordinasi

dan komunikasi ke masyarakat yang akan menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa serentak di kabupaten sumedang; dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait (aparatur desa) untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten sumedang. Selain itu perlu menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan KPU, partai politik, camat dan kepala desa untuk memberikan sosialisasi tentang arti pentingnya melaksanakan pemilihan umum, Pilkada, Pilkades dan Pilpres.

- 2) Program Kelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan.
Indikator kinerja Program Kelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan tahun 2020 yaitu Persentase Pemeliharaan TMP Daerah dan Nasional dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tidak tercapai/tercapai/melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu pemeliharaan TMP Cimayor masih kurang maksimal sesuai dengan Standart Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional, karena pembiayaan pemeliharaan hanya cukup untuk digunakan pemeliharaan rutin belum manjangkau untuk kegiatan rehab fisik. Solusi/rekomendasinya adalah:
 - a. Melakukan kegiatan secara *cross cutting* lintas bidang, lintas OPD dan dengan organisasi masyarakat/lembaga masyarakat lainnya;
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Kementerian Sosial/Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat untuk Membantu kegiatan Pemeliharaan TMP.
- 3) Program Kewaspadaan Nasional.
Realisasi Indikator Kinerja Program Kewaspadaan Nasional sebesar 100% dari target sebesar 100%, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini didukung oleh terjalinya Komunikasi dan Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerja; Terciptanya kondisi kondusif dari Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan yang mengganggu stabilitas keamanan; serta Masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan perayaan hari-hari besar keagamaan dan pelaksanaan pilkades dengan diterjunkannya aparat dari unsur vertikal dan unsur terkait.
- 4) Program Kerukunan Umat Beragama.
Realisasi Indikator Kinerja Program Kerukunan Umat Beragama sebesar 72,2 (n.a) Persen dari target sebesar 73 Persen, dengan capaian kinerja sebesar 98,6 persen. Terciptanya toleransi antar umat beragama dalam membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan umat beragama.
- 5) Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
Indikator kinerjanya adalah Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani dengan capaian kinerja tahun 2020 telah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari pencapaian target tahun 2020 sebesar 100%, seluruh kasus yang dilaporkan masyarakat dan atau hasil temuan dapat selesai seluruhnya, hal ini berkat kerja keras dari aparatatur Satuan Polisi Pamong Praja serta terjalinnya koordinasi yang baik dengan instansi terkait.
- 6) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2020 yaitu Cakupan Penanggulangan Bencana dan Persentase Masalah Trantibum yang Ditangani dengan Baik dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.

- 7) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
Indikator kinerjanya adalah Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dengan capaian kinerja tahun 2020 telah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari pencapaian target tahun 2020 sebesar 100% dari target 100 %, keberhasilan tersebut adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berupa ketersediaan dana yang dibutuhkan serta adanya koordinasi yang kuat antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Instansi Terkait.
- 8) Program Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Diniyah Kabupaten.
Indikator kinerja Program tahun 2020 yaitu Persentase siswa yang berpartisipasi aktif dalam pendidikan Diniyah target sebesar 100 dan realisasinya 100 atau capaian kinerja sebesar 100%.

g. Penunjang Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi, yaitu :

- 1) Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan.
Indikator kinerja Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan tahun 2020 yaitu. Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan target sebesar 42,12 % dan realisasinya. 33,29%.atau capaian kinerja sebesar 79,3 %. Target kinerja kurang dari 100%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu..belum meratanya alokasi anggaran untuk tiap tiap kegiatan yang membidik terhadap capaian indikator ini. solusi/rekomendasinya adalah harus dibangunnya kesamaan pemikiran terhadap pentingnya dukungan alokasi anggaran terhadap kegiatan yang membidik terhadap capaian indikator kegiatan.
- 2) Program Pelayanan Bidang Perhubungan, Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Lalu-Lintas Angkutan Jalan.
Indikator kinerja Program Pelayanan Bidang Perhubungan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan tahun 2020.
- 3) Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah.
Indikator kinerja Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah tahun 2020 yaitu Persentase peningkatan jumlah investor dengan target sebesar 30% dan realisasinya 0% atau capaian kinerja sebesar 0%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu terjadinya penurunan minat investasi di Kabupaten Sumedang sebagai dampak Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia. solusi/rekomendasinya adalah : Menyusun kebijakan yang ramah invesstasi; Identifikasi potensi investasi berdasarkan data perizinan tahun sebelumnya; Identifikasi potensi realisasi investasi proyek strategis Nasional (Jalan Tol); Pemberdayaan UMKM; dan Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
- 4) Program Peningkatan Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal.
Indikator kinerja Program Peningkatan Promosi Dan Kemitraan Penanaman Modal tahun 2020 yaitu Persentase Kerjasama

Penanaman Modal yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu masih terbatasnya data potensi investasi unggulan yang siap untuk dipromosikan dan sesuai dengan kebutuhan investor dan upaya promosi investasi lebih banyak mengandalkan pameran yang bersifat konvensional. Solusi/rekomendasinya adalah : Melakukan koordinasi penyusunan data potensi investasi; Promosi potensi investasi melalui website : sumedanggoinvestasi.go.id; Promosi potensi investasi melalui media social; Pemeliharaan website dan media social; Promosi potensi investasi melalui pameran APKASI; Promosi potensi investasi melalui LED TV di MPP Kabupaten Sumedang; dan Promosi potensi investasi melalui media elektronik televisi.

- 5) Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan PTSP. Indikator kinerja Program Pengendalian Dan Pengawasan Penanaman Modal Dan PTSP tahun 2020 yaitu Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP dengan target sebesar 60% dan realisasinya 60% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai sesuai target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu masih rendahnya pemahaman investor mengenai tatacara menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal. Solusi/rekomendasinya adalah Peningkatan Kepatuhan investor menyampaikan LKPM melalui : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal; Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 6) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
 1. Indikator kinerja program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2020 yaitu Jumlah produksi Tanaman Pangan :a.padi b.tanaman pangan lainnya dengan target sebesar Tanaman Pangan : a. Padi : 361.951 Ton b. Tanaman Pangan Lainnya 245.812 Ton dan realisasinya: a. Padi : 443,716 Ton atau capaian kinerja sebesar 122,60% b. Tanaman Pangan Lainnya 221.070 Ton atau capaian kinerja sebesar 89,93 %. Realisasi kinerja jumlah produksi tanaman padi melebihi target sedangkan jumlah produksi tanaman pangan lainnya tidak mencapai target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dampak sosial dan ekonomi akibat pandemic Covid-19 sehingga banyak aktivitas yang terganggu dan di lapangan masyarakat/petani lebih memilih menanam tanaman padi daripada tanaman pangan yang lain dengan alasan untuk pemenuhan bahan pokok utama karena dikhawatirkan ketahanan pangan menurun. Solusi/rekomendasinya adalah pembinaan maksimal terhadap Kelompok tani komoditas tanaman pangan di lapangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian merupakan sector yang tidak berhenti pada masa pandemic covid- 19. Indikator kinerja Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2020 yaitu Jumlah produksi Tanaman Hortikultura dengan target sebesar 154.372 ton dan realisasinya 235.738 ton atau capaian kinerja sebesar 152,7 %. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa

aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sector yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refokusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan. Solusi/rekomendasinya adalah pembinaan maksimal terhadap Kelompok tani komoditas hortikultura di lapangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian merupakan sector yang tidak berhenti pada masa pandemic covid-19.

2. Indikator kinerja Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan tahun 2020 yaitu jumlah produksi Tanaman Perkebunan dengan target sebesar 6.592 ton dan realisasinya 18.955 .atau capaian kinerja sebesar 287%. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target :dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sector yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refokusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan. Solusi/rekomendasinya adalah pembinaan maksimal terhadap tani komoditas perkebunan di lapangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian merupakan sector yang tidak berhenti pada masa pandemic covid-19.

7) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.

a. indikator kinerja Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan pertanian/perkebunan tahun 2020 yaitu Jumlah penambahan alat mesin pertanian (Unit) dengan target sebesar 6.352 unit dan realisasinya 6.064 unit atau capaian kinerja sebesar 95,47%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sector yang terhambat dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refokusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung program Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan. Solusi/rekomendasinya adalah optimalisasi kegiatan dan pembinaan di lapangan agar outcome dari program hasil dari input berbagai kegiatan optimal dan terasa dampaknya di masyarakat

b. indikator kinerja Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan pertanian/perkebunan tahun 2020 yaitu Luas lahan pertanian yang terairi (Hektar) dengan target sebesar 2.350 ha dan realisasinya 5.029,98 ha atau capaian kinerja sebesar 214,04 %. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur

distribusi yang terbatas serta banyak sector yang terhambat dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung program Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan. Solusi/rekomendasinya adalah optimalisasi kegiatan dan pembinaan di lapangan agar outcome dari program hasil dari input berbagai kegiatan optimal dan terasa dampaknya di masyarakat

- c. Indikator kinerja Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan pertanian/perkebunan tahun 2020 yaitu Jumlah penambahan panjang jalan pertanian (Km) dengan target sebesar 92 km dan realisasinya 77,801 atau capaian kinerja sebesar 84,57%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sector yang terhambat dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung program Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan. Solusi/rekomendasinya adalah optimalisasi kegiatan dan pembinaan di lapangan agar outcome dari program hasil dari input berbagai kegiatan optimal dan terasa dampaknya di masyarakat.
- 8) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan.
- a. Indikator kinerja Program pengolahan dan pemasararan hasil pertanian/perkebunan tahun 2020 yaitu Jumlah Peningkatan Kelompok Tani Pengolah Hasil Pertanian dengan target sebesar 138 kelompok dan realisasinya 134 atau capaian kinerja sebesar 97,10.%. Target kinerja tidak tercapai/tercapai/melebihi target . Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sector yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung pengolahan dan pemasararan hasil pertanian/perkebunan. Solusi/rekomendasinya adalah optimalisasi kegiatan dan pembinaan di lapangan agar outcome dari program hasil dari input berbagai kegiatan optimal dan terasa dampaknya di masyarakat.
 - b. Indikator kinerja Program pengolahan dan pemasararan hasil pertanian/perkebunan tahun 2020 yaitu Jumlah dokumen kerjasama kemitraan usaha kelompok tani dengan target sebesar 58 dokumen dan realisasinya 52 atau capaian kinerja sebesar 89,66 %. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sector yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system

perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung pengolahan dan pemasaran hasil pertanian/perkebunan. Solusi/rekomendasinya adalah optimalisasi kegiatan dan pembinaan di lapangan agar outcome dari program hasil dari input berbagai kegiatan optimal dan terasa dampaknya di masyarakat

- 9) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.
- a. Indikator kinerja Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan tahun 2020 yaitu Jumlah teknologi pertanian yang diadopsi petani dengan target sebesar 9 teknologi penyuluhan dan realisasinya 12 atau capaian kinerja sebesar 133,33%. Target kinerja tidak tercapai/tercapai/melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan. Adanya pembatasan orang untuk berkumpul juga menjadi tantangan tersendiri bagi kegiatan Penyuluhan serta Dampak Covid-19 mempengaruhi sistem perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung pengolahan dan pemasaran hasil pertanian/perkebunan. Solusi/rekomendasinya adalah optimalisasi kegiatan penyuluhan dan pembinaan di lapangan dan penggunaan saran Informasi Teknologi agar outcome dari program hasil dari input berbagai kegiatan optimal dan terasa dampaknya di petani.
 - b. Indikator kinerja Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan tahun 2020 yaitu Penumbuhan Kelompok Tani Baru dengan target sebesar 550 kelompok dan realisasinya 474 atau capaian kinerja sebesar 86,18%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan. Adanya pembatasan orang untuk berkumpul juga menjadi tantangan tersendiri bagi kegiatan Penyuluhan terutama pembentukan kelompok yang memerlukan pengumpulan orang di suatu tempat. Solusi/rekomendasinya adalah optimalisasi kegiatan penyuluhan dan pembinaan di lapangan dan penggunaan saran Informasi Teknologi agar outcome dari program hasil dari input berbagai kegiatan optimal dan terasa dampaknya di petani. Indikator kinerja Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan tahun 2020 yaitu Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok Pelaksana Kegiatan Penyuluhan dengan target sebesar : 2.242 kelompok: pemula:757 keltan lanjut:1407 keltan madya:74 keltan utama:4 keltan dan realisasinya sebesar : 2.900 kelompok: pemula: 1360 keltan lanjut:1394 keltan madya:61 keltan utama: 1 keltan atau capaian kinerja sebesar 96,54 %. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan. Adanya pembatasan orang untuk berkumpul juga menjadi tantangan tersendiri bagi kegiatan Penyuluhan dan tentunya sangat mempengaruhi penilaian kelas kemampuan kelompok tani.

Solusi/rekomendasinya adalah optimalisasi kegiatan penyuluhan dan pembinaan dilapangan dan penggunaan saran Informasi Teknologi agar outcome dari program hasil dari input berbagai kegiatan optimal dan terasa dampaknya di petani.

- 10) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.
- Indikator kinerja Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan tahun 2020 yaitu Persentase Ketersediaan Pangan Utama dengan target sebesar 100 % dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dampak sosial dan ekonomi akibat pandemic Covid-19 solusi/rekomendasinya adalah perkuatan cadangan pangan masyarakat.
 - Indikator kinerja Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan tahun 2020 yaitu Persentase Ketersediaan energi dan protein per kapita dengan target sebesar 93,35 % dan realisasinya 93,35% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dampak sosial dan ekonomi akibat pandemic Covid-19 solusi/rekomendasinya adalah pemenuhan gizi masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk konsumsi sendiri maupun sebagai tambahan penghasilan keluarga dalam rangka pemenuhan konsumsi.
 - Indikator kinerja Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan tahun 2020 yaitu Persentase Pembinaan dan Pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan dengan target sebesar 100 % dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai makanan (khususnya pangan dari hasil pertanian segar maupun olahan pangan segara) yang aman (bebas dari zat kimia berbahaya) masih rendah solusi/rekomendasinya adalah melakukan sosialisasi baik dengan kegiatan langsung maupun tidak langsung mengenai Makanan yang sehat dan aman.
- 11) Program Peningkatan Produksi Perikanan.
- Capaian indikator kinerja program yaitu peningkatan produksi ikan konsumsi, ikan hias dan benih ikan pada tahun 2020 sudah sesuai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan yakni ikan konsumsi 102,83%, ikan hias 100,64% dan benih ikan 101,51%.
- 12) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
- Capaian indikator kinerja program yaitu jumlah unit pengolahan dan pemasaran perikanan yang terbina pada tahun 2020 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 52 unit atau 100 persen. Hal ini karena peran kerjasama antar stakeholder, dukungan anggaran dan peran para petugas di lapangan (UPTD dan para penyuluh perikanan). Unit pengolahan dan pemasaran perikanan meliputi kelompok pengolah, kelompok pemasar, pedagang hasil olahan dan lain-lain dengan pembinaan meliputi sosialisasi, monitoring dan evaluasi, dan pemberian stimulan (sarana prasarana pengolahan dan pemasaran).
- 13) Program Kesehatan Lingkungan Ikan dan Konservasi.
- Capaian indikator kinerja program yaitu persentase kelestarian lingkungan budidaya perikanan pada tahun 2020 sudah sesuai target

yang telah ditetapkan, hal ini berarti bahwa kelestarian lingkungan budidaya perikanan di wilayah perairan Kabupaten Sumedang masih terpelihara sehingga dapat mendukung untuk budidaya perikanan. Hal ini sebagai adanya bentuk kerjasama berbagai stakeholder baik di pemerintahan maupun dari peran masyarakat sekitar perairan umum, khususnya di Wilayah Waduk Jatigede yang berperan dalam pengawasan (Kelompok Masyarakat Pengawas).

14) Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Hewan.

Capaian indikator kinerja program yaitu persentase pengendalian penyakit hewan pada tahun 2020 mencapai 100 persen. Tercapainya target pengendalian penyakit hewan terjadi karena adanya beberapa faktor pendukung yaitu: optimalisasi pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan zoonosis melalui program vaksinasi.

15) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Capaian indikator program yaitu persentase jaminan keamanan Pangan Asal Hewan (PAH) yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini karena adanya beberapa faktor pendukung yaitu : Sosialisasi yang cukup baik kepada masyarakat, dukungan anggaran yang cukup, serta adanya kerjasama yang baik dari para stakeholder. Hal ini menunjukkan bahwa Produk Pangan Asal Hewan layak dan halal dikonsumsi masyarakat.

16) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

Capaian indikator kinerja program yaitu jumlah populasi ternak dan jumlah produksi peternakan secara umum sudah cukup baik dengan rata-rata capaian di atas 80%, kecuali untuk capaian populasi domba (78,11 persen) dan capaian produksi susu (63,92 persen). Capaian populasi domba yang kecil (78,11 persen) diperkirakan banyak yang dijual, apalagi di kondisi pandemi, karena domba bagi para peternak merupakan tabungan yang sewaktu-waktu mudah dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pencapaian produksi susu yang hanya 63,92 persen karena populasi sapi perah juga mengalami penurunan. Hal ini karena harga jual susu kurang menguntungkan atau tidak sesuai dengan biaya produksi, terutama untuk pakan konsentrat. Selain itu juga karena permasalahan produktifitas sapi perah induk. Jumlah peternak sapi perah juga sudah semakin berkurang, karena usianya sudah cukup tua dan tidak ada penerusnya.

17) Program Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

Capaian indikator kinerja program yaitu jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran yang terbina sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, malah melebihi target. Hal ini karena adanya dukungan anggaran yang cukup dan juga kerja sama yang baik dari aparat dan unit usaha terkait serta adanya koordinasi yang baik antar stakeholder terkait. Usaha pengolahan dan pemasaran peternakan meliputi para pelaku usaha (pedagang ternak/ produk peternakan, peternak/ kelompok ternak, Tempat Pemotongan Hewan, Pasar Hewan dan lain-lain dengan upaya pembinaan meliputi penyuluhan, monitoring evaluasi, sosialisasi, pemberian stimulan (sarana prasarana pengolahan dan pemasaran), dan lain-lain.

18) Program Peningkatan Sarana Hubungan Industrial.

Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan target sebesar 100 % dan realisasinya 100 % atau capaian kinerja sebesar 100 %. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kemitraan sejajar antara pekerja dan pengusaha yang keduanya mempunyai kepentingan yang sama yaitu bersama-sama ingin meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan perusahaan serta tanggap terhadap kondisi sosial, upah, produktivitas, dan kesejahteraan pekerja dan saling mengembangkan forum komunikasi, musyawarah dan kekeluargaan.

19) Program Pengembangan Sentra –Sentra Industri Potensial.

Indikator kinerja program yaitu laju pertumbuhan sub sektor industri pengolahan dengan target sebesar 5,35% dan realisasinya 11,51% atau capaian kinerja sebesar 215,14%. Pencapaian kinerja telah melebihi target.

20) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

Indikator kinerja program yaitu laju pertumbuhan sub sektor industri pengolahan dengan target sebesar 5,35% dan realisasinya 11,51% atau capaian kinerja sebesar 215,14%. Pencapaian kinerja telah melebihi target.

21) Program Pengembangan Kepariwisata.

Indikator kinerja Program Pengembangan Kepariwisata tahun 2020 yaitu meningkatnya jumlah wisatawan dengan terget sebesar 717.800 pengunjung dan realisasinya 881.822 pengunjung atau capaian kinerja sebesar 122%. Target Kinerja tercapai melebihi target, hal ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan : Promosi pariwisata nusantara; Temu sektor pendukung pariwisata; Pengembangan informasi dan pemutakhiran database kepariwisataan; Pengembangan Desa Wisata;. Penyusunan Kebijakan dan perencanaan Teknis Pengembangan Destinasi Wisata; Peningkatan Sumber Daya Manusia Sektor Wisata; Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata; serta Pengembangan Destinasi Wisata.

22) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Indikator kinerja Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan tahun 2020 yaitu laju pertumbuhan sub sector perdagangan besar dan eceran dengan target sebesar 5,19% dan realisasinya 4,89% atau capaian kinerja sebesar 94,61%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya kontribusi dari sektor perdagangan solusi/rekomendasinya adalah memberikan pembinaan dan pengawasan/monitoring dan evaluasi dari sektor perdagangan.

23) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Indikator kinerja Program Pengelolaan Kekayaan Budaya tahun 2020 yaitu Cakupan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 115% atau capaian kinerja sebesar 115%. Target kinerja Tercapai, hal ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan : Festival kebudayaan daerah; Penyusunan kebijakan tentang kebudayaan daerah; Pemberian penghargaan kepada pelaku seni budaya sumedang; Perlindungan terhadap potensi budaya daerah kabupaten sumedang melalui haki; Pendataan potensi kebudayaan kabupaten sumedang; Pengelolaan gedung kesenian; Pelestarian adat budaya daerah; Peningkatan

kapasitas sdm kebudayaan; Pengadaan sarana/prasarana kesenian; Penguatan kelembagaan kebudayaan; serta Kegiatan Dapes, Ngarumat Jagat, Ngurasumur Cikajayaan Dilaksanakan dengan anggaran non APBD.

24) Program Pengendalian Banjir

Indikator kinerja Program Pengendalian Banjir tahun 2020 yaitu Persentase pembangunan turap di wilayah sungai rawan longsor dengan target sebesar 19,20 % dan realisasinya 18,95% tidak ada kenaikan dari tahun 2019 .Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Tidak adanya Penanganan Sungai pada Tahun 2020.

h. Penunjang Capaian Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap, yaitu Program Penanganan Jalan dan Jembatan.

Indikator kinerja Program tahun 2020 yaitu Persentase Tingkat Kondisi Jalan kabupaten Mantap dengan target sebesar 70.80% dan realisasinya 76.96% atau capaian kinerja sebesar 108.70 %. Target kinerja melebihi target dikarenakan :

- a. Meningkatnya nilai kegiatan pemeliharaan rutin;
- b. Adanya kegiatan Unit Reaksi Cepat Tambal Lubang (URCTL);
- c. Meningkatnya Anggaran Perbaikan Jalan baik dari Dana Insentif Daerah (DID) maupun Bantuan Provinsi (Banprov) terutama di perubahan anggaran Tahun 2020.
- d. Kualitas database jalan dan jembatan semakin baik;
- e. Survey database dilakukan oleh konsultan (Pihak Ke 3);
- f. Adanya dukungan anggaran survey database pada alokasi perubahan;
- g. Adanya kegiatan Sistem Informasi Pengelolaan Data Jalan Daerah (SIPDJD) yang dilaksanakan oleh Kemeterian PUPR setiap awal tahun.

i. Penunjang Capaian Kinerja Rasio Jaringan Irigasi, yaitu Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan.

Indikator kinerja Program tahun 2020 yaitu Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan target sebesar 44.80% dan realisasinya 43.79% atau capaian kinerja sebesar 97.74 %. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu adanya Rasionalisasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19 Sehingga mengurangi jumlah panjang penanganan jaringan irigasi.

j. Penunjang Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu :

1) Program Penataan Ruang.

Indikator kinerja Program tahun 2020 yaitu Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Tata Ruang dengan target sebesar 100% dan realisasinya 75.11% atau capaian kinerja sebesar 75.11 %. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena :

- a. Kawasan lindung kurang lebih 49.587 Ha (Diatur dalam pola ruang Perda No. 4 Tahun 2018), REkomendasi KP2B 30.069 Ha, KPH Sumedang terbentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 60/B.XII/PD/SK/68 Tanggal 14 Pebruari 1968 Tentang Pembentukan Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Sumedang dengan luas 36.547,39 Ha

- b. Data informasi ruang yang dikeluarkan seluas 868.247 Ha telah sesuai peruntukannya dengan RTRW;
 - c. Total kesesuaian 117.071,64 Ha.
- 2) Program Pembinaan Jasa Konstruksi.
Indikator kinerja Program tahun 2020 yaitu Persentase tersedianya usaha Jasa Konstruksi yang terverifikasi dengan target sebesar 40% dan realisasinya 40.06% atau capaian kinerja sebesar 100.15 %. Target kinerja melebihi target dikarenakan:
- a. Dilakukannya sosialisasi kepada penyedia Jasa konstruksi mengenai manfaat mengisi data dan mengupdate data perusahaannya di Aplikasi SIMJAKON;
 - b. Dilakukannya survey kelapangan untuk memperoleh data penyedia jasa konstruksi di kabupaten Sumedang lebih maksimal;
 - c. Adanya penambahan anggaran perubahan untuk kegiatan bimbingan teknis dan sertifikat tenaga teknis terampil Jasa Konstruksi;
 - d. Adanya kesadaran dari penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Sumedang untuk mendaftarkan diri dan menginput serta mengupdate data perusahaannya di Aplikasi SIMJAKON.
- 3) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
Indikator kinerja Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku tahun 2020 yaitu Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dengan target sebesar 83% dan realisasinya 80,45% atau capaian kinerja sebesar 96,92%. Target kinerja tidak Tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu terbatasnya ketersediaan lahan masyarakat. solusi/rekomendasinya adalah menciptakan kerjasama secara optimal dari stakeholder yang ada sehingga dapat berkontribusi positif untuk penyediaan air baku.
- 4) Program Pengembangan dan Penataan Wilayah
Indikator kinerja Program Pengembangan dan Penataan Wilayah tahun 2020 yaitu Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertata dengan target sebesar 48,75% dan realisasinya 58,75% atau capaian kinerja sebesar 78,90%. Target kinerja tercapai, pada prinsipnya pencapaian ini secara akumulasi angka sudah terpenuhi dan masih harus dilakukan peningkatan capaian secara progresif demi tertatanya wilayah secara merata.
- 5) Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Indikator kinerja Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2020 yaitu persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan target sebesar 81,33% dan realisasinya 80,34% atau capaian kinerja sebesar 98,78%. Dan Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh dengan target sebesar 0,27% dan realisasinya 0,30% atau capaian kinerja sebesar 90%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu masih kurangnya ketersediaan dana dari Sumber dana Banprop dengan menggunakan pemetaan kuota kabupaten/kota sebagai pemohon kegiatan. solusi/rekomendasinya adalah mengajukan usulan perbaikan dan penambahan kuota.
- 6) Program Penyediaan Sarana dan Pengelolaan Limbah Domestik
Indikator kinerja Program Penyediaan Sarana dan Pengelolaan Limbah Domestik tahun 2020 yaitu Persentase Rumah Tangga Bersantiasi

dengan target sebesar 70% dan realisasinya 55,23% atau capaian kinerja sebesar 78,90%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat masih kurang dari sisi analisis kesehatan dan higienisasi sehingga masih sedikit yang mengajukan permohonan pengadaan pengelolaan limbah domestik solusi/rekomendasinya adalah melakukan sosialisasi secara komprehensif kepada masyarakat melalui aparat desa dan kelompok masyarakat.

7) Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan

Indikator kinerja Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan tahun 2020 yaitu Persentase Sengketa Pertanahan yang Difasilitasi dengan target sebesar 100%. realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100% dan Persentase (jumlah bidang) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang difasilitasi dengan target sebesar 100% dan realisasinya 99,19% atau capaian kinerja sebesar 99,19%. Target kinerja tercapai dalam Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan yakni Persentase Sengketa Pertanahan yang difasilitasi.

8) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Indikator kinerja Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup yang mendukung indikator kinerja utama "Indeks Kualitas Air (IKA)" tahun 2020 yaitu :

a. Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan target sebesar 36,6 % dan realisasinya 36,4 % atau capaian kinerja sebesar 99,45 %. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu banyak usaha/kegiatan terutama industri yang mengurangi aktivitas bahkan berhenti akibat pandemi covid 19 dan adanya kebijakan PSBB sehingga interaksi pembinaan dan pengawasan terbatas. Solusinya adalah dengan meningkatkan komunikasi virtual dengan manajemen untuk melakukan pembinaan untuk tetap taat peraturan perundang undangan lingkungan walau dalam kondisi pandemi. Diperlukan membuat aplikasi pelaporan yang memudahkan pihak usaha/kegiatan untuk menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan secara poluntari.

b. Persentase penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan target sebesar 100 % dan realisasinya 114 % atau capaian kinerja sebesar 114 %. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu masih terbatasnya sarana prasarana pengujian dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan, seperti alat pengukur getar, pengukur bau, dan lain-lain. Solusi yang dilakukan dengan mengambil sampel dan mengujinya ke laboratorium lingkungan hidup yang sudah memiliki akreditasi bagi zat aduan yang dapat diambil sampel. Kedepan diperlukan melengkapi sarana prasarana pengukur pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang kondisinya perlu diukur langsung di lapangan. Untuk kasus-kasus tertentu dilakukan mediasi bagi para pihak yang bersengketa dengan melibatkan berbagai unsur.

- c. Persentase kecukupan instrumen pengelolaan lingkungan hidup dengan target sebesar 100 % dan realisasinya 50 % atau capaian kinerja sebesar 50 %. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu terbatasnya waktu untuk menyelesaikan proses penyusunan Dokumen KLHS Perubahan RPJMD berkaitan pekerjaan ini dilaksanakan pada APBD perubahan yang harus terkoneksi dengan penyusunan RPJMD perubahan. Namun demikian progresnya hanya tinggal pekerjaan verifikasi dan validasi ke Dinas LH Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan diselesaikan diawal tahun 2021.
- d. Persentase Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup dengan target sebesar 100 % dan realisasinya 100 % atau capaian kinerja sebesar 100 %. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu pembatasan interaksi karena vandemi sehingga menghambat proses transformasi pengetahuan dan keterampilan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup. Solusi yang dilakukan dengan meningkatkan intensitas komunikasi secara virtual dengan lembaga pendamping dan pemberi akreditasi.
- e. Persentase pengujian kualitas air sungai dengan target sebesar 55,66 % dan realisasinya 55,66 % atau capaian kinerja sebesar 100 %. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu ketergantungan terhadap mitra penguji karena pengambilan sampel perlu bersama mereka, disaat mitra membatasi aktivitas karena vandemi maka tata waktu yang telah dijadwal sebelumnya tidak dapat dilaksanakan. Solusi yang perlu dilakukan kedepan adalah dengan memasang alat pantau air sungai sistem telematry bagi tempat-tempat tertentu yang strategis dan acapkali dugaan pencemaran air sungainya tinggi.
- f. Persentase masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam peningkatan kapasitas lingkungan dengan target sebesar 4,67 % dan realisasinya 4,67 % atau capaian kinerja sebesar 100 %. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu keterbatasan interaksi dengan sasaran karena vandemi. Solusi yang perlu dilakukan kedepan adalah dengan membuat audio visual untuk dapat dengan mudahn dipelajari oleh sasaran dan ditindaklanjuti dengan pertemuan dan diskusi terbatas.

Indikator kinerja Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup yang mendukung indikator kinerja utama "Indeks Kualitas Udara (IKU)" tahun 2020 yaitu "Persentase Pemantauan Kualitas Udara" dengan target sebesar 73,33 % dan realisasinya 85,55 % atau capaian kinerja sebesar 116,60 %. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah ketergantungan terhadap mitra penguji karena pengambilan sampel perlu bersama mereka, disaat mitra membatasi aktivitas karena vandemi maka tata waktu yang telah dijadwal sebelumnya tidak dapat dilaksanakan. Selain hal tersebut lokasi pengambilan harus di lokasi yang padat aktivitas manusia. Solusi yang perlu dilakukan kedepan adalah dengan memiliki sendiri alat pantau udara ambient pasiv sampler sehingga dapat melakukan pemantauan secara rutin walaupun hasil analisisnya masih harus kepada mitra yang telah terakreditasi.

- 9) Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 Indikator kinerja Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup tahun 2020 yaitu “Persentase Luas lahan berfungsi lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati” dengan target sebesar 31,37 % dan realisasinya 35,71 % atau capaian kinerja sebesar 113,83 %. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah belum terpenuhinya permintaan bibit tanaman dari masyarakat baik individu maupun komunitas.. Solusi yang perlu dilakukan kedepan adalah dengan menyediakan bibit tanaman penghijauan baik dengan membuat di persemaian Taman Kehati maupun meningkatkan kerjasama dengan Dinas kehutanan Provinsi Jawa Barat maupun Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta menggerakkan sektor swasta untuk meningkatkan partisipasinya dalam penyelamatan lingkungan.
- 10) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 Indikator kinerja Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang mendukung Indikator kinerja utama “persentase penanganan sampah” tahun 2020 yaitu “timbulan sampah yang ditangani” dengan target sebesar 75 % dan realisasinya 75,01 % atau capaian kinerja sebesar 99,99 %. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu masih tingginya sampah liar yang dibuang sembarangan pada tempat tertentu dan sampah yang terkumpul terbawa arus sungai. Dari sisi penanganan sampah sebenarnya merupakan keberhasilan penanganan sampah liar, namun dari sisi sumber pencemaran di TPAS yang harus semakin dikurangi merupakan belum optimalnya mengurangi sumber pencemar lingkungan sekitar TPAS. Sampah tersebut saat ditangani menambah volume sampah reguler yang masuk ke TPAS sehingga melebihi target sampah yang masuk ke TPAS. Solusinya adalah dengan meningkatkan pendidikan sadar lingkungan untuk mengelola sampah di sumber sampah melalui Gerakan Sumedang Bersih dengan menyediakan satgas sampah di setiap desa, meningkatkan sapras terutama kendaraan pengangkut sampah, meningkatkan kapasitas TPAS Cibeureum Wetan, mempercepat pembangunan TPAS Cijeruk dan membangun TPAS Sukanyiru sebagaimana amanat Peraturan Daerah tentang RTRW. Indikator kinerja Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang mendukung Indikator kinerja utama “persentase pengurangan sampah” tahun 2020 yaitu “Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3 R (Reduce, Reuse, Resicle) dan sektor informal” dengan target sebesar 25 % dan realisasinya 24,99 % atau capaian kinerja sebesar 99,96 %. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu menurunnya aktivitas sektor informal (pelapak) di lapangan sehingga berpengaruh terhadap prilaku pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Solusinya adalah dengan meningkatkan aktivitas Bank Sampah/KSM/komunitas pengelola sampah rumahan dan pemanfaatan sampah organik dengan pengomposan dan budidaya magot, membangun Rumah-rumah kompos, dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu.
- 11) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Indikator kinerja Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2020 yaitu “persentase RTH terkelola” dengan target sebesar 11,07 % dan realisasinya 11,07 % atau capaian kinerja sebesar 100 %. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu masih adanya perbedaan persepsi tentang vegetasi RTH, terutama RTH jalan. Acapkali vegetasi RTH jalan mengganggu sarana dan prasarana lain seperti petunjuk lalu lintas, jalur listrik dan jalur telepon. Solusinya adalah dengan meningkatkan koordinasi dan penggantian vegetasi dengan yang lebih toleran terhadap berbagai sapras dan pasilitas lainnya. Perlu pula vegetasi RTH merupakan tanaman yang tinggi menyerap zat buang kendaraan sehingga dapat meningkatkan kualitas udara.

12) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Indikator kinerja Program Potensi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan tahun 2020 yaitu “Persentase pengelolaan kawasan konservasi” dengan target sebesar 64 % dan realisasinya 64 % atau capaian kinerja sebesar 100 %. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah belum terpenuhinya sapras (pasum dan pasos) di Tahura Gunung Palasari. Solusi yang perlu dilakukan kedepan adalah dengan menyediakan pasum dan pasos yang memadai di Gunung Palasari sehingga pengunjung bisa lebih banyak secara rutin bukan hanya pada even-even tertentu yang hanya merupakan anggota komunitas yang menyelenggarakan acara kelompoknya.

13) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Indikator kinerja Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan tahun 2020 yaitu “Nilai pengelolaan hutan kota” dengan target sebesar 83 poin dan realisasinya 83 poin atau capaian kinerja sebesar 100 %. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah pada musim kemarau masih terjadi muncul beberapa titik api pada daerah penyangga Gunung Palasari dan acapkali merembet ke dalam kawasan hutan. Solusi yang perlu dilakukan kedepan adalah dengan mengintensifkan patroli dengan melibatkan masyarakat sekitar penyangga Gunung Palasari.

k. Penunjang Capaian Kinerja Indeks Risiko Bencana, yaitu :

- 1) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
Capaian indikator kinerja program yaitu pengurangan indeks risiko bencana di Kabupaten Sumedang sebesar 100%. Indeks resiko bencana menurun dari tahun ke tahun. Untuk mencapai hal tersebut, dilaksanakan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Sumedang tahun 2020 dengan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan masyarakat serta lembaga usaha.
- 2) Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
Sasaran program yaitu meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Kebakaran, sasaran ini terdapat 2 (dua) indikator Kinerja antara lain :
a) Cakupan pelayanan bencana kebakaran, dengan Target Indikator Kinerja sebesar 80% dengan keberhasilan target 86,64% hal ini dapat dilihat dari Jumlah Kejadian sebanyak 93 Kejadian dapat ditangani

sebanyak 75 kejadian dalam waktu 15 menit; dan b) Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate), dengan Target Indikator Kinerja sebesar 90,00%, dengan keberhasilan 86,01% atau dengan tingkat keberhasilan 95,57%, keberhasilan ini adanya dukungan dari Warga Masyarakat dalam menginformasikan kejadian bencana kebakaran secara cepat serta kami telah membentuk Satlakar di 4 (empat) wilayah Kabupaten Sumedang.

I. Penunjang Capaian Kinerja Opini BPK, yaitu :

- 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a) Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD. Output kegiatan ini adalah Dokumen Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan tentang Peraturan Bupati Sumedang tentang penjabaran APBD. Outcome kegiatan ini Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Benefit kegiatan ini adalah acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Impact kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan peraturan bupati sumdang tentang penjabaran APBD.
 - b) Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD. Output kegiatan ini adalah Dokumen Nota Kesepakatan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Benefit kegiatan ini adalah sebagai dasar penyusunan Raperda APBD T.A. 2021. Impact kegiatan ini adalah Penyusunan Raperda APBD T.A. 2021 yang terarah sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
 - c) Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD. Output kegiatan ini adalah Dokumen RKA SKPD yang telah diasistensi. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Benefit kegiatan ini sebagai acuan dalam perbaikan penyusunan Dokumen RKA SKPD. Impact kegiatan ini adalah Penyusunan RKA SKPD yang sesuai dengan ketentuan.
 - d) Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Output kegiatan ini adalah Dokumen Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang T.A. 2020. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Benefit kegiatan ini adalah sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD T.A. 2020. Impact kegiatan ini adalah Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD T.A. 2020 sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
 - e) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Output kegiatan ini adalah Dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang APBD T.A. 2021. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Benefit kegiatan ini sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD T.A. 2021. Impact

- kegiatan ini adalah Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD T.A. 2021 sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- f) Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD. Output kegiatan ini adalah Dokumen DPA SKDP yang telah diverifikasi. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Benefit kegiatan ini adalah sebagai acuan SKPD dalam melaksanakan kegiatan. Impact kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku.
 - g) Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD. Output kegiatan ini adalah Dokumen Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD T.A. 2020. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Benefit kegiatan ini adalah sebagai dasar dalam penyusunan Raperda Perubahan APBD T.A. 2020. Impact kegiatan ini adalah Penyusunan Raperda Perubahan APBD T.A. 2020 yang terarah sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
 - h) Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah. Output kegiatan ini adalah Tersusunnya kebijakan keuangan daerah berupa Raperda, Raperbup, Rakepbup yang mengatur keuangan daerah. Outcome kegiatan ini adalah Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperda, Raperbup, Rakepbup yang mengatur keuangan daerah. Benefit kegiatan ini adalah tertib Administrasi pengelolaan Keuangan Daerah di kabupaten Sumedang. Impact kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah di kabupaten Sumedang secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - i) Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Output kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Sosialisasi, terlaksananya FGD SKPD, Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah SKPD dan tersebarluasnya informasi APBD melalui buku saku. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman aparatur tentang perencanaan penggaran daerah. Benefit kegiatan ini adalah SKPD dapat melaksanakan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah dengan baik dan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan masyarakat dapat mengetahui informasi struktur APBD kabupaten Sumedang dalam bentuk buku saku. Impact kegiatan ini adalah SKPD melaksanakan pengelolaan secara tertib dan tepat waktu .
 - j) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Output kegiatan ini adalah Tersusunnya Buku Laporan Keuangan Pemda. Outcome kegiatan ini adalah Terukurnya Kinerja Keuangan Pemda. Benefit kegiatan ini adalah Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Impact kegiatan ini adalah Tersedianyan data dan informasi keuangan.
 - k) Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019

dan terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban. Outcome kegiatan ini adalah Tersusunnya Buku Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 dan terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya laporan keuangan daerah sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Impact kegiatan ini adalah terciptanya alat ukur untuk mengevaluasi kinerja entitas pelaporan dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah.

- l) Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua. Output kegiatan ini adalah Laporan Keuangan Berbasis Akrua yang akurat dan tepat waktu. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Benefit kegiatan ini adalah Tersedianya sistem akuntansi berbasis akrua. Impact kegiatan ini adalah Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
- m) Penyusunan RKBMD dan RKPBM. Output kegiatan ini adalah Adanya dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Barang Milik Daerah. Benefit kegiatan ini adalah Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan RKBMD dan RKPBM adalah adanya dokumen dalam rangka penyusunan RKBMD dan RKPBM dalam rangka penyusunan rencana Kebutuhan Barang setiap SKPD. Impact kegiatan ini adalah Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- n) Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah. Output kegiatan ini adalah dibangunnya tanda batas tanah milik Pemerintah Kabupaten Sumedang Pemasangan plang dan tanda atas pada asset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang. Outcome kegiatan ini adalah Tertibnya asset Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang. Benefit kegiatan ini adalah Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah adalah adanya legal aspek hukum dan bukti tanah milik pemerintah Kabupaten Sumedang. Impact kegiatan ini adalah Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- o) Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD. Output kegiatan ini adalah Berita Acara Rekonsiliasi Aset dan Laporan Aset Tetap SKPD Triwulan I, Semester I dan Triwulan III serta Laporan Aset Tetap SKPD Akhir Tahun 2019 masih dalam proses penyusunan. Outcome kegiatan ini adalah Tersediannya dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset disertai rincian BMD yang benar. Benefit kegiatan ini adalah Tersusunnya neraca aset. Impact kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Laporan Barang Ke Neraca sebagai lampiran pendukung Laporan Keuangan Daerah.
- p) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD. Output kegiatan ini adalah

Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021. Benefit kegiatan ini adalah SKPD dapat melaksanakan Pengelolaan Keuangan (penggaran dan penatausahaan) secara tepat waktu. Impact kegiatan ini adalah SKPD dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan secara tepat waktu.

- q) Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Output kegiatan ini Laporan Hasil Kegiatan dan Sertifikat Bimbingan Teknis bagi Peserta. Outcome kegiatan ini adalah Pembinaan Kepada Pengurus Barang. Benefit kegiatan ini adalah Meningkatnya Wawasan Pengurus Barang dan Kapasitas Pengelolaan BMD. Impact kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan peserta bimbingan teknis serta terjalin komunikasi yang efektif dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah.
- r) Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya pemeliharaan jaringan aplikasi (server, hardware dan software), Terlaksananya pendampingan pelaksanaan SIPKD. Outcome kegiatan ini adalah Terlaksananya perawatan rutin server, hardware dan software, Operator semakin trampil dalam menggunakan aplikasi SIPKD. Benefit kegiatan ini adalah Penggunaan SIPKD semakin menunjang pelaksanaan Pengelolaan keuangan daerah. Impact kegiatan ini adalah Terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.
- s) Pengelolaan Kas Daerah. Output kegiatan ini adalah Tersusunnya posisi kas daerah harian, Tersusunnya Buku Kas Umum Daerah, Terlaksananya Rekonsiliasi belanja, Terlaksananya FGD kewajiban perpajakan bendahara pemerintah, Terlaksananya FGD mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, Terlaksananya FGD mengenai Penggajian ASN, Terlaksananya FGD Transaksi Non Tunai, Terlaksananya FGD mengenai SP2D On line, Terlaksananya sosialisasi Perubahan Perbup No. 105 Tahun 2017 tentang Implementasi Non Tunai, Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah SKPD. Outcome kegiatan ini adalah Tercatatnya seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah, Meningkatnya kemampun pengelola keuangan daerah SKPD. Benefit kegiatan ini adalah Pengelolaan kas yang efektif dan efisien serta sesuai peraturan perundang-undangan. Impact kegiatan ini adalah Tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
- t) Sinergitas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Output kegiatan ini adalah Peserta Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman peserta pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya pegawai yang handal secara teknis tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan keuangan daerah.
- u) Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan. Output kegiatan ini adalah Laporan Realisasi APBD Bulanan T.A 2020, Laporan Realisasi APBD Triwulan I, III T.A 2020, Laporan Realisasi APBD Semester I T.A 2020, Lporan-lapran kepada Pemerintah Pusat.

Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Benefit kegiatan ini adalah Tersedianya informasi mengenai Laporan Realisasi APBD Bulanan secara periodik. Impact kegiatan ini adalah Terciptanya pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- v) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah. Output kegiatan ini adalah Tersusunya laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah dan Berita Acara Penilaian Barang Milik daerah yang benar dan akurat. Outcome kegiatan ini adalah Tertibnya Penatausahaan BMD yang sesuai dengan bukti fisik BMD. Benefit kegiatan ini adalah Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah adalah Bidang Aset dan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan teridentifikasi gedung/bangunan yang akan di rehab dan sebagai pendapatan lain-lainnya. Impact kegiatan ini adalah Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- w) Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah. Output kegiatan ini adalah Aplikasi Simda BMD, SIPKD Modul Aset dan Integra agent dalam membangun database barang milik daerah. Outcome kegiatan ini adalah Tersedianya pemeliharaan aplikasi penatausahaan aset. Benefit kegiatan ini adalah Terpeliharanya pengembangan aplikasi penatausahaan aset. Impact kegiatan ini adalah Terbangunnya aplikasi dan database aset daerah yang dapat menyajikan laporan aset daerah yang terintegritasi, informative dan dapat dipertanggungjawabkan.
- x) Inventarisasi Aset. Output kegiatan ini adalah Tersedianya rincian data aset tanah dalam mendukung penyusunan Neraca Keuangan dan neraca aset. Outcome kegiatan ini adalah Tertibnya pengelolaan aset. Benefit kegiatan ini adalah Tersedianya data aset tanah yang belum terinventarisasi dan dalam penyusunan neraca aset. Impact kegiatan ini adalah Adanya data inventaris barang milik daerah.
- y) Penyusunan Neraca Aset Daerah. Output kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset yang akurat dan tepat waktu. Outcome kegiatan ini adalah Tertibnya dalam rangka penyusunan Neraca aset dalam laporan keuangan daerah. Benefit kegiatan ini adalah Tersedianya Neraca aset dalam mendukung penyusunan keuangan daerah maupun Neraca aset. Impact kegiatan ini adalah Tertibnya dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah.
- z) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya workshop pengelolaan keuangan daerah, terlaksananya sosialisasi system kendali SP2D. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman para pengelola keuangan daerah, tersampainya informasi/regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah. Benefit kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas para pengelola keuangan daerah. Impact kegiatan ini adalah pengelolaan keuangan daerah terlaksana dengan baik sesuai ketentuan.

- 6) Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
Indikator kinerja Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2020 terdapat 2 Indikator Sasaran yaitu :
- a) Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah dengan target sebesar 17.77% dan realisasinya 15.96% atau capaian kinerja sebesar 89.81%. Target kinerja tidak tercapai. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu kegiatan Pengadaan alat perekam mencapai 96.01%, Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencapai 96.75%, dan Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah mencapai 98.76%.
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu penetapan target kinerja terlalu progresif, data potensi pendapatan daerah belum tergali secara maksimal/akurat, masih terbatasnya personil yang menguasai proses pengelolaan pendapatan, lemahnya penerapan sanksi bagi pelanggar pajak, serta rendahnya kesadaran masyarakat Wajib Pajak. Solusi/rekomendasinya adalah pengkajian kembali target yang ditetapkan sesuai dengan potensi di lapangan, melakukan pendataan potensi pendapatan daerah baru, optimalisasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang sudah ada, sosialisasi kepada wajib pajak dan tokoh masyarakat terkait peraturan yang melandasi pengenaan pajak dan retribusi, pendekatan persuasif kepada wajib pajak dan retribusi agar taat memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak/retribusi sesuai ketentuan, inovasi berbasis IT.
- b) Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 87 poin dan realisasinya 90.52 poin atau capaian kinerja sebesar 104.05% Target kinerja melebihi target. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu di tengah masa pandemi Covid-19 ini menuntut masyarakat banyak melakukan adaptasi baru termasuk juga terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dampak kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus ini yaitu dengan melaksanakan perubahan standar pelayanan publik, peningkatan standar pelayanan dan peningkatan sistem pelayanan. Solusi/rekomendasinya adalah menyediakan informasi secara jelas mengenai standar pelayanan melalui penyediaan berbagai media sosial (online) dan website, meningkatkan sistem penyelenggaraan pelayanan secara online SIAPDOL, SIMPBB dan E-BPHTB, adaptasi sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan dengan memberikan pelayanan secara langsung menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker atau Face Shield, menerapkan Social Distancing (memberikan jarak pada antrean maupun ruang tunggu, menyediakan Hand Sanitizer/tempat cuci tangan serta melakukan sterilisasi secara rutin baik penyemprotan desinfektan maupun pembersihan pendingin ruangan, serta meningkatkan kompetensi pelaksana pelayanan terutama dalam penggunaan System yang berbasis teknologi informatika.
Persentase realisasi anggaran program pengembangan pengelolaan pendapatan daerah mencapai 89,57%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu Pelayanan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah mencapai 94.62% dan perekaman data objek subjek pajak PBB mencapai 99.95%.

7) Program Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Sekretariat Daerah.

Indikator kinerja Program Pengelolaan Keuangan dan Barang daerah Sekretariat Daerah tahun 2020 yaitu:

- Cakupan Tertib Administrasi Keuangan, dengan target sebesar 100% dan realisasinya 97,07% atau capaian kinerja sebesar 97,07%. Target kinerja tidak tercapai.
- Persentase barang milik daerah yang dikelola secara efektif dan efisien, dengan target sebesar 83,98% dan realisasinya 83,98% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tidak tercapai.
- Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur, dengan target sebesar 100 % dan realisasinya 93,70% atau capaian kinerja sebesar 93,70%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu pembatasan kegiatan dan pembatasan perjalanan dinas pimpinan selama pandemi. Solusi/rekomendasinya adalah arahan dan dukungan pimpinan, dukungan anggaran, koordinasi dengan OPD dan stakeholder.

8) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan.

Indikator kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan tahun 2020 yaitu Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu dan Tepat Kualitas tercapai 100%, serta Persentase Ketercapaian Target PBB dengan target sebesar 100% dan realisasinya 57.20% atau capaian kinerja sebesar 57.20%. Realisasi kinerja capaian PBB tidak mencapai target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu banyaknya WP yang sulit ditemui karena berada di luar kota, menurunnya tingkat pendapatan WP sebagai dampak wabah Covid-19 dan masih rendahnya tingkat kesadaran WP untuk membayar pajak. Solusi/rekomendasinya adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kolektor PBB melalui penyelenggaraan diklat atau pembinaan, meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi secara formal dan informal dan melakukan pemulihan ekonomi untuk meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat.

m. Penunjang Capaian Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten, yaitu :

1) Program Pengendalian Pembangunan Daerah

Indikator kinerja Program Pengendalian Pembangunan Daerah tahun 2020 yaitu :

- Persentase BUMD dan lembaga keuangan yang capaian target kinerja tahunannya baik" dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
- Persentase perangkat daerah bidang SDA, pertanian, sarana, ekonomi, perdagangan dan UMKM yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik" dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
- Persentase perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan Kesehatan bidang social, tenaga kerja dan transmigrasi; bidang

pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan KB yang capaian kinerja tahunannya berkategori "baik" dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.

- Persentase perangkat daerah yang melaksanakan administrasi kinerja pembangunan triwulannya berkategori "baik" dengan target sebesar 100% dan realisasinya 99,58% atau capaian kinerja sebesar 99,58%. Target kinerja tidak tercapai.
- Tingkat kematangan UKPBJ dengan target level 3 dan realisasinya level 2 atau capaian kinerja sebesar 66,67%. Target kinerja tidak tercapai.
- Capaian realisasi pengadaan barang dan jasa terhadap jumlah usulan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 97% atau capaian kinerja sebesar 97%. Target tidak kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu. proses pengumpulan data dan keakuratan data dan kurangnya SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan Solusi/rekomendasinya adalah motivasi Pimpinan dan koordinasi intensif dengan OPD sesuai arahan Pimpinan.

2) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

Indikator kinerja Program Cakupan Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah tahun 2020 yaitu:

- a) Pengelolaan Data Statistik Daerah dengan target pagu anggaran sebesar Rp.128.000.000,- dan realisasinya Rp.127.458.000,- atau 99,58% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu : Kurangnya SDM di bidang Statistik dan tidak adanya SDM yang ahli di Bidang Statistik (Statisi) Solusi/rekomendasinya adalah : Penambahan SDM di Bidang Statistik, Khususnya yang ahli Statistik (Statisi).
- b) Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sumedang dengan target pagu anggaran sebesar Rp.70.290.050,- dan realisasinya Rp.68.113.550,- atau 96,90% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu : Kurangnya SDM di bidang Statistik dan tidak adanya SDM yang ahli di Bidang Statistik (Statisi) Solusi/rekomendasinya adalah Penambahan SDM di Bidang Statistik, Khususnya yang ahli Statistik (Statisi)

3) Program Pengamanan Berita, Persandian, dan Radiogram.

Indikator kinerja Program Cakupan Pengamanan Berita Persandian dan Radiogram tahun 2020 yaitu:

- a) Pengelolaan Persandian dengan target pagu anggaran sebesar Rp.149.192.000,- dan realisasinya Rp.149.129.340,- atau 99,96% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu : Masih banyaknya SDM yang kurang mengerti dan memahami akan pentingnya tanda tangan elektronik. Solusi/rekomendasinya adalah : Mengadakan Bimtek dan Sosialisasi.
- b) Pengamanan Persandian dengan target pagu anggaran sebesar Rp.215.687.550,- dan realisasinya Rp.214.019.240,- atau 99,23% dengan capaian kinerja sebesar 270,33%. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target

kinerja yaitu : Masih kurangnya tenaga ahli Sandiman, saat ini yang ada Cuma 1 orang Sandiman. Solusi/rekomendasinya adalah : Penambahan tenaga ahli Sandiman

- 4) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Indikator Kinerja Program Bappppeda Tahun 2020 yaitu Tingkat Kesesuaian Renstra terhadap RPJMD, RKPD terhadap RPJMD dan Renja terhadap RKPD dengan target sebesar 100 % dan realisasi 97,89 dan capaian Kinerja sebesar 100 % sehingga target Kinerja Bappppeda tahun 2020 tercapai.
- 5) Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah.
Indikator Kinerja Program yaitu Persentase Ketercapaian target Program pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah yang berkategori baik dengan target sebesar 100 % dan realisasi 93,68 dan capaian Kinerja sebesar 100 % sehingga target Kinerja Bappppeda tahun 2020 tercapai.
- 6) Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Ekonomi dan SDA.
Indikator Kinerja Program yaitu Persentase Ketercapaian target Program pembangunan Ekonomi dan SDA yang berkategori baik dengan target sebesar 100 % dan realisasi 96,14 dan capaian Kinerja sebesar 100 % sehingga target Kinerja Bappppeda tahun 2020 tercapai.
- 7) Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Pemerintahan dan Sosial.
Indikator Kinerja Program yaitu Persentase Ketercapaian target Program pembangunan Pemerintahan dan Sosial yang berkategori baik dengan target sebesar 100 % dan realisasi 99,17 dan capaian Kinerja sebesar 100 % sehingga target Kinerja Bappppeda tahun 2020 tercapai.
- 8) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Indikator Kinerja Program yaitu Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan dengan target sebesar 100% dan realisasi 98,75 dan capaian Kinerja sebesar 100 % sehingga target Kinerja Bappppeda tahun 2020 tercapai.
- 9) Program Pemanjangan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
Indikator kinerja program yaitu :
 - a. Prosentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa dengan target sebesar 40% dan realisasinya.94,64% atau capaian kinerja sebesar .94,64.%. Target kinerja melebihi target.
 - b. Prosentase Desa dengan Pengelolaan keuangan Desa sesuai Standar dengan target sebesar 100% dan realisasinya 99,47% atau capaian kinerja sebesar 97,41 %. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu belum semua desa melaksanakan Siskeudes secara on line rekomendasinya adalah meningkatkan jaringan dan kekuatan prekwensi/ kecepatan untuk aplikasinya agar di semua desa untuk 270 dapat melakukan siskeudes secara on line.

- c. Prosentase Desa yang Pengelolaan aset Desa yang Akurat pada tahun 2020 dengan target sebesar 40,74% dan realisasinya 99,25% capaian kinerja melebihi target.

10) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Indikator kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan tahun 2020 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 83,00 poin dan realisasinya 83,80 poin atau capaian kinerja sebesar 100,96%. Realisasi kinerja melebihi target.

11) Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa.

Indikator kinerja Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa tahun 2020 yaitu Persentase Pembinaan Administrasi Desa realisasinya 100% dan Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal realisasinya 80,46%.

12) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Indikator kinerja Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah tahun 2020 yaitu:

- Cakupan fasilitasi dan dukungan pelayanan kepada pimpinan daerah, dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
- Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan public di lingkungan Sekretariat Daerah, dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
- Tingkat penggunaan digital office (e-office) Sekretariat Daerah, dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
- Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik, dengan target sebesar 85% dan realisasinya 80% atau capaian kinerja sebesar 94,12%. Target kinerja tidak tercapai.
- Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program Sumedang Simpati, dengan target sebesar 80% dan realisasinya 82% atau capaian kinerja sebesar 102,50%. Target kinerja melebihi target. Kendala pembatasan kegiatan dan pembatasan perjalanan dinas pimpinan selama pandemi. Solusi/rekomendasinya adalah arahan dan dukungan pimpinan, dukungan anggaran, koordinasi dengan OPD dan stakeholder.

13) Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah tahun 2020 yaitu :

- Persentase dokumen kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti kedalam perjanjian kerjasama dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
- Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam rencana aksi yang jelas dan terukur dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target

kinerja yaitu. Masih rendahnya respon Perangkat Daerah terkait potensi Kerjasama daerah yang bisa ditindaklanjuti, kurangnya Sumber Daya Aparatur yang memenuhi kompetensi, serta belum terlaksananya SOP tentang administrasi Kerjasama secara konsisten. Solusi/rekomendasinya adalah adanya arahan dari Pimpinan, koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, sarana dan prasarana yang memadai, SDM dan dukungan anggaran.

n. Penunjang Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
Indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2020 telah mencapai target 1005. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Pengukuran ini berdasarkan pada indikator kinerja Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang ada di RPJMD Kabupaten Sumedang dengan 6 (enam) Indikator kinerja. Membandingkan jumlah realisasi indikator kinerja program dengan rencananya yang dihitung berdasarkan presentase rata-rata capaian kinerja.
- 2) Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Indikator kinerja Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH tahun 2020 yaitu :
 - a. Persentase pemenuhan unsur SPIP dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100% dengan Target kinerja tercapai.
 - b. Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100% dengan Target kinerja tercapai.
 - c. Jumlah temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti berdasarkan aspek pemeriksaan dengan target sebesar 371 buah dan realisasinya 371 buah atau capaian kinerja sebesar 100% dengan Target kinerja tercapai.
 - d. Jumlah temuan hasil pengawasan berdasarkan aspek pemeriksaan dengan target sebesar 476 buah dan realisasinya 476 buah atau capaian kinerja sebesar 100% dengan Target kinerja tercapai.
 - e. persentase perangkat daerah dan pemerintah desa yang berkonsultasi dengan target sebesar 31.26 dan realisasinya 31.26 atau capaian kinerja sebesar 100% dengan Target kinerja tercapai.
- 3) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan dengan target sebesar 41.87 dan realisasinya 41.87 atau capaian kinerja sebesar 100% dengan Target kinerja tercapai Persentase elemen IACM yang terpenuhi dengan target sebesar 100 dan realisasinya 100 atau capaian kinerja sebesar 100% dengan Target kinerja tercapai.
- 4) Program Penegakan Integritas.
Cakupan Zona Integritas dengan target sebesar 100 dan realisasinya 100 atau capaian kinerja sebesar 100% dengan Target kinerja tercapai.

5) Program Administrasi Pemerintahan dan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja Program Administrasi Pemerintahan dan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah tahun 2020 yaitu :

- Persentase manajemen pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang berkategori "Baik dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
- Persentase tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tidak tercapai target
- Nilai LPPD dengan target sebesar 100 % dan realisasinya masih menunggu hasil penilaian.
- Persentase tertib administrasi kewilayahan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
- Persentase Sakip Kecamatan yang nilainya "B" dengan target sebesar 69,23 % dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 144,45%. Target kinerja melebihi target.
- Persentase data tanah HGU yang terverifikasi dan tervalidasi dengan target sebesar 100% dan realisasinya 76% atau capaian kinerja sebesar 76%. Target kinerja tidak tercapai.
- Nilai Sakip Kabupaten dengan target masih menunggu hasil penilaian.
- Indeks Reformasi Birokrasi dengan target masih menunggu hasil penilaian.
- Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kabupaten Sumedang dengan target sebesar 80% dan realisasinya 90% atau capaian kinerja sebesar 112,50%. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu aktifitas yang terbatas karena covid-19, data yang kurang mendukung dan memadai, ketidaksesuaian persepsi bahan penilaian. Solusi/rekomendasinya adalah koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, kolaborasi dan penyelesaian masalah data dan eviden, koordinasi dengan OPD terkait, pendampingan dari Bagian terkait, dukungan SDM dan dukungan anggaran.

6) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Indikator kinerja Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2020 yaitu:

- Persentase pemrosesan rancangan produk hukum daerah yang harmonis dan tidak tumpang tindih dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
- Persentase pemutakhiran data pada website JDIH secara berkelanjutan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
- Persentase cakupan pengaduan hukum yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu. SDM yang berkompetensi Sarjana Hukum masih kurang. Solusi/rekomendasinya adalah arahan dan pendampingan dari pimpinan, meningkatkan kualitas SDM yang ada,

sering berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi serta OPD teknis dan dukungan anggaran.

- 7) Program Pengembangan Kompetensi Aparatur.
Indikator kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tahun 2020 yaitu Indeks Profesionalitas ASN dengan target sebesar 70 poin dan realisasinya 65,09 poin atau capaian kinerja sebesar 92,9%. Target kinerja tidak tercapai karena adanya kesalahan dalam pencantuman nilai awal dari target kinerja pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Seharusnya nilai awal adalah 52 poin bukan 59 poin sebagaimana tercantum pada dokumen Renstra. Kendala tersebut akan diatasi pada tahun 2021 ini dengan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 selaras dengan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.
- 8) Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen Aparatur.
Indikator kinerja Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen Aparatur yaitu Indeks Sistem Merit dengan target sebesar 66.25 poin dan realisasinya 74.75 poin atau capaian kinerja sebesar 112,83%. Target kinerja dapat terlampaui walau dengan sumberdaya yang terbatas terutama sebagai efek refocusing anggaran terkait Pandemi Covid 19. Hal ini terjadi karena upaya optimalisasi anggaran yang ada dan upaya inovasi dalam pencapaian target kinerja tersebut. Diantaranya adalah dengan optimalisasi dan percepatan penetapan peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai instrumen penilaian pencapaian Indeks Sistem Merit.
- 9) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
Indikator kinerja Program Presentase perangkat Daerah yang tertata arsipnya sesuai dengan standartahun 2020 dengan target sebesar 40 % dan realisasinya 40% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.

o. Penunjang Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Indikator kinerja Program Peningkatan Pelayanan Perizinan tahun 2020 yaitu Persentase izin yang terbit tepat waktu dengan target sebesar 76% dan realisasinya 83,11% atau capaian kinerja sebesar 109,36%. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu masih terdapat investor yang belum mengetahui berbagai inovasi dan kebijakan pemerintah dalam kemudahan pelayanan perizinan. Solusi/rekomendasinya adalah : Reviu SOP layanan dan Peningkatan publikasi layanan melalui media sosial dan website serta percontohan penerapan *conversational Geovernment*.
- 2) Program Pelayanan Administrasi Kependudukan.
Indikator kinerja Program Pelayanan Administrasi Kependudukan yang terdiri dari : (1) Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan target sebesar 94% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 106%. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu terkait dengan Standar Pelayanan Daring solusi/rekomendasinya adalah pada Tahun berikutnya untuk Pelayanan Daring diharapkan dapat memberikan akses kepada masyarakat dalam hal survey kepuasan Masyarakat yang dilayani

melalui Pelayanan Daring ini; (2) Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan sipil dengan target sebesar 86% dan realisasinya 99,91% atau capaian kinerja sebesar 116%. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi tidak ada; dan (3) Jumlah Instansi yang Menggunakan Data Base Kependudukan dengan target sebesar 15 Instansi dan realisasinya 25 Instansi atau capaian kinerja sebesar 166%. Target kinerja melebihi target.

3) Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Indikator kinerja Program Penataan Administrasi Kependudukan tahun 2020 yaitu Persentase Layanan yang sesuai dengan Standar Manajemen Mutu dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu terkait dengan Standar Pelayanan Daring, solusi/rekomendasinya adalah pada tahun berikutnya untuk Pelayanan Daring diharapkan dapat memberikan akses kepada masyarakat dalam hal survey kepuasan masyarakat yang dilayani melalui Pelayanan Daring ini.

4) Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

Indikator kinerja Program Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2020 yaitu 1. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49; 2. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) Dengan target sebesar 1. 74.77%; 2. 9.07% dan realisasinya 1. 81.64%; 2. 8.22% atau capaian kinerja sebesar 1. 109.18%; 2. 109.37% dapat diartikan pencapaian tinggi.

5) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Jumlah Tranmigran yang ditempatkan dengan target sebesar 61 kk dan realisasinya 57 KK (93,44 %) atau capaian kinerja sebesar 93,44 %. Target kinerja tercapai Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kuota tidak ada baik dari kementerian maupun dari Propinsi untuk penempatan transmigran tahun 2020 dikarenakan pandemic covid-19.

6) Program Transmigrasi Lokal

Jumlah Tranmigran yang ditempatkan dengan target sebesar 61 kk dan realisasinya 57 KK (93,44 %) atau capaian kinerja sebesar 93,44 %. Target kinerja tercapai Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kuota tidak ada baik dari kementerian maupun dari Propinsi untuk penempatan transmigran tahun 2020 dikarenakan pandemic covid-19.

7) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

a. Indikator kinerja ke-1 meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2020 sebesar 73.511 pengunjung dan realisasinya atau capaian kinerja sebesar 12.304 pengunjung, sumber data diperoleh dari kegiatan layanan perpustakaan dapat di lihat dari jumlah kunjungan ke perpustakaan yang ada di kabupaten sumedang, target kineria tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja sehubungan dengan kondisi covid 19 sehingga layanan perpustakaan di tutup hanya sesekali dibuka itupun dibatasi hanya beberapa pengunjung yang dapat masuk ke ruang perpustakaan solusi/rekomendasinya adalah sebagai upaya peningkatan kunjungan perpustakaan dinas arsip dan perpustakaan membentuk perpustakaan

- digital di 29 skpd 26 kecamatan dan 50 pesantren satu *e-library* di layanan perpustakaan serta layanan pocadi pojok baca digital mpp.
- b. Indikator kinerja ke-2 yaitu cakupan lokasi yang terlayani melalui pusling tahun 2020 sebesar 48% dan realisasinya atau capaian kinerja sebesar 0,39% sumber data diperoleh dari kegiatan perpustakaan keliling. Target kinerja tidak tercapai kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, akibat terjadinya wabah covid 19 sehingga semua perpustakaan sekolah ditutup sehingga layanan perpustakaan keliling tidak bisa beroperasi secara optimal, hal ini mengakibatkan cakupan lokasi yang terlayani pusling tidak bisa tercapai. Solusi/rekomendasinya adalah kunjungan online dan layanan silang layan dengan menyimpan buku di desa dibagikan ke tiap rw dan rt.
 - c. Indikator kinerja ke-3 adalah tingkat kepuasan pengunjung tahun 2020 sebesar 80% dan realisasinya atau capaian kinerja sebesar 82,27% sumber data dari aplikasi kunang-kunang dengan kegiatan pendukung adalah pengadaan sarana prasarana perpustakaan dan pengembangan koreksi perpustakaan serta pengadaan bahan pustaka melebihi target.
- 8) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Indikator kinerja Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan tahun 2020 yaitu Persentase organisasi kepemudaan yang aktif dengan target sebesar 90 dan 21 realisasinya 112 atau capaian kinerja sebesar 112%. Target kinerja tercapai, hal ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pembinaan/pembentukan paskibraka kabupaten sumedang, penyusunan kebijakan bidang kepemudaan, peningkatan SDM bidang kepemudaan.
- 9) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Indikator kinerja Program Cakupan Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tahun 2020 yaitu:
- a) Diseminasi Program Pemerintah dengan capaian kinerja 100% berupa diseminasi kebijakan pemerintah berupa penyebaran informasi melalui bahan cetak, maupun media elektronik. Target kinerja tercapai 100%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu : Kurangnya sarana prasarana untuk menjangkau daerah terpencil mengakibatkan tidak tersampainya himbuan atau pembangunan pemerintah daerah. Solusi/rekomendasinya adalah : Penambahan sarana prasarana.
 - b) Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik berupa wawar keliling dan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu : Masih kurangnya sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia Solusi/rekomendasinya adalah Penambahan sarana dan prasarana dan Pelatihan sumber daya manusia.
 - c) Peningkatan Kapasitas Lembaga Informasi Masyarakat dengan target 26 KIM (Komunitas Informasi Publik) dan realisasinya 31 KIM atau capaian kinerja 119,23%. Capaian kinerja telah melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja

yaitu : KIM tidak bisa secara mandiri mengembangkan dirinya menjadi pusat informasi masyarakat di desa. Solusi/rekomendasinya adalah : 1) Peningkatan Forum KIM 2) Penambahan anggaran kegiatan.

- d) Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika berupa pengendalian dan pengawasan menara BTS 365 unit, pemasangan wifi gratis 88 unit, dan pembayaran internet terpusat 100% dengan capaian kinerja sebesar 103,81%. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu : 1) Kurangnya sarana prasarana dalam melakukan Dalwas BTS. 2) Jaringan dalam penggunaan Wifi gratis sering mengalami gangguan Solusi/rekomendasinya adalah : Penambahan sarana prasarana dan jumlah anggaran; 2) Penyedia jasa bisa mengatasi gangguan dan permasalahan dilapangan.
- e) Pengembangan Infranstruktur Teknologi Informasi Komunikasi Menuju E-Digital dengan target 28 OPD dan realisasinya 55 OPD dengan capaian kinerja sebesar 196,43%. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu : Jaringan sering terganggu dan Aplikasi yang error dan SDM kurang memahami tentang Aplikasi yang ada (e-office). Solusi/rekomendasinya adalah Penambahan dan pemeliharaan server sebagai alat penunjang dan Bimtek dan Sosialisasi.
- f) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan target 12 bulan dan realisasinya 12 bulan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu : Adanya peralihan struktur organisasi perangkat daerah yang mempengaruhi SDM dalam melaksanakan tugas di UPT LPSE. Solusi/rekomendasinya adalah : Adanya payung hukum yang jelas.
- g) Pembangunan *Command Centre* (Banprov) dengan capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu : Kekurangan peralatan penunjang seperti CCTV dan jaringannya dan SDM yang ditugaskan di *Command centre* belum ada. Solusi/rekomendasinya adalah Pengadaan CCTV dan jaringannya serta Penerimaan SDM untuk ditugaskan di *Command Centre*.

10) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Indikator kinerja program yaitu prosentase swadaya masyarakat terhadap Pembangunan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100 atau capaian kinerja sebesar 100 %. Target kinerja tercapai.

p. Penunjang Capaian Kinerja Pengeluaran Per-Kapita, yaitu :

- 1) Program Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi.
Target tahun 2020 yaitu cakupan koperasi aktif dengan target sebesar 78% dan realisasinya Rp. 38,97% atau capaian kinerja sebesar 49,96%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu adanya refocusing anggaran, solusi/rekomendasinya adalah mengoptimalkan memberikan pembinaan dan pengawasan koperasi aktif yang ada di Kabupaten Sumedang.
- 2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Koperasi.

Indikator kinerja Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Koperasi tahun 2020 yaitu cakupan koperasi aktif dengan target sebesar 78% dan realisasinya Rp. 39,54% atau capaian kinerja sebesar 50,69%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu adanya refocusing anggaran, solusi/rekomendasinya adalah memberikan pembinaan dan pengawasan koperasi aktif yang ada di Kabupaten Sumedang.

- 3) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Indikator kinerja Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat tahun 2020 yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Realisasi kinerja mencapai target.
- 4) Program Pemberdayaan, Penataan, dan Perlindungan Pasar Rakyat.
Target kinerja tahun 2020 yaitu laju pertumbuhan sub sector perdagangan besar dan eceran dengan target sebesar 5,19% dan realisasinya 4,89% atau capaian kinerja sebesar 94,61%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya kontribusi dari sektor perdagangan solusi/rekomendasinya adalah memberikan pembinaan dan pengawasan/monitoring dan evaluasi dari sektor perdagangan.
- 5) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
Indikator kinerja Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah tahun 2020 yaitu laju pertumbuhan sub sector industri pengolahan dengan target sebesar 5,35% dan realisasinya 11,51% atau capaian kinerja sebesar 215,14%. Capaian kinerja telah melebihi target.
- 6) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
Indikator kinerja program yaitu Prosentase Lembaga Ekonomi Yang Aktif dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100 atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai .
- 7) Program Ketahanan Keluarga.
Indikator Kinerja Program Ketahanan Keluarga tahun 2020 yaitu 1. Cakupan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif; 2. Cakupan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR) yang aktif; 3. Cakupan kelompok Bina keluarga Lansia (BKL) yang aktif; 4. Cakupan kelompok Keluarga Pra sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS dengan target sebesar 1. 72%; 2. 65.62%; 3. 63.41%; 4. 51.93%; dan realisasinya 1. 50.54%; 2. 39.08%; 3. 40.71%; 4.39.26%; atau capaian kinerja sebesar 1. 70.19%; 2. 59.55%; 3. 64.20%; 4. 75.60%; Target Kinerja tidak tercapai atau pencapaian rendah. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dalam pencapaiannya Rendah atau Tidak Baik. Hal ini dikarenakan adanya anjuran dari pemerintah dilarang berkerumun akibat pandemi Covid 19 sehingga kegiatan kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS Pembinaannya dibatasi dan anggota kelompok tidak dapat sepenuhnya hadir.
- 8) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
Target kinerja tahun 2020 yaitu laju pertumbuhan sub sector perdagangan besar dan eceran dengan target sebesar 5,19% dan realisasinya 4,89% atau capaian kinerja sebesar 94,61%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya kontribusi dari sektor perdagangan

solusi/rekomendasinya adalah memberikan pembinaan dan pengawasan/monitoring dan evaluasi dari sektor perdagangan.

q. Penunjang Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
Indikator kinerja Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja tahun 2020 yaitu Menurunnya tingkat Pengangguran Terbuka dengan target sebesar 6,35 % dan realisasinya 9,89 % atau capaian kinerja sebesar 44,25 %. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu situasi pandemic covid-19 yang menyebabkan situasi ekonomi yang tidak menentu. Laju pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan arah negative, sehingga kelompok UMKM sulit untuk berkembang karena kesulitan dalam pemasaran solusi/rekomendasinya adalah Proses Pelatihan ini masih memerlukan tindak lanjut dan pendampingan, baik dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun Dinas/Instansi yang bergerak dalam pembinaan kelompok UMKM. Sehingga diharapkan hasil dari pelatihan ini dapat ditindaklanjuti oleh Dinas/ Instansi yang berkaitan dengan proses produksi, pemasaran dan upgrading skill, sehingga kelompok usaha ini dapat terus berkembang.
- 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
Indikator kinerja Program Peningkatan kesempatan kerja tahun 2020 yaitu Menurunnya tingkat Pengangguran Terbuka dengan target sebesar 6,35 % dan realisasinya 9,89 % atau capaian kinerja sebesar 44,25 %. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu pandemic covid-19 yang menyebabkan Perusahaan Sebagian ada yang tutup, karyawan dirumahkan, PHK karyawan sehingga menyebabkan lowongan kerja tidak ada dan angka pengangguran meningkat. tisolusi/rekomendasinya adalah Memperluas penciptaan lapangan kerja dengan menyiapkan tenaga kerja terampil dan terlatih untuk kebutuhan lokal, dalam dan luar negeri yang memenuhi standar kompetensi, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk memperbaiki ekonomi keluarga, menciptakan lapangan kerja/usaha baru khususnya lapangan kerja sektor usaha baru (WUB), Meningkatkan keterampilan kerja dan kualitas pencari kerja untuk memasuki dunia usaha.

r. Penunjang Capaian Kinerja Jumlah UMKM, yaitu :

- 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
Target kinerja tahun 2020 yaitu jumlah UMKM dengan target sebesar 17.467 UMKM dan realisasinya 20.507 UMKM atau capaian kinerja sebesar 117,40%. Capaian kinerja telah melebihi target.
- 2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
Target kinerja Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah tahun 2020 yaitu jumlah UMKM dengan target sebesar 17.467 UMKM dan realisasinya 20.507 UMKM atau capaian kinerja sebesar 117,40%. Capaian kinerja telah melebihi target.
- 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Indikator kinerja Program Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2020 yaitu cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan. dengan target sebesar 75% dan realisasinya 105% atau capaian kinerja sebesar 105%. Target kinerja tercapai target, hal ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan Promosi ekonomi kreatif unggulan dan Penyelenggaraan festival sub sektor ekonomi kreatif.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2020

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.14
Realisasi APBD Tahun 2020

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)
1.	Pendapatan Daerah	2.983.310.038.166,22	2.904.389.475.183,44	97,35
	Pendapatan Asli Daerah	449.530.481.156,22	444.430.236.011,44	98,87
	Dana Perimbangan	1.654.001.244.414,00	1.628.340.815.970,00	98,45
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	879.778.312.596,00	831.618.423.202,00	94,53
2.	Belanja Daerah	3.084.660.482.667,39	2.868.266.709.483,00	92,98
	Belanja Tidak Langsung	1.743.382.396.223,66	1.628.133.985.918,00	93,39
	Belanja Langsung	1.341.278.086.443,73	1.240.132.723.565,00	92,46
3.	Surplus/(Defisit)	(101.350.444.501,17)	36.122.765.700,44	(35,64)
4.	Pembiayaan Daerah	101.350.444.501,17	81.350.444.501,17	80,27
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	117.473.210.201,61	-

Sumber : LRA BPKAD 2020

Sedangkan realisasi APBD pada tahun sebelumnya (2019) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Realisasi APBD Tahun Sebelumnya (2019)

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)
1.	Pendapatan Daerah	3.195.814.751.575,50	3.069.549.278.172,47	96,05
	Pendapatan Asli Daerah	529.971.744.632,50	463.528.449.322,47	88,13
	Dana Perimbangan	1.796.616.013.732,00	1.742.184.434.785,00	96,97
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	873.226.993.111,00	863.836.394.065,00	98,92
2.	Belanja Daerah	3.250.563.079.946,75	3.022.621.821.157,97	92,99
	Belanja Tidak Langsung	1.785.828.159.317,37	1.656.888.704.313,00	92,78
	Belanja Langsung	1.464.734.920.629,38	1.365.733.116.844,97	93,24
3.	Surplus/(Defisit)	(54.748.328.471,25)	46.927.457.014,50	(85,71)
4.	Pembiayaan Daerah	54.748.328.471,25	66.003.386.928,67	120,56
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	112.930.843.943,17	-

Sumber : LRA BPKAD 2019

Dengan demikian, pada tahun 2020 realisasi pendapatan daerah sebesar 97,35% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 96,05%, jadi terdapat peningkatan pendapatan sebesar 1,3%. Dari sisi belanja, pada tahun 2020 realisasi belanja sebesar 92,98% dan pada tahun 2019 sebesar 92,99%, jadi terdapat penurunan realisasi belanja sebesar 0,01%.

Realisasi anggaran program dalam membidik capaian indikator kinerja tahun tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Program
Dalam Membidik Indikator Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	370,088,634,906.56	326,514,201,769.00	88.23
Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah	378,860,150,657.00	369,219,725,541.00	97.46
	Angka Harapan Lama Sekolah	378,860,150,657.00	369,219,725,541.00	97.46
Terwujudnya penanggulangan MPKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin	7,293,790,700.00	3,524,153,392.00	48.32
	Indeks Pembangunan Gender	129,592,100.00	128,592,100.00	99.23
	Indeks Pemberdayaan Gender	729,856,950.00	693,006,950.00	94.95
Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	11,399,276,225.00	10,830,425,875.00	95.01
Terwujudnya percepatan	Laju Pertumbuhan	58,456,887,920.30	53,598,804,489.00	91.69

pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata	Ekonomi			
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	85,209,170,952.00	68,605,832,400.00	80.51
	Rasio Jaringan Irigasi	32,268,716,500.00	29,490,646,800.00	91.39
Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	92,227,510,475.70	85,987,648,849.00	93.23
	Indeks Risiko Bencana	3,840,495,850.00	3,788,011,765.00	98.63
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	16,277,115,236.00	14,329,265,424.00	88.03
	Nilai SAKIP Kabupaten	34,293,050,040.00	33,237,320,471.00	96.92
	Indeks Reformasi Birokrasi	27,051,104,473.00	25,331,707,682.00	93.64
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	61,369,629,868.00	57,907,501,436.00	94.36
Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Pengeluaran Per-Kapita	10,340,074,055.00	9,953,707,356.00	96.26

Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,711,626,262.00	2,681,806,986.00	98.90
	Jumlah UMKM	5,431,420,500.00	5,367,344,270.00	98.82
Jumlah		1,197,978,103,670.56	1,101,189,703,555.00	91.92

Sumber : LRA 2020, BPKAD

Sedangkan realisasi anggaran program dalam membidik capaian indikator kinerja tahun sebelumnya adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Program
Dalam Membidik Indikator Kinerja Tahun Sebelumnya
(Tahun 2019)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	271.914.527.468	233.358.870.845	85,82
Terwujudnya Pelayanan Sistem Pendidikan Yang Berkualitas Dan Merata	Rata-rata Lama Sekolah	694,000,000.00	615,562,400.00	88,70
	Angka Harapan Lama Sekolah	461.199.002.000	458.886.275.812	99,50
Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin	4.675.982.500	4.378.224.864	93,63
	Indeks Pembangunan Gender	1.715.000.000	1.639.772.950	95,61
	Indeks Pemberdayaan Gender	1.310.982.500	1.248.674.988	95,25
Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	566,997,000.00	566,395,950.00	99,89

Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	81.032.469.193	78.125.475.488	96,41
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	135,155,603,300.00	114,841,901,056.00	84,97
	Rasio Jaringan Irigasi	33.686.489.500	30.108.972.800	89,38
Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77.830.393.700	71.493.299.636	91,86
	Indeks Risiko Bencana	8,005,002,000.00	5,757,310,330.00	71,92
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	7.590.638.450	6.610.030.071	87,08
	Nilai SAKIP Kabupaten	10.245.780.600	9.424.103.227	91,98
	Indeks Reformasi Birokrasi	11.826.895.650	11.164.081.324	94,40
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	11.524.122.000	10.984.953.195	95,32
Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Pengeluaran Per Kapita	6.099.421.400	5.839.502.520	95,74
Menciptakan Wirausahawan dan Tenaga Kerja Kompeten yang Memenuhi Kebutuhan Pasar	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.396.989.000	3.355.201.825	98,77
	Jumlah wirausahawan (UMKM)	2.695.509.968	2.663.826.350	98,82
Jumlah		1.131.165.806.229	1.051.062.435.631	92,92

Sumber : LRA 2019, BPKAD.



BAB IV PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020, bahwa rata-rata capaian realisasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2020 sebesar 91,20% (Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI). Adapun rincian capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Ke-1 : Angka Harapan Hidup

Target kinerja “Angka Harapan Hidup” tahun 2020 sebesar 72,44 tahun dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar 72,43 tahun atau capaian kinerja sebesar 99,99% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

b. Indikator Kinerja Ke-2 : Rata-Rata Lama Sekolah

Target kinerja “Rata-Rata Lama Sekolah” tahun 2020 sebesar 8,48 tahun dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar 8,51 tahun atau capaian kinerja sebesar 100,35% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tercapai melebihi target.

c. Indikator Kinerja Ke-3 : Angka Harapan Lama Sekolah

Target kinerja “Angka Harapan Lama Sekolah” tahun 2020 sebesar 13,44 tahun dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar 12,97 tahun atau capaian kinerja sebesar 96,50% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

d. Indikator Kinerja Ke-4 : Persentase Penduduk Miskin

Target kinerja “Persentase Penduduk Miskin” tahun 2020 sebesar 8,16% dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar 10,26% atau capaian kinerja sebesar 74,27% (kinerja sedang). Target kinerja tidak tercapai.

e. Indikator Kinerja Ke-5 : Indeks Pembangunan Gender

Target kinerja “Indeks Pembangunan Gender” tahun 2020 sebesar 95,34 poin dan realisasinya 95,18 poin atau capaian kinerja sebesar 99,83% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

f. Indikator Kinerja Ke-6 : Indeks Pemberdayaan Gender

Target kinerja “Indeks Pemberdayaan Gender” tahun 2020 sebesar 69.77 poin dan realisasinya 70.94 poin atau capaian kinerja sebesar 101,67%. Capaian kinerja telah melebihi target.

g. Indikator Kinerja Ke-7 : Indeks Kerukunan Umat Beragama

Target kinerja “Indeks Kerukunan Umat Beragama” tahun 2020 sebesar 73 poin dan realisasinya 72,2 poin atau capaian kinerja sebesar 98,93% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

h. Indikator Kinerja Ke-8 : Laju Pertumbuhan Ekonomi

Target kinerja “Laju Pertumbuhan Ekonomi” tahun 2020 sebesar 7,01% dan realisasinya -1,12% atau capaian kinerja sebesar -15,98% (kinerja sangat rendah). Target kinerja tidak tercapai.

i. Indikator Kinerja Ke-9 : Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap

Target kinerja “Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap” tahun 2020 sebesar 70,8% dan realisasinya 76,96% atau capaian kinerja sebesar 108,70% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tercapai.

j. Indikator Kinerja Ke-10 : Rasio Jaringan Irigasi

Target kinerja “Rasio Jaringan Irigasi” tahun 2020 sebesar 64% dan realisasinya 64,46% atau capaian kinerja sebesar 100,72% (kinerja sangat tinggi). Capaian kinerja melebihi target.

k. Indikator Kinerja Ke-11 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Target kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” tahun 2020 sebesar 59,18 poin dan realisasinya sebesar 70,89 poin atau capaian kinerja sebesar 119,79% (kinerja sangat tinggi). Pencapaian kinerja telah melebihi target.

l. Indikator Kinerja Ke-12 : Indeks Risiko Bencana

Target kinerja “Indeks Risiko Bencana” tahun 2020 sebesar 150 poin dan realisasinya adalah 142,2 poin atau capaian kinerja sebesar 105,20% (kinerja sangat tinggi). Pencapaian kinerja melebihi target.

m. Indikator Kinerja Ke-13 : Opini BPK

Target kinerja “Opini BPK” tahun 2020 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan realisasinya adalah WTP atau capaian kinerja sebesar 100% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tercapai.

n. Indikator Kinerja Ke-14 : Nilai SAKIP Kabupaten

Target kinerja “Nilai SAKIP Kabupaten” tahun 2020 adalah “BB” dan realisasinya adalah “B” atau capaian kinerja sebesar 96,07% (kinerja tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

o. Indikator Kinerja Ke-15 : Indeks Reformasi Birokrasi

Target kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” tahun 2020 sebesar 70 poin dan realisasinya 60,01 poin atau capaian kinerja sebesar 85,73% (kinerja tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

p. Indikator Kinerja Ke-16 : Indeks Kepuasan Masyarakat

Target kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat” tahun 2020 sebesar 83 poin dan realisasinya berdasarkan data dari Bagian Organisasi adalah 83,80 poin atau capaian kinerja sebesar 100,98% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tercapai melebihi target.

q. Indikator Kinerja Ke-17 : Pengeluaran Per-Kapita

Target kinerja “Pengeluaran Per-Kapita” tahun 2020 sebesar Rp.10,38 juta dan realisasinya berdasarkan data dari BPS adalah Rp. 10,22 juta atau capaian kinerja sebesar 98,46% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

r. Indikator Kinerja Ke-18 : Tingkat Pengangguran Terbuka

Target kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” tahun 2020 sebesar 6,35% dan realisasinya berdasarkan data dari BPS adalah 9,89% atau capaian kinerja sebesar 44,25% (kinerja sangat rendah). Target kinerja tidak tercapai.

s. Indikator Kinerja Ke-19 : Jumlah UMKM

Target kinerja “Jumlah UMKM” tahun 2020 sebesar 17.467 UMKM dan realisasinya 20.507 UMKM atau capaian kinerja sebesar 117,40% (Kinerja sangat tinggi). Capaian kinerja telah melebihi target.

Capaian kinerja tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 capaian kinerja sebesar 99,04% atau terjadi penurunan kinerja sebesar 7,84%.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2020, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan fungsi Gugus Tugas SAKIP, optimalisasi implementasi SAKIP dengan ditunjang oleh aplikasi MAUTI (e-SAKIP), serta optimalisasi implementasi SAKIP Desa untuk menunjang efektifitas implementasi SAKIP Kabupaten Sumedang.
- 2) Penguatan komitmen seluruh *stakeholders* untuk meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi dengan diakselerasi oleh pembangunan Zona Integritas di setiap perangkat daerah serta optimalisasi fungsi Tim Reformasi Birokrasi baik di tingkat kabupaten maupun perangkat daerah.
- 3) Pada tahun 2021 fokus terhadap pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, yang diharapkan akan berdampak secara langsung pada peningkatan LPE, pengeluaran per kapita, jumlah UMKM, AHH, RLM dan RLH serta berdampak pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.
- 4) Optimalisasi program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan untuk meningkatkan angka harapan hidup (AHH).
- 5) Untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah harus mengoptimalkan peningkatan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, serta meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.
- 6) Peningkatan kualitas pembangunan manusia dengan memperhatikan keseimbangan gender sehingga bisa meminimalisir kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.
- 7) Meningkatkan kerukunan umat beragama dengan meningkatkan penerapan nilai toleransi dan kerjasama antar pemeluk umat beragama dibantu dengan

optimalisasi fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama dan *stakeholders* lainnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Sumedang Tahun 2020 kami sampaikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat kepada instansi pemerintah yang lebih tinggi dan masyarakat.

Sumedang, Maret 2021

BUPATI SUMEDANG,



Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, S.T., M.M.



**“INSUN MEDAL
INSUN MADANGAN
SAYA LAHIR
UNTUK MEMBERI
PENERANGAN”**

**DAFTAR RAIHAN PRESTASI/PENGHARGAAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2020**

NO.	WAKTU	JENIS PRESTASI / PENGHARGAAN	UNIT KERJA PENERIMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
1.	26/6/2020	OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN 2019	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	PERWAKILAN BPK RI PROVINSI JAWA BARAT
2.	10/9/2020	PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN “ PARITRANA AWARD ” KATEGORI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DAN BPJS KETENAGAKERJA AN
3.	3/11/2020	PENGHARGAAN KABUPATEN TERBAIK KE-3 WILAYAH REGIONAL II (WILAYAH TENGAH) PELAKSNAAN 8 AKSI KONVERGENDI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2020	GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI
4.	26/11/2020	KABUPATEN TERBAIK DALAM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TINGKAT NASIONAL (JDIHN AWARDS 2020)	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)
5.	11/12/2020	PIALA ADHIGANA KATEGORI PEJABAT PIMPINAN TIGGI (PPT) PRATAMA TELADAN (INOVASI SAKIP DESA DAN TRANSFORMASI BIROKRASI)	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	KEMENPAN RB

NO.	WAKTU	JENIS PRESTASI / PENGHARGAAN	UNIT KERJA PENERIMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
6.	15/12/2020	TERBAIK 10 (TOP TEN) DAN TERBAIK 32 KOMPETISI INOVASI JAWA BARAT (KIJB) TAHUN 2020	INSPEKTORAT & DINAS PMD	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
7.	18/12/2020	<i>"INNOVATIVE GOVERNMENT PROGRAM OF THE YEAR" PADA MARKE TEER EDITOR'S CHOICE AWARD 2020 (INOVASI SAKIP DESA)</i>	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	MARKPLUS Inc.
8.	18/12/2020	INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (2020) KATEGORI "SANGAT INOVATIF"	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	KEMENDAGRI
9.	22/12/2020	TERBAK I KATEGORI KABUPATEN DENGAN KINERJA TERBAIK DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN KE-2 TINGKAT JAWA BARAT	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., M.M

Jabatan : BUPATI SUMEDANG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sumedang, 19 Oktober 2020

BUPATI SUMEDANG,



Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., M.M

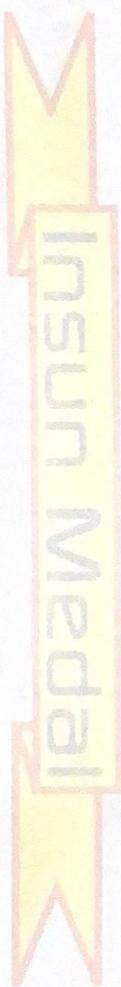
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BUPATI SUMEDANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,44
2	Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-rata Lama sekolah Harapan Lama Sekolah	Tahun	8,48
3	Terwujudnya penanggulangan PMKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin Indeks Pembangunan Gender Indeks Pemberdayaan Gender	Persen Poin Poin	8,16 95,34 69,77
4	Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	73
5	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,01
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	70,8
7	Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Rasio Jaringan Irigasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Risiko Bencana	Persen Poin Poin	64 53,18 150
8	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK Nilai SAKIP Kabupaten Indeks Reformasi Birokrasi	Opini Kategori Poin	WTP BB 70
9	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	Poin	83
10	Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Pengeluaran Per Kapita	Rp (juta)	10,38
11	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sumedang yang produktif	Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah UMKM	Persen UMKM	6,35 17.457

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Rp 13.537.521.146,00
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 47.122.832.937,90
3	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 305.271.000,00
4	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp 3.179.670.000,00
5	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular Dan Surveilans Epidemiologi	Rp 4.678.764.550,00
6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp 2.584.499.000,00
7	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat	Rp 2.628.524.550,00
8	Program Pembinaan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan	Rp 49.592.838.799,66
9	Program Pelayanan Kesehatan Pada Blud	Rp 63.953.562.960,00
10	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru Rumah Sakit/ Rumah	Rp 9.492.101.000,00
11	Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD	Rp 172.152.873.738,00
12	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 2.364.920.000,00
13	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 802.500.000,00
14	Program Kesetaraan	Rp 1.873.562.250,00
15	Program Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Dinyah Kabupaten	Rp 4.906.850.000,00
16	Program Pendidikan Dasar	Rp 230.796.401.207,00
17	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp 143.022.767.200,00
18	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp 3.852.048.000,00
19	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Rp 1.039.686.300,00
20	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp 456.226.750,00
21	Program Perlindungan Sosial	Rp 195.750.000,00
22	Program Jaminan Sosial	Rp 1.750.079.650,00
23	Program Kelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan	Rp 111.613.250,00
24	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp 1.266.959.200,00
25	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp 129.592.100,00
26	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp 111.275.000,00
27	Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 587.059.050,00

28	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp	126.825.200,00
29	Program Kawaspadaan Nasional	Rp	3.079.042.000,00
30	Program Kerukunan Umat Beragama	Rp	182.060.000,00
31	Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan	Rp	4.997.776.550,00
32	Program Pelayanan Bidang Perhubungan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Rp	2.292.041.000,00
33	Program Pengamanan Jalan dan Jembatan	Rp	85.209.170.952,00
34	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengaliran	Rp	32.268.716.400,00
35	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Rp	374.300.000,00
36	Program Penataan Ruang	Rp	2.929.550.000,00
37	Program Pengendalian banjir	Rp	50.000.000,00
38	Program penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp	686.176.854,00
39	Program Pengembangan dan Penataan Wilayah	Rp	38.942.756.985,00
40	Program Penanganan dan Pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp	6.456.043.286,70
41	Program Penyediaan Sarana dan Pengelolaan Limbah Domestik	Rp	300.000.000,00
42	Program Pengadaan Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	Rp	34.985.450.000,00
43	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	756.628.650,00
44	Program Rehabilitasi Dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Rp	414.288.000,00
45	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp	5.376.875.600,00
46	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp	330.168.000,00
47	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Rp	601.040.100,00
48	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Rp	74.233.000,00
49	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp	2.111.579.150,00
50	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	Rp	2.043.360.698,00
51	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen Aparatur	Rp	1.746.627.075,00
52	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	5.829.681.644,00

53	Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	8.330.948.642,00
54	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp	17.903.555.800,00
55	Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp	3.160.771.000,00
56	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp	295.375.000,00
57	Program Peningkatan Integritas	Rp	90.950.000,00
58	Program Administrasi Pemerintahan dan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah	Rp	551.875.200,00
59	Program Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Sekretariat Daerah	Rp	760.015.950,00
60	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp	5.982.119.652,00
61	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Rp	2.287.269.550,00
62	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Rp	178.621.100,00
63	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp	520.224.700,00
64	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp	14.734.312.075,00
65	Program Pengembangan Data /Informasi/Statistik Daerah	Rp	198.290.050,00
66	Program Pengamanan Berita Persandian dan Radiogram	Rp	364.879.550,00
67	Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah	Rp	642.185.265,00
68	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Rp	808.281.650,00
69	Program Peningkatan Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal	Rp	565.296.055,50
70	Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan PTSP	Rp	172.274.364,30
71	Program Kependudukan Dan Keluarga Berencana	Rp	9.331.012.105,00
72	Program Ketahanan Keluarga	Rp	405.841.160,00



73	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp	95.185.225,00
74	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp	6.354.972.600,00
75	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rp	385.125.000,00
76	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp	4.144.751.043,00
77	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Rp	10.110.194.341,50
78	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan	Rp	673.108.400,00
79	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Rp	74.162.300,00
80	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Rp	496.431.125,00
81	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Rp	2.167.249.520,00
82	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan	Rp	146.190.400,00
83	Program Kesehatan Lingkungan dan Konservasi	Rp	236.786.672,00
84	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Rp	133.830.000,00
85	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	47.390.000,00
86	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp	9.187.719.994,00
87	Program Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Rp	641.588.250,00
88	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	2.084.053.000,00
89	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp	627.573.262,00
90	Program Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	Rp	505.324.365,00
91	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Rp	2.187.653.000,00
92	Program transmigrasi Lokal	Rp	290.842.750,00
93	Program Penumbuhan Dan Penguatan Kelembagaan Koperasi	Rp	572.356.250,00
94	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Koperasi	Rp	1.232.700.000,00
95	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp	570.245.000,00
96	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp	3.813.770.000,00
97	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Rp	225.000.000,00
98	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp	855.734.520,00
99	Program Pemberdayaan, Penataan Dan Perlindungan Pasar Rakyat	Rp	979.956.500,00
100	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Rp	406.390.000,00
101	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Rp	678.000.000,00
102	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Rp	297.090.000,00

103	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rp	1.047.405.500,00
104	Program Pengembangan Kepariwisataan	Rp	19.093.432.600,00
105	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rp	530.301.500,00
106	Program Pembinaan Pemasarakatan dan Pengembangan Olahraga	Rp	764.990.000,00
107	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp	879.065.675,00
108	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	1.725.512.000,00
109	Program Perencanaan , Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Rp	965.867.000,00
110	Program Perencanaan , Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Ekonomi dan	Rp	1.212.900.000,00
111	Program Perencanaan , Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Pemerintahan dan Sosial	Rp	987.335.000,00
112	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	338.812.400,00
113	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Partisipasi Masyarakat	Rp	1.040.854.688,00
114	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp	687.609.125,00
115	Program Pementapan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa	Rp	965.066.575,00
116	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah	Rp	738.365.000,00
117	Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp	28.532.292.500,00
118	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp	1.314.937.100,00
119	Program Pemeliharaan Kelentraman dan Keterban Masyarakat	Rp	891.042.575,00
120	Program Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	Rp	1.728.916.700,00
121	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Rp	18.274.569.500,00
122	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Rp	811.807.663,00
123	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Rp	1.356.469.000,00
124	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Kelentraman dan Keterban Umum	Rp	786.906.100,00
125	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Rp	5.199.486.500,00

Insun Medal



DR. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., M.M.

Sumedang, 19 Oktober 2020
BUPATI SUMEDANG



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 155 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 131 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 perlu diubah untuk kedua kalinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652);
17. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 42);
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendidikan Wajib Diniyah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendidikan Wajib Diniyah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 35);
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 131 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 131);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019-2023.

Pasal I

Ketentuan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 131 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 131) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 155

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 19800715 200501 1 015

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 155 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 TAHUN 2019-2023

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019-2023

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN 2019-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
MISI 1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau					
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan
2	Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Dinas Pendidikan
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Dinas Pendidikan
3	Terwujudnya Penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin	Persen	$\% \text{ penduduk miskin} = \frac{(\text{Jumlah Penduduk Miskin})}{(\text{Total Jumlah penduduk})} \times 100$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pembangunan Gender	Poin	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan					
4	Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	hasil survei terhadap variabel persepsi, sikap dan kerjasama umat beragama	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal					
5	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	$Pertumbuhan\ Ekonomi/PDRB = (PDRB\ (t+1)-PDRB\ (t))/(PDRB\ (t))$	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	$(Panjang\ jalan\ Kabupaten\ dalam\ kondisi\ baik)/(Panjang\ seluruh\ jalan\ Kabupaten) \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio Jaringan Irigasi	Persen	$Rasio\ Jaringan\ Irigasi = (Panjang\ saluran\ irigasi)/(Luas\ lahan\ budidaya\ pertanian)$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	$IKLH = (30\% \times IK\ air) + (30\% \times IK\ udara) + (40\% \times IK\ tutupan\ lahan)$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Indeks Risiko Bencana	Poin	$RB = tingkat\ ancaman \times (tingkat\ kerentanan\ kawasan\ yg\ terancam) / (tingkat\ kapasitas\ kawasan\ yang\ terancam)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat					
8	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	Opini	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	Penjumlahan angka tertimbang dari masing-masing komponen manajemen kinerja	Sekretariat Daerah
		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Penjumlahan angka tertimbang dari masing-masing komponen (komponen pengungkit dan hasil)	Sekretariat Daerah
9	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	$SKM = (total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur) / (total\ unsur\ yang\ terisi) \times nilai\ penimbang$	Sekretariat Daerah
MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang					
10	Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Pengeluaran Per Kapita	Rp (juta)	$(Total\ pengeluaran\ Rumah\ tangga) / (Jumlah\ Rumah\ Tangga)$	Sekretariat Daerah
11	Menciptakan wirausaha dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja x 100 % Jumlah penduduk angkatan kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah Wirausaha (UMKM)	UMKM	data jumlah UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAHUN 2019-2023

1. SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	Nilai LPPD Kabupaten	Angka	Hasil Penilaian Propinsi atau pusat terhadap Indeks Capaian Kinerja (ICK) dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019	Sekretariat Daerah
2		Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	Hasil akumulasi presentasi jawaban perkomponen sesuai Peratururan Presiden Nomor 29 Tahun 2014	Sekretariat Daerah dan Inspektorat
3		Indeks RB	Point	Hasil Akumulasi presentasi jawaban per komponen sesuai permenpan 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	Sekretariat Daerah dan Inspektorat
4		Persentase Perangkat Daerah yang capaian target Tahunannya berkategori baik	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang capaian target Tahunannya berkategori baik}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Sekretariat daerah

2. Sekretariat Dewan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya fasilitasi dan dukungan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Dukungan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi dukungan kegiatan tugas dan fungsi DPRD}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Mengukur pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD</p>	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

3. Inspektorat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Optimalnya Fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang	Persentase Penerapan SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	$= \frac{\sum OPD \text{ yang sudah menerapkan SPIP}}{\sum \text{seluruh OPD}} \times 100\%$ <p>Formulasi diatas dimaksudkan untuk mengetahui persentase implementasi SPIP di setiap OPD yang berjumlah 55 OPD, dalam rangka penilaian level maturitas SPIP di setiap OPD tersebut dilihat dari hasil penilaian <i>Self assessment</i> (SA) yang terbagi dalam 5 unsur (1. lingkungan pengendalian, 2. Penilaian resiko, 3. kegiatan pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, 5. Pemantauan pengendalian intern). Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Indikator Opini BPK</p>	INSPEKTORAT
2		Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya Berkategori "Baik"	Persen	$= \frac{\sum SAKIP \text{ OPD yang bernilai B}}{\sum \text{seluruh SAKIP OPD yang dievaluasi}} \times 100\%$ <p>Formulasi diatas dimaksudkan untuk mengetahui persentase nilai evaluasi SAKIP pada setiap OPD yang berkategori (B) dengan nilai range >60 – 70, dengan intepretasi Baik, artinya Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Inspektorat yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori “Sangat Baik” dengan cara menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dasar hukum yang digunakan untuk menilai laporan SAKIP adalah Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Data diperoleh dengan membandingkan persentase nilai evaluasi SAKIP OPD yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori “ Sangat Baik” dengan jumlah OPD yang dievaluasi. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Nilai SAKIP Kabupaten dan Indikator Indek</p>	INSPEKTORAT
3		Tingkat Kapabilitas APIP/ IACM	Kategori	IACM bertujuan untuk memperkuat atau meningkatkan audit internal melalui langkah evolusi kecil yang disusun menjadi lima level kapabilitas progresif, yaitu: Level 1 : Initial, Level 2 : Infrastructure, Level 3 : Integrated, Level 4 : Managed, Level 5 : Optimizing Setiap level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit internal yang bersangkutan. Semakin tinggi level kapabilitas APIP, menunjukkan semakin meningkatnya ukuran, kompleksitas maupun risiko organisasi. Pada masing-masing level kapabilitas tersebut, terdapat enam elemen audit internal, yaitu: Peran dan layanan audit intern; Manajemen SDM; Praktik profesional; Manajemen kinerja dan akuntabilitas; Hubungan dan budaya organisasi; Struktur tata kelola. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.	INSPEKTORAT

4		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	Persen	$= \frac{\sum OPD \text{ yang sudah melaksanakan ZI}}{\sum \text{seluruh OPD}} \times 100\%$ <p>Zona integritas merupakan upaya percepatan pelaksanaan Reformasi birokrasi, dengan menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat unit kerja. Pembangunan zona integritas dimulai dari pencaangan unit kerja percontohan sebagai Zona Integritas, pembangunan zona integritas, evaluasi internal oleh Tim Penilai Internal (TPI) instansi pemerintah (Inspektorat jenderal/inspektorat kementerian/Lembaga, inspektorat daerah). Tim penilai internal penilaian mandiri (self assessment) lembar Kerja Evaluasi (ZI) menuju WBK/WBBM terhadap OPD yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK, sesuai dengan PermenpanRB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Yang mendukung pada IKU RPMD yaitu Indeks Reformasi Birokrasi</p>	INSPEKTORAT
5		Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan sesuai rekomendasi	Persen	$= \frac{\sum \text{temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{seluruh temuan hasil pemeriksaan}} \times 100\%$ <p>untuk mengukur persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan cara membandingkan jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan jumlah temuan. Sedangkan persentase peningkatan adalah peningkatan persentase temuan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.</p>	INSPEKTORAT
6		Persentase Temuan Penyimpangan terhadap APBD	Persen	$= \frac{\sum \text{temuan penyimpangan terhadap APBD}}{\sum \text{seluruh temuan hasil pemeriksaan}} \times 100\%$ <p>untuk mengukur persentase penurunan temuan dari penyimpangan keuangan APBD yang material hasil pemeriksaan APIP dengan cara membandingkan jumlah seluruh temuan hasil pemeriksaan APIP. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi</p>	INSPEKTORAT

4. Dinas Pendidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Mutu dan aksebilitas pelayanan pendidikan dasar (SD-SMP)	Angka partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang sekolah di SD}}{\text{Jumlah Penduduk Umur 7-12 Th}} \times 100\%$	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
2		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang sekolah di SMP}}{\text{Jumlah Penduduk Umur 13-15 Th}} \times 100\%$	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
3		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Umur 7-12 Th yang sekolah di SD}}{\text{Jumlah Penduduk Umur 7-12 Th}} \times 100\%$	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
4		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Umur 13-15 Th yang sekolah di SMP}}{\text{Jumlah Penduduk Umur 13-15 Th}} \times 100\%$	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
5		Persentase Guru yang Bersertifikasi	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Umur 13-15 Th yang sekolah di SMP}}{\text{Jumlah Penduduk Umur 13-15 Th}} \times 100\%$	Permendikbud Nomor 19 tahun 2019
6		Sekolah pendidikan Dasar kondisi bangunan baik	Persen	$\frac{\text{Jumlah Ruang Kelas yang Baik}}{\text{Jumlah Ruang Kelas Keseluruhan}} \times 100\%$	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
7		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SD)		$\frac{\text{Jumlah Guru SD}}{\text{Jumlah Siswa SD}} \times 100\%$	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
8		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SMP)		$\frac{\text{Jumlah Guru SD}}{\text{Jumlah Siswa SD}} \times 100\%$	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
9	Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	APK PAUD	Persen	$\frac{\text{Jumlah Guru SD}}{\text{Jumlah Siswa SD}} \times 100\%$	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
10		Persentase PAUD yang terakreditasi	Persen	$\frac{\text{Jumlah PAUD yang sudah terakreditasi}}{\text{Jumlah PAUD}} \times 100\%$	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2018
11		Angka partisipasi kasar kesetaraan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia 7-12 Th, 13-15 Th, 16-18 Th}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2019
12		Persentase siswa Bersertifikat Diniyah	Persen	$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia 3-6 Th yg mengikuti wajib diniyah}}{\text{Jumlah siswa kelas 3 s.d.jenjang SD}} \times 100\%$	Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019

5. Dinas Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatkan Akses, Cakupan dan Mutu Layanan Kesehatan	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu	Laporan seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
2		Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	Jumlah bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu	Laporan seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
3		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Poin	$\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Laporan seksi mutu pelayanan
4		Persentase Balita Stunting	Persen	$\frac{\text{Jumlah Balita Stunting di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Semua Balita di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
5		Prevalensi HIV/AIDS	Persen	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15-49 th yang positif HIV}}{\text{Penduduk usia 15-49 th}} \times 100\%$	Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

6		Angka Kesakitan Penyakit Menular	Angka	$\frac{\text{Jumlah kasus baru (diwakili Inciden rate DBD,HIV TB)}}{\text{Jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu}} \times 100.000$	Laporan Seksi Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular
7		Universal Healht Coverage	Persen	$\frac{\text{Jumlah penduduk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional}}{\text{Jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$	Laporan seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
8		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	$\frac{\text{Jumlah Indikator bernilai 1 (jawaban Y)}}{12 \text{ indikator} - \Sigma N \text{ (jawaban Not applicated)}}$	Laporan seksi Pelayanan Kesehatan Primer

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	$= \frac{\text{Panjang Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang}}{\text{Jumlah Panjang jalan Kabupaten}} \times 100 \%$	Dinas PUPR, RPJMD KAB. SUMEDANG TAHUN 2018-2023
2	Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air untuk Irigasi	Rasio jaringan irigasi	Persen	$= \frac{\text{Luas Daerah Irigasi yang terairi}}{\text{Luas Lahan Budidaya Pertanian}} \times 100 \%$	Dinas PUPR, RPJMD KAB. SUMEDANG TAHUN 2018-2023
3	Meningkatnya Keselarasan dan Terintegrasinya Penataan Ruang Wilayah	Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang	Persen	$= \frac{\text{Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Tata Ruang}}{\text{RTRW dan RDTR}} \times 100$	Dinas PUPR, RPJMD KAB. SUMEDANG TAHUN 2018-2023
4	Meningkatnya ketersediaan informasi penyediaan jasa konstruksi	Usaha Jasa Konstruksi yang terstandarisasi	Persen	$= \frac{\text{Jumlah target prosentase dalam tahun berjalan}}{\text{Jumlah target prosentase dalam akhir Periode}} \times 100 + \text{Jumlah target tahun sebelumnya}$	Dinas PUPR, RPJMD KAB. SUMEDANG TAHUN 2018-2023

7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Mewujudkan Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	Jumlah Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Seluruh Rumah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2		Persentase lingkungan Pemukiman kumuh	Persen	Jumlah Luas Permukiman Kumuh terhadap Jumlah Luas Permukiman dan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3		Persentase Rumah Tangga berakses air minum	Persen	Jumlah Rumah Tangga yang Berakses terhadap Jumlah Seluruh Rumah Tangga	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	Jumlah Rumah Tangga yang Bersanitasi terhadap Jumlah Seluruh Rumah Tangga	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5		Persentase Bangunan Pemerintahan yang tertata	Persen	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang Tertata terhadap Jumlah Bangunan dan Lingkungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	Mewujudkan Pelayanan Pertanahan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi	Persen	Jumlah Kasus Sengketa terhadap Jumlah KK yang Tertangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
7		Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	Persen	Jumlah Bidang Tanah yang di Bebasan terhadap Jumlah Rencana Luas Tanah yang akan Dibebaskan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial dibagi jumlah penduduk dikali 100%	DINSOS-P3A
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	Jumlah Perempuan dan Anak yang mendapatkan layanan P2TP2A dibagi Jumlah Pengaduan dikali 100%	DINSOS-P3A
3		Kabupaten Layak Anak	Skor	Skor Yang Diperoleh	DINSOS-P3A
4		Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkatkan Ekonomi keluarganya	Persen	Jumlah Pekka yang sudah mandiri dibagi Jumlah Pekka dikali 100%	DINSOS-P3A

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	$\frac{JUMLAH\ PENGANGGUR}{ANGKATAN\ KERJA} \times 100$	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
2	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis Dinamis dan Berkeadilan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	$\frac{KASUS\ YANG\ DISELESAIKAN}{KASUS\ YANG\ TERDAFTAR\ KEDISNAKER} \times 100$	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
3	Meningkatnya Penempatan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	KK	Jumlah Kuota Transmigran yang di tempatkan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Optimalnya Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan	Persentase penanganan sampah	persen	$\frac{Jumlah\ Sampah\ yang\ ditangani\ (ton/Tahun)}{Jumlah\ Timbulan\ Sampah\ (Ton/Tahun)} \times 100\%$	Laporan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Bidang Persampahan dan Pertamanan
2		Persentase pengurangan sampah	persen	$\frac{Jumlah\ Sampah\ yang\ berkurang\ disumber\ sampah\ (ton/tahun)}{Jumlah\ timbulan\ sampah\ (ton/tahun)} \times 100\%$	Laporan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Bidang Persampahan dan Pertamanan
3		Persentase RTH Terkelola	Persen	$\frac{Luas\ RTH\ Publik\ yang\ dikelola\ (Ha)}{Luas\ RTH\ Publik\ (Ha)} \times 100\%$	Laporan Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Bidang Persampahan dan Pertamanan
4	Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	$IKA = 100 - \left(\frac{\sum Sample\ IPA > 1}{\sum Sampel} \times 100 \right)$ Merupakan Status mutu air yaitu tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan	Laporan Pengendalian dan Pengujian Kualitas Air Sungai Bidang Pengendalian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan Bidang Penataan dan Pnaatan Hukum Lingkungan
5		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1) \right)$ Merupakan indek mutu udara ambien yaitu keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.	Laporan Pengendalian dan Pengujian Kualitas Udara Bidang Pengendalian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

6		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	$ITV = 100 - \left[\{84,3 - (TV \times 100)\} \times \frac{50}{54,3} \right]$ LUAS TUTUPAN VEGETASI (LTV) = data kawasan hutan + data luasan hutan hak + data luasan VEGETASI hasil perhitungan/interpretasi (RTH,dll)	Laporan Aktivitas Peningkatan Tutupan Lahan Bidang Pengendalian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan Bidang Kehutanan
---	--	--------------------------------------	------	---	---

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Percepatan Penertiban Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	Poin	$\frac{\text{Total nilai per Unsur}}{\text{Total nilai yang Terisi}} \times 100\%$	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
2		Persentase Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Wajib KTP	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah Penduduk Usia > 17 atau Telah Menikah}}$	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
3		Persentase Bayi ber-Akte Kelahiran	Persen	$\frac{\text{Jumlah Bayi ber Akte Kelahiran}}{\text{Jumlah Bayi Lahir}}$	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
4		Persentase Data Ganda dan Anomali	Persen	$\frac{\text{Jumlah Data ganda dan Anomali}}{\text{Jumlah Data Penduduk}}$	Data Kependudukan Bersih (DKB) Dirjen Dukcapil Kemendagri

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Desa	Persentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang	Persen	$\frac{\text{Jumlah Desa Berkembang dan Cepat Berkembang}}{\text{Jumlah Desa Yang Ada}} \times 100\%$	DPMD Bidang Pemerintahan Desa
2	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Desa	Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang	Persen	$\frac{\text{Jumlah BUMDes Maju dan Berkembang}}{\text{Jumlah BUMDes Yang Aktif}} \times 100\%$	DPMD Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Siskudes	Persentase Penerapan Siskudes Kategori Optimal	Persen	$\frac{\text{Penerapan Siskudes}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	DPMD Bidang Keuangan dan Aset Desa

13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Optimalisasi Pengendalian Penduduk Melalui KB	Total Fertility rate (TFR)	Angka	$\frac{5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i}{ASFR_i}$	DPPKB
2	Meningkatkan Kemandirian Keluarga Peserta KB	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Persen	$\frac{\text{Jumlah Keluarga Pra Sejahtera}}{\text{Jumlah Total Keluarga}} \times 100\%$	DPPKB
3		Persentase Keluarga Sejahtera 1	Persen	$\frac{\text{Jumlah Keluarga Sejahtera 1}}{\text{Jumlah Total Keluarga}} \times 100\%$	DPPKB

14. Dinas Perhubungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas daerah	Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persen	Jumlah dokumen, Jumlah ketersediaan rambu-rambu lalu lintas, jumlah ketersediaan PJU, Jumlah terminal; /dermaga	Dinas Perhubungan
2	Meningkatnya Sistem Transportasi yang dapat mendukung Mobilitas masyarakat	Cakupan Trayek Angkutan Umum	Persen	$\frac{\text{Jumlah trayek yang registrasi pada tahun } n}{\text{Jumlah Ijin trayek yang ada}} \times 100$	Dinas Perhubungan
3		Rata - rata Peningkatan Penumpang Angkutan Umum	orang/hari	$\frac{\text{Jumlah penumpang per hari}}{\text{Kapasitas angkutan umum penumpang (Alokasi Angkot/Angdes)}} \times 100$	Dinas Perhubungan
4		Persentase Kendaraan Laik Jalan	Persen	Jumlah Kir Per tahun	Dinas Perhubungan
5	Terciptanya Keamanan Kenyamanan dan Ketertiban Lalu Lintas bagi para pengguna jalan	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Per tahun	Dinas Perhubungan
6		Cakupan Satuan Ruas Parkir (SRP)	Persen	Jumlah Satuan Ruas Parkir (SRP)	Dinas Perhubungan

15. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi	Persen	$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah Kecamatan yang ada dalam Kab/Kota}} \times 100\%$	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai SPBE	Poin	Penjumlahan dari Setiap Nilai Indikator yang dihitung X nilai tingkat kematangan dan bobot indikator	Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data yang Akurat dan Berkualitas	Persen	$\frac{\text{Jumlah Data Yang Akurat}}{\text{Jumlah Data Yang Harus Ada}} \times 100\%$	Hasil Rumusan Bersama Antara Dinas dengan Bappppeda
4		Cakupan Pengamanan Informasi Daerah	Persen	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memiliki sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah keseluruhan OPD}} \times 100\%$	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah

16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Perdagangan	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	persen	Jumlah subsektor perdagangan besar dan eceran (n) : Jumlah PDRB Tahun n)	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab.Sumedang dan BPS Kab. Sumedang
2		Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan	persen	Jumlah subsektor industri pengolahan (n) : Jumlah PDRB Tahun n)	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab.Sumedang dan BPS Kab. Sumedang

3	Mengoptimalkan Peran Koperasi	Cakupan Koperasi Aktif	persen	Jumlah Koperasi Aktif (n) : Jumlah Seluruh Koperasi Tahun (n)	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab.Sumedang
4	Meningkatkan Kualitas Wirausahawan	Jumlah UMKM	UMKM	Jumlah UMKM Tahun (n)	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab.Sumedang

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dalam Penyelenggaraan PTSP	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	(Rp)	Jumlah Nilai Investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Sumedang	LKPM
2		Indeks Kepuasan masyarakat Bidang Perizinan	Poin	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	DPMPPTSP

18. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persen	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif}}{\text{Jumlah Organisasi Kepemudaan yang ada di Kabupaten Sumedang}} \times 100\%$	Bidang Pemuda dan Olahraga
2	Meningkatnya Capaian Prestasi Olahraga	Jumlah Atlet yang berprestasi tingkat Nasional	Orang	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional	Bidang Pemuda dan Olahraga
3	Meningkatnya Ketahanan Budaya Daerah	Cakupan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Jumlah Budaya Daerah yang Dilindungi, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dibina}}{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada}} \times 100\%$	Bidang Kebudayaan
4	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Sumedang	Bidang Pariwisata
5	Mengembangkan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan sampai skala nasional	Persen	$\frac{\text{Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan}}{\text{Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang ada di Kabupaten Sumedang}} \times 100\%$	Bidang Ekonomi Kreatif

19. Dinas Arsip dan Perpustakaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Peningkatan Pemahaman atas pentingnya arsip dalam pelaksanaan pemerintahan daerah	Peningkatan Jumlah Pengunjung perpustakaan	Orang	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan yang ada di Kabupaten Sumedang. Mengukur Jumlah Kunjungan ke perpustakaan yang ada di Kabupaten Sumedang	Kegiatan Layanan Perpustakaan
2	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan	Cakupan Lokasi yang terlayani melalui pusling	Persen	$\frac{\text{Jumlah Lokasi yang terlayani melalui pusling}}{\text{Jumlah Desa di Kabupaten Sumedang}} \times 100\%$ Mengukur Jumlah Lokasi yang terlayani melalui pusling dengan jumlah desa di kabupaten sumedang	Kegiatan Layanan Perpustakaan

3	Peningkatan Jumlah Koleksi Pustaka sesuai dengan minat masyarakat	Tingkat kepuasan pengunjung	Persen	Jumlah Kepuasan pengunjung Mengukur Jumlah kepuasan pengunjung melalui Standar Kepuasan Masyarakat (SKM)	SKM (standar Kepuasan Masyarakat)
4	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertata arsipnya sesuai dengan standar	Persen	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang arsipnya sesuai standar}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang}} \times 100\%$ Mengukur Jumlah Perangkat Daerah yang berstandar arsipnya	Kegiatan Pembinaan Kearsipan

20. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor :			
		a. Tanaman Pangan	Persen	$Gt = \frac{PDRBt - PDRBt - 1}{PDRBt - 1} \times 100\%$ Gt = Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan PDRBt = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman pangan pada suatu tahun PDRB = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman pangan pada tahun sebelumnya	Badan Pusat Statistik Kab. Sumedang
		B. Tanaman Hortikultura	Persen	$Gt = \frac{PDRBt - PDRBt - 1}{PDRBt - 1} \times 100\%$ Gt = Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman hortikultura PDRBt = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman hortikultura pada suatu tahun PDRB = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman hortikultura pada tahun sebelumnya	Badan Pusat Statistik
	c. Tanaman Perkebunan	Persen	$Gt = \frac{PDRBt - PDRBt - 1}{PDRBt - 1} \times 100\%$ Gt = Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman perkebunan PDRBt = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman perkebunan pada suatu tahun PDRB = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman perkebunan pada tahun sebelumnya	Badan Pusat Statistik	
2	Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	Sektor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	$PPH = \% \text{ Angka Kecukupan Gizi (AKG)} \times \text{ bobot masing - masing kelompok pangan}$ Pola Pangan Harapan adalah susunan pangan yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Kualitas konsumsi pangan penduduk dicerminkan dari besaran skor pola pangan harapan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi Skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.	Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik

21. Dinas Perikanan dan Peternakan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Produktivitas Hasil Perikanan dan Peternakan	Laju pertumbuhan Subsektor Perikanan	Persen	$\frac{((PDRB\ ADHK\ perikanan\ tahun\ n - PDRB\ ADHK\ perikanan\ (n-1)) / PDRB\ ADHK\ perikanan\ tahun\ (n-1)) \times 100\%}{}$	BPS Kab. Sumedang
2		Laju pertumbuhan Subsektor Peternakan	persen	$\frac{((PDRB\ ADHK\ peternakan\ tahun\ n - PDRB\ ADHK\ perikanan\ (n-1)) / PDRB\ ADHK\ peternakan\ tahun\ (n-1)) \times 100\%}{}$	BPS Kab. Sumedang

22. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Renstra terhadap RPJMD	Persen	$\frac{Jumlah\ Sasaran\ Renstra\ Tahun\ Berkenaan}{Jumlah\ Sasaran\ RPJMD\ yang\ harus\ Dilaksanakan\ Tahun\ Berkenaan} \times 100\%$	RPJMD dan RENSTRA
2		Tingkat Kesesuaian RKPd terhadap RPJMD	Persen	$\frac{Jumlah\ Sasaran\ RKPd\ Tahun\ Berkenaan}{Jumlah\ Sasaran\ RPJMD\ yang\ harus\ Dilaksanakan\ Tahun\ Berkenaan} \times 100\%$	RPJMD dan RKPd
3		Tingkat Kesesuaian Renja terhadap RKPd	Persen	$\frac{Jumlah\ Sasaran\ Renja\ Tahun\ Berkenaan}{Jumlah\ Sasaran\ RKPd\ yang\ harus\ Dilaksanakan\ Tahun\ Berkenaan} \times 100\%$	RKPd dan RENSTRA
4		Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan Daerah yang berkategori "Baik"	Persen	melihat fakta hasil pembangunan yg dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian	RPJMD
5	Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan	Persen	$\frac{Jumlah\ Penelitian\ dan\ Pengembangan\ yang\ diimplementasikan\ (n)}{Jumlah\ Penelitian\ dan\ Pengembangan\ yang\ dilaksanakan\ (n-1)} \times 100\%$	DOKUMEN PENELITIAN dan DPA

23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kompetensi, Kinerja, Disiplin ASN dan Pelayanan Kepegawaian yang Bersih dan Melayani	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	Hasil dari aplikasi (situs) DJSAN yang diinput oleh BKPSDM	BKN
2		Indeks Sistem Merit ASN	Poin	Hasil dari Aplikasi (situs) SIPINTER yang diinput oleh BKPSDM	KASN

24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	Opini	Penjelasan : Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Formulasi : Opini yang didapat dari Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD
2		APBD Tepat Waktu	Status	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	BPKAD

25. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	Penjelasan : Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Realisasi Pendapatan dengan Target 17.03 %	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
Formulasi : $\frac{\text{Realisasi Asli Pendapatan Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$					
2		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah	Poin	Penjelasan : Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat IKM 85 Poin Formulasi : Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

26. Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Efektivitas Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Tibumtranmas	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang Setiap RT)	Persen	$\frac{\sum \text{satuan Linmas}}{\text{Jumlah RT}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Terciptanya Kondisi Wilayah yang Aman, Nyaman, Tertib, Teratur dan Tentram	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	$\frac{\text{Pelanggaran K-3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K-3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mematuhi Peraturan Perundang - Undangan Daerah	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani	Persen	$\frac{\text{Penyelesaian Pelanggaran Penegakan PERDA}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen	$\frac{\sum \text{Luas WMK (Luas Lingkaran)}}{\sum \text{luas potensi kebakaran}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja
5		Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	$\frac{\sum \text{kasus kebakaran di WMK yg tertangani dlm waktu tanggap}}{\sum \text{kasus kebakaran dlm jangkauan WMK}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja

27. Rumah Sakit Umum Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai kewenangan Kelas B	Persen	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien yang dirujuk}}{\text{Total Kunjungan Pasien}} \times 100\%$	RSUD Kabupaten Sumedang
2		IKM Rumah Sakit	poin	Nilai Indeks X Nilai Dasar	RSUD Kabupaten Sumedang
3		Persentase Pencapaian Indikator Mutu Pelayanan di Rumah Sakit	Persen	$\frac{\text{Numerator}}{\text{Denominator}} \times 100\%$	RSUD Kabupaten Sumedang

28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Pengurangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Sumedang	Indeks Resiko Bencana	Poin	<p>Penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana</p> <p>Formulasi : Risiko (R) = Bahaya (H) x $\frac{\text{Kerentanan (V)}}{\text{Kapasitas (C)}}$</p>	BPBD

29. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Negara Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Indeks kerukunan umat beragama	Persen	SURVEI Index Kerukunan Umat Beragama	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
2		Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	Persen	$100 / 100 + (\text{jumlah konflik}) \times 100\%$	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Tingkat Partisipasi dalam Mendukung Proses Demokrasi	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	$(\text{Jumlah suara sah} + \text{Suara Tidak sah}) \times 100\%$	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
4		Persentase Ormas yang dibina kategori Aktif	Persen	$\text{jumlah ormas} / \text{jumlah ormas aktif} \times 100\%$	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

30. Kecamatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total Unsur yang Terisi dikali Nilai Penimbang (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017)	Kecamatan
2		Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	KK	Jumlah Rumah Tangga Miskin Desil 1 dan 2 yang keluar dari data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Kecamatan
3		Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	Persen	Jumlah Desa yang menggunakan 4 Menu Siskeudes (Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan) dibagi Jumlah Desa dikali 100 Persen	Kecamatan
4		Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	Jumlah Kejadian Bencana yang ditangani dibagi Jumlah Bencana dikali 100 Persen	Kecamatan
5		Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	Jumlah SPPT PBB yang dibayar dibagi jumlah SPPT PBB dikali 100 Persen	Kecamatan

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR